



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

V_a

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

LAMPIRAN

I.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH	Buku I
II.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD	Buku I
III.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT	Buku I
IV.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH	Buku I
IV. A	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Buku I
IV. B	DINAS KESEHATAN	Buku I
IV. C	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Buku I
IV. D	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Buku I
IV. E	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Buku II
IV. F	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Buku II
IV. G	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Buku II
IV. H	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Buku II
IV. I	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Buku II
IV. J	DINAS PERHUBUNGAN	Buku II
IV. K	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Buku III
IV. L	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Buku III
IV. M	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Buku III
IV. N	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Buku III
IV. O	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,	Buku III

	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
IV. P	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ ANNA LASMANAH	Buku III
V.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN DAERAH	
V. A	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Buku IV
V. B	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Buku IV
V. C	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Buku IV
V. D	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Buku IV
V. E	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Buku IV
VI	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN	
VI. A	KECAMATAN BANJARNEGARA	Buku Va
VI. B	KECAMATAN BAWANG	Buku Va
VI. C	KECAMATAN MADUKARA	Buku Va
VI. D	KECAMATAN SIGALUH	Buku Va
VI. E	KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK	Buku Va
VI. F	KECAMATAN SUSUKAN	Buku Va
VI. G	KECAMATAN MANDIRAJA	Buku Va
VI. H	KECAMATAN PURWANEGARA	Buku Va
VI. I	KECAMATAN WANADADI	Buku Va
VI. J	KECAMATAN BANJARMANGU	Buku Va
VI. K	KECAMATAN RAKIT	Buku Vb
VI. L	KECAMATAN PUNGCELAN	Buku Vb
VI. M	KECAMATAN KARANGKOBAR	Buku Vb
VI. N	KECAMATAN WANAYASA	Buku Vb
VI. O	KECAMATAN KALIBENING	Buku Vb
VI. P	KECAMATAN BATUR	Buku Vb
VI. Q	KECAMATAN PAGANTAN	Buku Vb
VI. R	KECAMATAN PEJAWARAN	Buku Vb
VI. S	KECAMATAN PAGEDONGAN	Buku Vb
VI. T	KECAMATAN PANDANARUM	Buku Vb



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 59 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 :

- a. menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024; dan
- b. sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP.

Pasal 4

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-12-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-12-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 59

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat

Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2023 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 5 program, 9 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 15.367.547.501-, dengan fokus utama pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan tugas yang di limpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam rangka menunjang Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja perekam data

administrasi kependudukan yang secara langsung melayani masyarakat, dan tugas – tugas lain.

4. Keterbatasan Kemampuan aparatur kelurahan dan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan terkait dengan implementasi DAU Tambahan Kelurahan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
5. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam mengerjakan buku-buku Administrasi Desa (tidak sesuai Juknis).
6. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di kelurahan dan desa masing-masing.
7. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi perubahan yaitu Penambahan pagu anggaran program/kegiatan/sub kegiatan, - pada saat Perencanaan itu sampai ke pada DPPKAD terjadi perubahan yaitu berdasarkan KUA PPAS anggaran Kecamatan Banjarnegara menjadi 15.429.169.581 , perubahan Pagu Anggaran tersebut di berdasarkan Petunjuk dari Bapak Bupati terkait urusan wajib yang menjadi prioritas , yang akhirnya pada uruwan wajib Kecamatan Banjarnegara mendapat Tambahan Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pokok OPD antara lain meliputi : Gaji, Air, Listrik , Telpon.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian yang sesuai target maupun yang melebihi target.

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu Indikator Kinerja Sasaran Kepala Perangkat Daerah meliputi , (1) Tersalurnya SPPT PBB dengan target 30.500 lembar dan terealisasi 30.500 lembar SPPT PBB kepada wajib pajak , (2) , Nilai SAKIP. Dengan nilai CC atau (58,30), dari target CC atau (55, 20) , (3) SKM, dengan nilai 84,30, dari target 83, 20 Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Faktor SDM yang mendukung
2. Faktor Anggaran yang memadai
3. Koordinasi Internal yang mendukung

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka (*jelaskan implikasi dari poin di atas*). Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran dalam rangka memepertahan capaian kinerja yang sudah baik dan untuk mendukung kinerja para pemangku kegiatan agar lebih baik lagi, dengan memperhatikan beberapa faktor , diantaranya:

1. Koordinasi masing – masing Kasi dan Kasubag
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan
3. Anggaran yang mendukung kegiatan
4. Regulasi yang jelas sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2....
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7 +9	(11)=10 /4
	Urusan Perencanaan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SKM	83,4		83,2	84,30		83,3		
		Nilai SAKIP	CC		B			CC		

		Prosentase SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak	1 laporan		87 %	87 %		1 laporan		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan	100 %		100 %	100 %		100 %		
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	8 dokumen		7 dokumen	7 dokumen		8 dokumen		
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen		7 dokumen	7 dokumen		8 dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan	100 %		100 %	100 %		100 %		

	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan	75 asn		77 asn	77 asn		75 asn		
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang terbayarkan	35 orang		24 orang -	24 orang		35 orang		
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun	14 dokumen		14 dokumen -	14 dokumen		14 dokumen		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		100 %	100 %		100 %		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	2 Paket		2 Paket	2 Paket		2 Paket		

	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	3 Paket		15 Paket	15 Paket		3 Paket		
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		100%	100%		100%		
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi	3 UNIT		1 tahun	1 tahun		3 tahun		
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang terbayarkan	19 orang		21 orang	21 orang		19 orang		

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %		100%	100%		100%		
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	<i>9 Unit</i>		<i>5 Unit</i>	<i>5 Unit</i>		<i>9 Unit</i>		
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan uala yang terpelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit		2 Unit		
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	1 unit		5 paket	5 paket		1 paket		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur								

	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit					2 UNIT		
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	2 unit					2 unit		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase pelaksanaa n urusan pemerintahan yang dilimpahka n kepada Camat	100 %		100 %	100 %		100 %		

	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha sesuai ketentuan	1.250 dokumen		120 dokumen	120 dokumen		1.245 dokumen		
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peizinan	Jumlah Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peizinan	3.950 dokumen		2 orang	2 orang		3.930 dokumen		
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 Laporan		30.500	30.500		1 laporan		
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 laporan					1 laporan		

	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah ada/ atau instansi yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah ada/ atau instansi yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								
	PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat								

	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 pokmas					10 pokmas		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	5 unit					5 unit		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibangun	10 pokmas					10 pokmas		
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Laporan yang dilaksanakan	9 kelurahan					9 kelurahan		

	Penangan covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen Penangan covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan	9					9		
	Penangan covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penangan covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan	9					9		
	Penangan covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen Penangan covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan	9					9		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyeleng- araan Urusan Pemerinta- han Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanak- an	100 %		100 %	100 %		100 %		
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaa- n tugas forkompimc- a di kecamatan	12 laporan		1 tahun	1 tahun		12 laporan		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi, rekomenda- si dan koordinasi pembinaan dan pengawasa- n pemerinta- han desa	100 %		100 %	100 %		100 %		

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 desa		4 desa	4 desa		4 desa		
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 desa		4 desa	4 desa		4 desa		
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan desa	4 desa		4 desa	4 desa		4 desa		
	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	4 desa		4 desa	4 desa		4 desa		

	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pembinaan sinkronisas i Perencanaa n Pembangun an Daerah dan Pembangun an Desa	4 desa		4 desa	4 desa		4 desa		
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pembinaan trantibum	4 desa		4 desa	4 desa		4 desa		
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah pembinaan penyusuna n program PMD	4 desa		4 desa	4 desa		4 desa		
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah koordinasi pendampin gan desa	4 desa		4 desa	4 desa		4 desa		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu tiga. Indikator. Dari tiga indikator tersebut, satu berstatus tercapai dan dua indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan.
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Melakukan Koordinasi Internal di tingkat OPD
2. Evaluasi terhadap hasil kinerja
3. Optimalisasi Kinerja dan pendampingan terhadap agar tercapai target kinerja.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikutini:

Tabel 2.....
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
	Nilai IKM		-	83,2	83,3	83,4	83,5	83,65	83,60	83,3	83,4		
	Nilai SAKIP			B	CC	CC	CC	CC		cc	CC		

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2023 mencakup urusan tersebut. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2023 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (baru sesuai cascading)
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam rangka menunjang Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja perekam data administrasi kependudukan yang secara langsung melayani masyarakat, dan tugas – tugas lain yang terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan.
4. Keterbatasan Kemampuan aparatur kelurahan dan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan terkait dengan implementasi DAU Tambahan Kelurahan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- 5 .Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam mengerjakan buku-buku Administrasi Desa (tidak sesuai Juknis).
6. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di kelurahan dan desa masing-masing.

7. Belum Optimalnya kesadaran aparaturn pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Rendahnya Mutu Pelayanan Publik
2. Rendahnya Tata Kelola Administrasi
3. Belum optimalnya Pendampingan Desa

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sehingga pelayanan kepada Masyarakat belum Optimal ,
2. Fasilitas yang belum terpenuhi diantaranya anggaran yang mendukung suatu kegiatan
3. Regulasi yang jelas sebagai dasar atau payung hukum sehingga suatu kegiatan dapat di laksanakan.
4. Kebijakan – kebijakan yang bersifat mendesak yang mengakibatkan peralihan anggaran ,sehingga rencana kerja tidak dapat tercapai sesuai ketentuan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2023 tanggal 12 juli 2023 tentang penetapan RKPD tahun 2024 Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan
2. Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan tugas yang di limpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Tabel 2
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.569.280.325	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.936.562.497	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Banjar negara	Jumlah gaji ASN yang terbayarkan	75 pegawai	9.029.274.025	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Banjar negara	Jumlah gaji ASN yang terbayarkan	75 Pegawai	8.525.326.299	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Banjar negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 dokumen	276.780.8000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Banjar negara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 dokumen	137.790.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Banjar negara	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Banjar negara	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 dokumen		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec, Banjar negara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	3.215.000			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.420.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7dokumen	3.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7dokumen		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Banjar negara	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor	3 paket	92.415.785	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Banjar negara	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor	3 paket	79.744.400	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Banjar negara	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	3 paket	579.497.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Banjar negara	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	3 paket	489.483.100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Banjar negara	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 unit	83.300.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Banjar negara	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	3 laporan	76.650.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Banjar negara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	19 orang	690.024.682	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Banjar negara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	19 orang	818.931.000	

	Pemeliharaan an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Banjar negara	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perijinanya	9 unit	58.822.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Banjar negara	Jumlah kendaraa n dinas Operasio nal atau lapangan yang di pelihara dan dibayark an pajak dan perijinan ya	9 unit	36.207.840	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Banjar negara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara dan di rehabilitasi	2 unit	333.747.180	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Banjar negara	Jumlah gedung kantor Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	2 unit	68.597.398	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Banjar negara	Jumlah saran dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	1 unit	58.930.850	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Banjar negara	Jumlah saran dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	1 unit	32.384.940	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					PengadaanBar ang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Pengadaan n Sarana dan Prasarana g Gedung Kantor	Kec. Banjar negara	Pengadaan n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 unit	88.777.500	Pengadaann Sarana dan Prasarana g Gedung Kantor	Kec. Banjar negara	Pengadaann Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 unit	37.029.500	
	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK					PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK					
	Pelaksanaa n Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan					

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Usaha	Kec. Banjar negara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Usaha sesuai ketentuan	1.245 dokumen		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Usaha	Kec. Banjar negara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Usaha sesuai ketentuan	1.245 dokumen		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Banjar negara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.930 dokumen	3.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Banjar negara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.930 dokumen		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Banjar negara	Jumlah laporan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 dokumen	290.486.400	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Banjar negara	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 dokumen	283.730.400	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Banjar negara	jumlah dokumen pelaksanaan tugas koordinasi kecamatan	12 dokumen	14.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Banjar negara	jumlah dokumen pelaksanaan tugas koordinasi kecamatan	1 dokumen		

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Banjar negara	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 desa		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Banjar negara	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 desa		

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Banjar negara	Jumlah Dokumen tang di Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 desa	25.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Banjar negara	Jumlah Dokumen tang di Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 desa	24.989.400	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Banjar negara	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 desa	3.650.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Banjar negara	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 desa		

	Fasilitasi Pengelolaa n Keuangan Desa dan Pendayagu naan Aset Desa	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dala, rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	4 desa	6.644.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dala, rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa	4 desa		

	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen yang di Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 desa	8.350.000	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen yang di Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 desa		

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 desa	33.200.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 desa		

	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	4 desa	5.970.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	4 desa		
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Banjar negara		4 desa	9.895.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Banjar negara	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forkompinca	4 desa		.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Banjar negara	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 pokmas	11.550.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Banjar negara	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 pokmas		

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Banjar negara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang di bangun	5 unit	4.391.713.053	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Banjar negara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang di bangun	5 unit	1.422.048.520	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Banjar negara	Jumlah Kelompok masyarakat yang di bina	10 pokmas	1.812.633.850	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Kec. Banjar negara	Jumlah Kelompok masyarakat yang di bina	10 pokmas	892.229.700	

	Evaluasi Kelurahan	Kec. Banjar negara	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	13.400.000		Evaluasi Kelurahan	Kec. Banjar negara	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan bina			
	Penangnan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen Penangnan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan			Penangnan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen Penangnan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan			
	Pembinaan Penangnan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen pembinaan Penangnan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan			Pembinaan Penangnan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen pembinaan Penangnan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan			

	Pengadaan pendukung pembinaan Penangnan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen pengadaan pendukung pembinaan Penangnan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan			Pengadaan pendukung pembinaan Penangnan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Kec. Banjar negara	Jumlah dokumen pengadaan pendukung pembinaan Penangnan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan			

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:
Memprioritaskan Kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

**DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PRIORITAS
KELURAHAN DAN DESA DI KECAMATAN BANJARNEGARA**

DATA SEBAGAIMANA TERLAMPIR

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	STATUS
1	10-01-2023	Mirah	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	jalan penghubung jalan desa dan jalan kabupaten rusak, transportasi masyarakat menjadi terhambat	RW 04 - RW 01 - RW 02, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Ampelsari	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
2	12-01-2023	Mirah	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	sebagian jalan kabupaten yang melewati Desa Ampelsari belum ada drainase, sebagian yang sudah ada sudah rusak, sehingga ketika hujan air meluap ke jalan	RW 03 - RW 04 - RW 05, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Ampelsari	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
3	12-01-2023	Mirah	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan Jembatan Milik Desa)	talud jembatan desa di dukuh silimpet sudah rusak perlu perbaikan	RT 05 RW 03, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Ampelsari	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

4	12-01-2023	Mirah	Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	ruas jalan di sekitar dan di atas jembatan kaliwijenana Desa Ampelsari sedikit ambles sehingga dikhawatirkan meruntuhkan jembatan	RW 03, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Ampelsari	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
5	12-01-2023	Mirah	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	sebagian rumah di Ampelsari belum memiliki jamban	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Ampelsari	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
6	12-01-2023	Mirah	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	sebagian jalan Kabupaten di Desa Ampelsari belum memiliki penerangan umum	RW 03 - RW 04 - RW 05, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Ampelsari	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
7	12-01-2023	Mirah	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	masih terdapat sejumlah rumah di Ampelsari yang belum layak huni	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Ampelsari	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
8	12-01-2023	Mirah	Penyediaan Alat Bantu disabilitas	beberapa penyandang disabilitas di Ampelsari belum memiliki alat bantu	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Ampelsari	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
9	16-01-2023	Sudarmaji, SH	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat	Dukuh Karanganyar Rt 01 Rw 11 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
10	16-01-2023	Sudarmaji, SH	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat	Dukuh Karanganyar Rt 02 Rw 11 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

11	16-01-2023	Sudarmaji, SH	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	Belum terpenuhinya air bersih masyarakat	Dukuh Sikasur Rt 03 Rw 06 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
12	16-01-2023	Sudarmaji, SH	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten	Banyaknya sampah yang belum dikelola dengan baik, yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat	Dukuh Mricasari Rt.02 Rw.04, Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
13	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Tersumbatnya Salauran Air	Dukuh Wanantangi RT.02 RW.05 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
14	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	Akses Masyarakat Terhambat/Jembatan penghubung	Dukuh Wanasari RT.03 RW. 01 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
15	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Jalan Rusak	Dukuh Wanasari RT.02 RW.03 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
16	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Jalan lingkungan Rusak/Rabat beton	Dukuh Jurang tengah RT.01 RW.08 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
17	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Rawan Longsor	Dukuh Sipete RT.03 RW.05 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

18	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Rawan longsor	Dukuh Pandak RT.01 RW.10 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara Dukuh Slimpet RT.02 RW.06 dan RT.03 RW.06 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
19	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten (Peningkatan Jalan, Pelebaran Jalan)	Akses jalan ke makam sulit	Dukuh Jurangtengah RT.02 RW.08 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
20	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Jalan Rusak/Pengaspalan jalan	Dukuh Jurangtengah RT.02 RW.08 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
21	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Jalan Rusak /Revitalisasi rabat beton	Dukuh Kodim -Dukuh Krajan Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
22	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Jalan gelap	PKD Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
23	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (Dana Kelurahan di Kec. Banjarnegara)	Halaman PKD Becek (Paving block)		Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

24	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	UMKM Perlu Pembinaan	Duku Jurangtengah RT.02 RW.08 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara Dukuh Winong	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
25	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	UMKM Perlu Pembinaan	RT.01 RW.09 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara Dukuh Winong	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
26	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	UMKM Perlu Pembinaan	RT.02 RW.09 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
27	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	UMKM Perlu Pembinaan	Dukuh Mricasari RT.02 RW.04 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
28	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Jalan rusak	Dukuh Winong RT.01 RW.09 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
29	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Penataan Lingkungan,Pembangunan Gapura	Dukuh Krajan Rw.07 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
30	17-01-2023	Sudarmaji, SH	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Penataan Lingkungan	Dukuh Krajan RW.07 Kelurahan Argasoka, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

31	12-01-2023	Tusro	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)	Masih minimnya sarana dan Prasarana TPQ di desa Cendana	Desa Cendana, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
32	12-01-2023	Tusro	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/ sumur bor))	Kurangnya sarana air bersih di dua dukuh	Dukuh jewura dan Sukawuwuh Desa Cendana, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
33	12-01-2023	Tusro	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Belum memadainya jalan usaha tani	Desa Cendana, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
34	12-01-2023	Tusro	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Adanya tebing di pemukiman yang rawan longsor	Dukuh Sukawuwuh, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

35	12-01-2023	Tusro	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Tidak adanya drainase sehingga membahayakan tebing di pemukiman rawan longsor	Dukuh Banjaran, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
36	12-01-2023	Tusro	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan desa)	Adanyanjembatan rusak ke dukuh Lintangtiba	Dukuh Lintang tiba, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
37	12-01-2023	Tusro	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan desa)	adanya jembatan rusak di dukuh Banjaran	Dukuh Banjaran, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
38	12-01-2023	Tusro	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Masih adanya rumah tidak layak huni	Desa Cendana, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

39	12-01-2023	Tusro	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rusaknya jaringan irigasi Desa	Desa Cendana, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
40	12-01-2023	Tusro	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kurangnya pembinaan Satlinmas	Desa Cendana, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
41	12-01-2023	Tusro	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Masih rendahnya sdm perangkat Desa	Desa Cendana, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
42	12-01-2023	Tusro	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK)	Adanya UMKM yang belum terlatih	Desa Cendana, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
43	12-01-2023	Tusro	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Masih rendahnya sdm Kader Kesehatan Desa	Desa Cendana, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
44	12-01-2023	Tusro	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)	Kurangnya sarana dan Prasarana TK PGRI 1 dan 2	TK PGRI 1 dan 2, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
45	12-01-2023	Tusro	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kurangnya sarana Gedung serba guna dan WC SDn 1	SDN 1 dan SDN 3 Cendana, Kab.	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra

			SD	dan SDN 3 Cendana	Banjarnegara				Bappeda
46	12-01-2023	Tusro	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Rusaknya Jaln Kabupaten ruas jalan Pringamba-Sokayasa	Dukuh Jewura-Dukuh sukawuwuh, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
47	12-01-2023	Tusro	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Kurangnya sarana dan Prasarana Jalan Ruas Jalan Kelapasawit-Sokayasa	Dukuh Lintang tiba-Kelapasawit, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
48	13-01-2023	Tusro	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Adanya jalan Desa yang rusak	Dukuh Banjaran, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
49	13-01-2023	Tusro	Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDes	Masih belum memadai SDM pegawai BUMDes	Desa Cendana, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
50	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Pembangunan Puskesmas	lahan terbatas (sempit), tidak ada pembuangan limbah medis, ruang pelayanan bercampur dengan ruang lain, tidak ada area parkir, terlalu dekat dengan jalan raya ramai.	RT 3 RW 1 Kelurahan Karangtengah , Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
51	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal	belum bebas ODF (Open Defecation Fee)	Kelurahan Karangtengah , Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
52	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pemugaran/ pembangunan rumah tidak layak huni warga desa)	masih terdapat rumah dengan kondisi tidak layak huni, seperti langit langit tidak ada, ventilasi tidak tersedia, belum memiliki jamban.	Kelurahan Karangtengah, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
53	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	saluran air menggerus badan jalan (bawah jalan berongga) permukaan jalan turun	RT 4 dan 7 RW 3 Kelurahan Karangtengah, Kab.	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

					Banjarnegara				
54	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	tanah jalan ruas kabupaten tanahnya berpotensi longsor	RT 2 RW 1 Kelurahan Karangtengah, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
55	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Penyediaan Alat Bantu disabilitas	terdapat data lansia lumpuh, cacat, dan berkekurangan	RT 3, 4 RW 1 , Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
56	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	Sumber air di bawah, sumur terlalu dalam, dan akses air tidak merata	RT 1,2,3 RW 3, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
57	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan Kec. Banjarnegara)	Revitalisasi PAUD sebagai upaya memberdayakan pendidikan anak usia dini	RT 7 RW 3, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
58	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota)	terdapat kesenian yang berakar dari kearifan lokal masyarakat dan belum mendapatkan perhatian secara optimal	RT 3 RW 1 dan RT 7 RW 3, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
59	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Pelatihan Berbasis Masyarakat	pelatihan kerja bagi warga yang belum memiliki pekerjaan di usia produktif	Kelurahan, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
60	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Pembinaan kemampuan teknologi industri	terdapat beberapa home industri warga yang belum terbina dengan baik	RT 5 RW 1 ; RT 1 RW 3, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
61	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	pelatihan bagi pemuda sebagai upaya pencegahan dan mitigasi bencana	Kelurahan, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

62	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	potensi remaja yang belum mendapatkan pelatihan, termasuk didalamnya adalah pembinaan BKB, BKR, dan BKL	kelurahan, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
63	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	lembaga kelurahan merupakan elemen dasar dalam membantu pembangunan potensi manusia agar lebih kreatif, inovatif dan mandiri	Kelurahan, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
64	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	kurang optimal dalam memfasilitasi Tim Penggerak PKK serta Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	kelurahan, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
65	17-01-2023	Syariif Ali, SP	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan Kec. Banjarnegara)	pembangunan jalan penunjang hasil pertanian	RT 1 RW 1, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
66	18-01-2023	Sumargo, SE	Rehab/ pembangunan gedung pemerintah (Kecamatan/Kelurahan)	Belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih menempati gedung eks. sekolah Dasar	Kelurahan Krandegan Jl. Ki Jagapati Km 1, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Krandegan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
67	18-01-2023	Sumargo, SE	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (Dana Kelurahan di Kec. Banjarnegara)	Jalan yang ada sudah rusak	RW. 009 , Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Krandegan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

68	18-01-2023	Sumargo, SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan rusak	Rw.009, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Krandegan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
69	19-01-2023	Sumargo, SE	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	tidak memiliki rumah yang layak	Rt.02 Rw.09, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Krandegan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
70	19-01-2023	Sumargo, SE	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK)	banyak pelaku usaha baru yang memerlukan manajemen usaha	kelurahan Krandegan, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Krandegan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
71	10-01-2023	Achmad Bowo Lestiono, S.Sos	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	Kondisi Pemenuhan air bersih diwilayah RT 04 RW 04 Kelurahan Kutabanjarnegara untuk warga susah mendapat air bersih terutama dimusim kemarau, untuk itu diupayakan pembangunan SAB yang bisa menampung air dari sumber mata air yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat.	RT 004 RW 004, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Kutabanjarnegara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
72	10-01-2023	Achmad Bowo Lestiono, S.Sos	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	Pemenuhan kebutuhan air bersih diwilayah Kelurahan Kutabanjarnegara RT 05 RW 08 sangat diperlukan karena warga kesulitan air bersih apabila dalam musim kemarau dan sering wilayah tersebut minta bantuan dropping air bersih dari PDAM	RT 005 RW 008, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Kutabanjarnegara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

73	10-01-2023	Achmad Bowo Lestiono, S.Sos	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (Dana Kelurahan di Kec. Banjarnegara)	Belum ada pagar pembatas/Pagar BRC dikomplek Pemakaman Umum Gotong Royong yang berbatasan dengan tanah pekarangan milik warga sekitar pemakaman.	RT 002 RW 004, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Kutabanjarne gara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
74	16-01-2023	Sarwosri , SE	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belum adanya peralatan pemeriksaan kesehatan warga	RT 006 RW 009, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
75	16-01-2023	Sarwosri , SE	Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan	masyarakat ingin diadakan pelatihan pengolahan makanan ringan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jl.S Parman No16, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
76	16-01-2023	Sarwosri , SE	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK)	diperlukan pelatihan peningkatan kewirausahaan tempurung kelapa untuk pengembangannya karena sudah ada embrionya	Jl. S.Parman No. 16, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
77	16-01-2023	Sarwosri , SE	Rehab/ pembangunan gedung pemerintah (Kecamatan/Kelurahan)	rangka atap sudah rapuh/tua sangat membahayakan, bangunan belum representatif seperti belum tersedia toilet/kamar mandi pelayanan yang pisah gender	Jl. S Parman No.16, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

78	16-01-2023	Sarwosri , SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pemeliharaan sarana/prasarana pos pelayanan terpadu/pondok bersalin desa/Pos Kesehatan Desa)	belum tersedianya sarpras (mebelair),dan untuk operasional posyandu remaja, posbindu, desa siaga	Jl.S Parman No. 16, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
79	17-01-2023	Sarwosri , SE	Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat	masih rendahnya populasi dan produksi ternak lokal yang berkualitas mendorong masyarakat di kelurahan parakancangah untuk membuka peternakan kambing untuk menambah pendapatan ekonomi masyarakat	RT 001, RT 002 RW 007 , Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
80	17-01-2023	Sarwosri , SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	kondisi drainase yang sekarang sudah bocor sampai ke sumur warga sehingga mencemari sumber air bersih warga	RT 001 RW 002, RT 005 RW 011, RT 002 RW 010, RT 002 RW 007, RT 001 RW 004, RT 002 RW 005, RT 003 RW 006, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
81	17-01-2023	Sarwosri , SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan prasarana jalan milik desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert,	kondisi drainase masih terbuka sehingga banyak sampah yang masuk, agar drainase lebih bersih butuh perbaikan drainase yang tertutup agar lebih bersih dan memperlebar jalan	Jl Garuda RT 002 RW 003, RT 001 RW 010, Jl. Kepodang Rt 002 RW 003, RT 010 RW 011, RT 001 RW 006, RT 001 RW 001, jl Gagak 3 Rt	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

			drainase, prasarana jalan lainnya))		002 RW 009, Kab. Banjarnegara				
82	18-01-2023	Sarwosri , SE	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	Belum tersedia sarana air bersih	RT 010 RW 011, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
83	18-01-2023	Sarwosri , SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	perlu perbaikan saluran air bersih peralon dan pembuatan penampung air bersih	RT 002 RW 001, RT 008 RW 011, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
84	18-01-2023	Sarwosri , SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/ sumur bor))	belum tersedianya sumur resapan air hujan	RT 002 RW 002, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
85	18-01-2023	Sarwosri , SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/	belum tersedianya sumur bor di Masjid darul Falah	RT 002 RW 008, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

			sumur bor))						
86	18-01-2023	Sarwosri , SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	belum terbangunnya gapura	jl. Sriti RT 001 RW 004, RT 005 RW 011, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
87	18-01-2023	Sarwosri , SE	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pemeliharaan sarana/prasarana pos pelayanan terpadu/pondok bersalin desa/Pos Kesehatan Desa)	belum tersedianya lampu penerangan jalan	RT 006 RW 009, RT 010 RW 011, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
88	18-01-2023	Sarwosri , SE	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal	minimnya peralatan pemeriksaan kegiatan di Posyandu	RT 002 RW 008, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
89	18-01-2023	Sarwosri , SE	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal	belum tersedianya tempat pembuangan limbah rumah tangga	RT 002 RW 003, RT 010 RW 011, RT 002 RW 005, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

90	18-01-2023	Sarwosri , SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/ pemukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain)) Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)	belum adanya pembaruan tong sampah, bak sampah, dam gerobak sampah multifungsi	RT 001 RW 010, RT 001 RW 004, RT 006 RW 009, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
91	18-01-2023	Sarwosri , SE	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Belum tersedianya bangunan TPQ	RT 006 RW 010, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
92	18-01-2023	Sarwosri , SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-	belum tersedianya perlengkapan olah raga sepak bola	RT 006 RW 009, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
93	18-01-2023	Sarwosri , SE		belum dibangunnya senderan irigasi	RT 001 RW 011, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

			gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))						
94	18-01-2023	Sarwosri , SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	kondisi jalan lingkungan yang sudah rusak	RT 001,RW 007, RT 007 RW 011, RT 004 RW 011, RT 002 RW 007, RT 003 RW 005, RT 001 RW 011, RT 001 RW 010, RT 002 RW 003, RT 001 RW 006, RT 001 RW 001, RT 003 RW 001, RT 001 RW 009, RT 002 RW 001, RT 002 RW 009, RT 006 RW 009, RT 002 RW 011, RT 002 RW 005, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
95	18-01-2023	Sarwosri , SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	kondisi jalan sudah rusak	RT 003 RW 006, RT 001 RW 008, RT 004 RW 001, RT 002 RW 06, RT 002 RW 010, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

96	18-01-2023	Sarwosri , SE	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	belum terbangunya poskamling dan beberapa kondisi pos kamling yang sudah tidak layak	RT 002 RW 007, RT 002 RW 010, RT 001 RW 010, RT 002 RW 004 , Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancang gah	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
97	19-01-2023	Agus Sugandi, S.Sos	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (Dana Kelurahan di Kec. Banjarnegara)	Pembangunan Talud (pengaman pemukiman di RT 01 RW 03 Kelurahan Semampir)	KELURAHAN SEMAMPIR RT 01 RW 03, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semampir	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
98	19-01-2023	Agus Sugandi, S.Sos	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (Dana Kelurahan di Kec. Banjarnegara)	Pembuatan atau penegcoran jalan lingkungan di RT 04 RW 03 (Jalan sudah rusak)	Kelurahan Semampir RT 04 RW 03, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semampir	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
99	19-01-2023	Agus Sugandi, S.Sos	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (Dana Kelurahan di Kec. Banjarnegara)	Kelanjutan pembuatan SAB (Airnya sudah sampai toren tetapi berhenti)	Kelurahan Semampir RT 03 RW 02, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semampir	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
100	19-01-2023	Agus Sugandi, S.Sos	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (Dana Kelurahan di Kec. Banjarnegara)	Pembangunan jalan sebelah utara lapangan (karena jalan sudah rusak)	Kelurahan Semampir RT 04 RW 01, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semampir	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
101	19-01-2023	Agus Sugandi, S.Sos	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (Dana Kelurahan di Kec. Banjarnegara)	Pembuantan Pamsimas di Kelurahan Semampir	Kelurahan Semampir, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semampir	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
102	19-01-2023	Agus Sugandi, S.Sos	Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan	Pelatihan pengolahan makanan ringan dari bahan lokal KWT Kelurahan Semampir (30 orang)	Kelurahan Semampir, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semampir	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
103	19-01-2023	Agus Sugandi, S.Sos	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (Dana Kelurahan di	Pembangunan RTLH sebanyak 23 unit	Kelurahan Semampir, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semampir	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

			Kec. Banjarnegara)						
104	17-01-2023	Agung Dwi Antoko, S.Sos	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (Dana Kelurahan di Kec. Banjarnegara)	Belum terpenuhinya jaringan air bersih	RW 04, RW 06 Kelurahan Semarang, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semarang	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
105	17-01-2023	Agung Dwi Antoko, S.Sos	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan Kec. Banjarnegara)	Sarpras lingkungan yang perlu perbaikan (Drainase)	RW.03,RW 06,RW 04 Kelurahan Semarang, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semarang	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
106	17-01-2023	Agung Dwi Antoko, S.Sos	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan Kec. Banjarnegara)	Penerangan jalan yang belum memadai	RW 01 RW 02 RW 03 Kelurahan Semarang, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semarang	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
107	17-01-2023	Agung Dwi Antoko, S.Sos	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan Kec. Banjarnegara)	Perlunya pelebaran jalan (Penutupan Drainase)	RW 04 Kelurahan Semarang, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semarang	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
108	17-01-2023	Agung Dwi Antoko, S.Sos	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan Kec. Banjarnegara)	Jalan pemukiman yang perlu perbaikan (Jalan Pemukiman)	RW 01 RW 02 RW 03 RW 04 RW 06 KELURAHAN SEMARANG, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semarang	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
109	17-01-2023	Agung Dwi Antoko, S.Sos	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan Kec. Banjarnegara)	Perlunya talud jalan pemukiman	RW 03 RW 04 KELURAHAN SEMARANG, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semarang	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
110	17-01-2023	Agung Dwi Antoko, S.Sos	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan Kec. Banjarnegara)	Belum memadainya sanitasi di masyarakat (MCK KOMUNAL)	RW 03 RW 06 KELURAHAN SEMARANG, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semarang	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan

111	17-01-2023	Agung Dwi Antoko, S.Sos	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan Kec. Banjarnegara)	Perlunya fasilitasi PKK, LPMK, Karang Taruna, Posyandu, Kader, Puskesmas, Linmas	Kelurahan Semarang, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semarang	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
112	17-01-2023	Agung Dwi Antoko, S.Sos	Rehab/ pembangunan gedung pemerintah (Kecamatan/Kelurahan)	Perlunya aula gedung serba guna kelurahan	Kelurahan Semarang, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semarang	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
113	17-01-2023	Agung Dwi Antoko, S.Sos	Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	Perlunya Pembangunan Jembatan antar wilayah kelurahan	Kelurahan Semarang, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semarang	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
114	17-01-2023	Agung Dwi Antoko, S.Sos	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan Kec. Banjarnegara)	Perlunya peningkatan kapasitas masyarakat	Kelurahan Semarang, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Semarang	Kabupaten / Kota	Pengajuan Usulan
115	19-01-2023	TRI WAHYANI	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kurangnya pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan bencana	Kel Sokanandi, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokanandi	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
124	19-01-2023	TRI WAHYANI	Penanganan Traffick Light dan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Sering terjadi kecelakaan karena belum ada rambu lalu lintas	Pertigaan SKB dan Pertigaan Gumingsir Sokanandi, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokanandi	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
125	19-01-2023	TRI WAHYANI	Rehab/ pembangunan gedung pemerintah (Kecamatan/Kelurahan)	Belum tersedianya fasilitas/gedung sarana dan prasarana olah raga	Sokanandi, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokanandi	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
126	19-01-2023	TRI WAHYANI	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Belum adanya akses jalan yang memadai.	Blok Banjaran, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokanandi	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
127	19-01-2023	TRI WAHYANI	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Masih adanya rumah yang tidak layak huni.	Kel. Sokanandi, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokanandi	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
128	19-01-2023	TRI WAHYANI	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Ada titik lokasi masih membutuhkan penerangan jalan	Kel Sokanandi, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokanandi	Kabupaten / Kota	Dibatalkan

129	19-01-2023	TRI WAHYANI	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Masih ada titik lokasi yang membutuhkan penerangan jalan	Sokanandi, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokanandi	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
130	19-01-2023	TRI WAHYANI	Peningkatan Jaringan Irigasi Kabupaten	kondisi jaringan irigasi sudah rusak tergerus air	Blok Munggang, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokanandi	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
131	19-01-2023	TRI WAHYANI	Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	SEbagai penghubung antar desa (Kel.Sokanandi - Ds. Sokayasa)	Sokanandi, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokanandi	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
132	19-01-2023	TRI WAHYANI	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Perlunya pelatihan kewirausahaan untuk peningkatan ekonomi produktif	Sokanandi, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokanandi	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
133	19-01-2023	TRI WAHYANI	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pembentukan atlet berprestasi	Sokanandi, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokanandi	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
134	19-01-2023	TRI WAHYANI	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Perlu pelatihan kewirausahaan untuk peningkatan ekonomi produktif	Sokanandi, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokanandi	Kabupaten / Kota	Dibatalkan
135	19-01-2023	TRI WAHYANI	Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	Kondisi jalan yang masih makadam dan jembatan yang sudah rusak	Sokanandi-Karang Lewas, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokanandi	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
136	10-01-2023	Marjono	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Sepanjang Jalan Kabupaten yang melintasi Dukuh Pedali (Kelurahan Parakancangah - Desa Sokayasa), belum memiliki sistem drainase/gorong-gorong yang memadai.	Dukuh Pedali RW.01, Desa Sokayasa, , Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokayasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
137	10-01-2023	Marjono	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Sepanjang Jalan Kabupaten yang melintasi Dukuh Pucung (Kelurahan Sokanandi - Desa Sokayasa -	RW.03 s/d RW.02, Desa Sokayasa, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokayasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

				Desa Tlagawera), belum memiliki sistem drainase/gorong-gorong yang memadai.					
138	10-01-2023	Marjono	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Sepanjang Jalan Kabupaten yang melintasi Dukuh Sokayasa (Depan Kantor Kepala Desa Sokayasa), belum memiliki sistem drainase/gorong-gorong yang memadai.	RW.03 s/d RW.04, Desa Sokayasa, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokayasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
139	10-01-2023	Marjono	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Sepanjang Jalan Kabupaten yang melintasi Dukuh Kepongkok (Kelurahan Sokaandi - Desa Sokayasa - Desa Cendana), belum memiliki sistem drainase/gorong-gorong yang memadai.	RW.05, Desa Sokayasa, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokayasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
140	10-01-2023	Marjono	Fasilitas Penyelesaian Tanah Kas Desa	Tanah Bengkok dan Tanah Kas Desa belum memiliki Sertivikat.	Desa Sokayasa, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokayasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
141	10-01-2023	Marjono	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pemugaran/ pembangunan rumah tidak layak huni warga desa)	Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sokayasa membutuhkan bantuan pemugaran selain dari Dana Desa, karena alokasi anggaran yang terbatas.	Desa Sokayasa, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokayasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
142	10-01-2023	Marjono	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:	Jalan Desa Sokayasa di RW.02 s/d RW.03 (depan makam) Memerlukan pemeliharaan, karena sudah	Rw.02 s/d Rw.03, Desa Sokayasa., Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokayasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

			Pemeliharaan jalan desa)	rusak dan berlubang.					
143	10-01-2023	Marjono	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa)	Kurangnya buku-buku yang tersedia di Perpustakaan Milik Desa.	Desa Sokayasa, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokayasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
144	11-01-2023	Marjono	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan alternatif penghubung Desa Sokayasa dengan Kelurahan Sokaandi belum dibangun, sehingga perlu ada pembangunan.	RW.05, Desa Sokayasa, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Sokayasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
145	16-01-2023	Gunawan Wahyu Sudrajat	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	belum semua memiliki akses ajmban sehat	Desa Tlagawera, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Tlagawera	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
146	16-01-2023	Gunawan Wahyu Sudrajat	Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	jembatan sempit dan berbahaya	RT 1 RW 1, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Tlagawera	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
147	16-01-2023	Gunawan Wahyu Sudrajat	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	drainase rusak	RT 2 RW 2, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Tlagawera	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

148	16-01-2023	Gunawan Wahyu Sudrajat	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	jalan kabupaten belum ada penerangan jalan	RW 1 - RW 2, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Tlagawera	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
149	16-01-2023	Gunawan Wahyu Sudrajat	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	jalan rusak	Batur RT 1 RW 3, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Tlagawera	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
150	17-01-2023	Gunawan Wahyu Sudrajat	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	kekeringan saat kemarau	Sokawera RT 2 RW 3, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Tlagawera	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
151	17-01-2023	Gunawan Wahyu Sudrajat	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	kekeringan saat kemarau	Wirasari, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Tlagawera	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

152	17-01-2023	Gunawan Wahyu Sudrajat	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	belum ODF	Tlagawera, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Tlagawera	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
153	12-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan Kec. Banjarnegara)	Banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan warga yang membutuhkan pendanaan dalam penyelenggaraannya	Kelurahan Wangon, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
154	12-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pemukiman di wilayah perkotaan yang semakin padat dengan bangunan, berpotensi menimbulkan kebakaran, baik yang disebabkan karena pembakaran sampah yang tidak terkendali, korsleting listrik dan keteledoran dalam penggunaan kompor. Untuk itu perlu adanya sistem/jaringan komunikasi dalam rangka mitigasi maupun penanggulangan bila terjadi kebakaran	kelurahan wangon, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
155	12-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Penyediaan Alat Bantu disabilitas	Penyandang disabilitas usia sekolah mengalami kesulitan dalam transportasi dari rumah menuju sekolah	RT. 01 RW.06, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

156	12-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Ada 3 rumah di wilayah RT. 01 RW.07 yang belum layak dikategorikan rumah sehat	RT.01 RW. 07, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
157	12-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK)	Usaha kecil sudah cukup banyak di lingkungan kelurahan wangon, mulai dari makanan kecil, perbengkelan, peternakan, perikanan, pertanian, namun pemilik usaha masih lemah dalam hal pengelolaan keuangan maupun pemasaran produk	kelurahan wangon, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
158	12-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Terdapat beberapa lahan kosong di tepi jalan kabupaten yang belum ada penguatan tebing/dinding lahan dan ini berpotensi memberikan dampak kerusakan jalan bila diabaikan terus menerus.	RT.01 RW. 03 (depan kantor Kelurahan). Foto 1 dan RT. 01 RW.05 (Selatan SD N 2 Wangon) foto 2, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
159	12-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (Dana Kelurahan di Kec. Banjarnegara)	Banyak pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan warga yang membutuhkan pendanaan dalam penyelenggaraannya	Kelurahan Wangon, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

160	13-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Terdapat tebing pada ruas jalan kabupaten (Jalan Selamanik) sepanjang 40 -60 meter yang berpotensi longsor dan menutup akses jalan kabupaten dari arah Barat bila tidak dilakukan pembangunan talud, di samping juga akan mengakibatkan bencana untuk pemukiman yang berada di atasnya (foto 1&2) dan 1 (satu) tebing pada ruas jalan lingkar kabupaten sepanjang 30 - 50 meter yang amblas/longsor karena tingginya curah hujan (foto 3)	RT. 01/01 sekitar Rumah Ibu Kusrowiyah dan RT.02/04 , Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
161	13-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Peningkatan Jaringan Irigasi Kabupaten	Pemeliharaan jaringan irigasi tidak sebatas memperbaiki bangunan, namun bisa dilakukan dengan memperlancar aliran air di jaringan yang sering kali terhambat karena ada timbunan sampah. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menambah keindahan sekitar jaringan, misalnya dengan membuat jalur tanaman hias di sepanjang jalan inspeksi irigasi. Karena bila lingkungan sekitar irigasi	Irigasi sepanjang RW.05 - RW. 06, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

162	13-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	bersih, maka warga yang akan membuang sampah ke saluran irigasi akan berpikir ulang untuk melakukannya. ada saluran drainase jalan kabupaten yang tertutup rapat oleh beton perumahan warga, sehingga curah hujan dengan intensitas tinggi akan membuat genangan air dan/atau menggerus lapisan aspal jalan yang akan berakibat pada kerusakan jalan. Untuk itu dibutuhkan gorong-gorong agar air dapat mengalir sebagaimana mestinya.	RT. 01/03, depan Kantor Kelurahan Wangon, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
163	13-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Beberapa titik dinding drainase sepanjang jalan kabupaten di Kelurahan Wangon sudah rusak dan mulai merusak badan jalan, terutama yang berbatasan dengan lahan sawah lestari sehingga perlu penanganan segera untuk menghindari	Jalan Kabupaten yang melalui Kelurahan Wangon, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

164	13-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Pembangunan trotoar	dampak kerusakan yang lebih luas Terdapat ruas Jalan Kabupaten disekitar kantor kelurahan wangon yang tidak mempunyai trotoar. Sejatinya trotoar ini sangat dibutuhkan oleh warga/siswa sebagai pengaman dalam beraktifitas jalan kaki (pedestrian) tanpa khawatir tertabrak kendaraan bermotor yang melintas	sekitar Kantor Kelurahan Wangon (RT.01, RT.02/ RW. 03), Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
165	16-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	Pentingnya pemenuhan kebutuhan air bersih terutama pada musim kemarau Peningkatan jumlah penduduk setara dengan peningkatan timbulan sampah. Untuk itu perlu adanya pemilahan sampah dari sumber (rumah tangga) dengan memfasilitasi pemberian tempat sampah terpilah	RT. 02/05, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
166	16-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pentingnya pemenuhan kebutuhan air bersih terutama pada musim kemarau Peningkatan jumlah penduduk setara dengan peningkatan timbulan sampah. Untuk itu perlu adanya pemilahan sampah dari sumber (rumah tangga) dengan memfasilitasi pemberian tempat sampah terpilah	RT. 02/07, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

167	16-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Peningkatan Jaringan Irigasi Kabupaten	Dalam rangka meningkatkan produksi pangan, terutama padi sawah dan perikanan air tawar, perluasan jaringan irigasi tentu menjadi hal yang utama, sehingga warga bisa mandiri, memenuhi kebutuhan bahan pangan sendiri. Jalan Usaha Tani juga menjadi sarana yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi padi dan perikanan air tawar.	Blok Sawah Ex. Bengkok (Lahan sawah lelang aset) di RT. 01/01 dan Blok Sawah di RT. 01/03, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
168	16-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Sebagai sarana lalu lintas kendaraan utk pengangkutan traktor, pupuk, pengangkutan hasil panen dsb.	Blok Sawah Ex. Bengkok, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
169	16-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan	Banyak warga usia produktif namun memiliki kapasitas terbatas untuk mengembangkan kemampuannya. Untuk itu perlu adanya pelibatan dalam pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas. Salah satunya dilibatkan dalam pelatihan pengolahan makanan ringan. Sasarannya alah warga usia produktif dan/atau UKM yang sudah ada untuk lebih meningkatkan nilai tambah	Kelurahan Wangon, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

				produk (Value Added)					
170	16-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Beberapa Kelompok Pemuda membutuhkan Peralatan/Perlengkapan Tek Tek untuk meningkatkan kemampuan seni musik disamping untuk mengajak para pemuda punya rasa memiliki terhadap Budaya Nusantara	RT. 01/02 dan RT.01/03, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
171	16-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Beberapa potensi olahraga di lingkungan warga (pemuda/karang taruna) membutuhkan sarana dan prasarana pendukung dengan memfasilitasi meja ping pong dan bola sepak sekaligus meningkatkan kemampuan mereka	RT.02/07, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
172	18-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	untuk aksesibilitas yang lebih dekat, warga membutuhkan pembangunan jembatan di atas saluran irigasi.	RT.01/07, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

173	18-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dalam rangka mendukung kelurahan layak anak, salah satu rencana kelurahan adalah merevitalisasi lapangan sepak bola dan lingkungan sekitar lapangan untuk menjadi sarana dan prasarana interaksi antar warga, menjadikannya sebagai pusat rekreasi, olah raga dan pengenalan lingkungan bagi anak usia dini	RT. 01/03, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
174	19-01-2023	DEBBY VIRSANITA S.Hut	Perluasan Akses sanitasi melalui jambanisasi	ODF Kelurahan Wangon baru 96%, blm bisa mencapai 100% karena terdapat 1 lokasi pemukiman yang membutuhkan penanganan teknis khusus dan membutuhkan biaya besar untuk pembangunan jamban.	RW. 04, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Wangon	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL SEMENTARA				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Penegakan hukum nasional;
 - c. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
 - d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, untuk kecamatan adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 Kegiatan dan 12 sub kegiatan.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Dengan 3 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

d. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 4 sub kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. Evaluasi Kelurahan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dengan 8 sub kegiatan yaitu : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa , Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa , Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa , Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa , Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Banjarnegara pada kurun waktu 4 (Empat) tahun kedepan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran-sasaran yang lebih terukur, spesifik dan rasional. Perumusan tujuan dan sasaran memperhatikan indikator-indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan, yang mendukung Tujuan Rencana Perangkat Berdasarkan Rencana tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik;
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran tersebut Kecamatan Banjarnegara dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Daerah mendukung Visi dan Misi ke Misi Pemerintah Daerah, sedangkan Visi Pemerintahan Daerah adalah ***Banjarnegara Maja Berbasis Pertanian***. Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Banjarnegara sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari Empat misi tersebut adalah **Misi Ketiga** yaitu :

Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governmend) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.

Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Kemerdekaan berpendapat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia Pasal 28 dan Pasal 28 pasal 3 , memperkuat komitmen untuk menciptakan *good and clean government*. Fokus peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, diharapkan pelayanan dan kinerja yang baik mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Adapun sasaran dalam misi ini meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public untuk urusan kewilayahan;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan;

Kecamatan Banjarnegara menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjarnegara dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2023-2026.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan

Berikut ini Usulan Kegiatan Tahun 2024 dan Prediksi Tahun 2025 Kecamatan dan Kelurahan Banjarnegara

Format rincian terlampir

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di

Sebagai berikut

(mengacu pada bab 5 RKPD)

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026;
- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- 4) Ketersediaan prana dalam perencanaan pengembangan kawasan/wilayah;
- 5) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja(Renja) Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Banjarnegara serta penyusunan

- perencanaan anggaran(*budgeting*);
- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program yang terdiri 1program pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, 1 program Urusan Keuangan dan 4 program pada Urusan Kewilayahan;
 - 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 sebanyak 10 kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan.,2 Kegiatan pada Program Pelayanan Publik, 1 Kegiatan Pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dan 1 Kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa. Dan 1 Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Umum.

Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 secara total sebesar Rp. **12.936.562.497** yang semuanya bersumber dari dana APBD Kabupaten Banjarnegara

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 2023

CAMAT BANJARNEGARA,

SONHAJI, S.IP, S.Sos, M.Kes)
Pembina Tk I
NIP. 19660626 198702 1 002

Kode				Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Simber Dana (Rp)		
								Out Put Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN							10.473.515.387				9.558.000.000	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksanya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota						10.273.706.387				9.212.000.000	
7	01	01															
					Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksanya kegiatan perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.465.000				8.500.000	
7	01	01	2'01														
					Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusnya dokumen perangkatat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	3.250.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Penjilidan termasuk Kelurahan		4.000.000
7	01	01	2'01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kabupaten Banjarnegara	100	Dokumen	7	3.215.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Rapat PEP, Pembinaan internal dan Kelurahan		4.500.000
7	01	01	2'02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanyanta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9.102.074.025			8.369.500.000	
7	01	01	2'02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77	9.029.274.025	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	77 ASN		8.100.000.000
7	01	01	2'02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	24	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	24	69.300.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Honor Pengelola Keuangan (tidak termasuk kelurahan)		265.000.000
7	01	01	2'02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulana/ Tri Bulan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulana/ Tri Bulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	8	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semes teran SKPD	14	3.500.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Laporan POK, Laporan Barang, Th. 2023 terdampak refokusing		4.500.000
																	-
7	01	01	2'06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah							199.347.900				194.000.000
7	01	01	2'06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	64.347.900	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Alat kebersihan Kantor, TA. 2023		66.000.000
7	01	01	2'06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	135.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Makan minum, ATK, Cetak, Honor PPTK dan Pembantu PPTK (kegiatan kecamatan); Pengadaan Layur/ Bendera; Natura; Sewa Tenda, mamin Paskibra		128.000.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum			-
7	01	01	2'08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							594.124.682				601.000.000

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	19.200.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Listrik, Internet, Air,		21.000.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19	574.924.682	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	PTT dan THL termasuk Kelurahan; 3 upah tenaga kebersihan kecamatan		580.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							371.694.780				39.000.000
7	01	01	2.05	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	16.886.400	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	pajak service kendaraan, 1 Mobil, 8 motor (kecamatan)		18.000.000
7	01	01	2.05	02	Pemeliharaan/Rehabilit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya /Rehabilit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	318.448.380	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Pengecatan, dandan bocor, lampu, alat listrik, usulan pembangunan pagar 50 jt		21.000.000
7	01	01	2.05	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pendaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		11.360.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Perbaikan AC, komputer, (2023 terdampak refocusing)		-
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		25.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	1 Layar Proyektor, usulan bertambah 20 jt untuk; 1 laptop, 1 PC all in one		-
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								79.700.000				203.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat							59.700.000				203.000.000
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	200	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	200	-	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum			-
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		3.600.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum			5.000.000

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		56.100.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum			198.000.000
					Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Parasaran Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Parasaran Pelayanan Umum							20.000.000				
					Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihaaran Saran dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihaaran Saran dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihaaran Saran dan Prasarana Pelayanan Umum	13	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihaaran Saran dan Prasarana Pelayanan Umum		20.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Update pendataan Kondisi Infrastruktur kewilayahan		21.000.000
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Masyarakat Desa dan Kelurahan							13.400.000				13.400.000
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							13.400.000				
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10		Dana Tranfer - Umum Dana Alaokasi Umum			10.000.000
					Pembanguann Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlakanya Pembanguann Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di bangun	9		Dana Tranfer - Umum Dana Alaokasi Umum			
					Pembanguann Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pembanguann Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9		Dana Tranfer - Umum Dana Alaokasi Umum			
					Evaluasi Kelurahan	TerlaksananyaEvaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi di Kelurahan	9	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Laporan Evaluasi di Kelurahan	9	13.400.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Evaluasi : pelaksana Kasi PMD		14.400.000
					Penanganan covid 19 tingkat desa dan kelurahan	Terlaksananya Penanganan covid 19 tingkat desa dan kelurahan	Jumlah dokumen Penanganan covid 19 tingkat desa dan kelurahan	9	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah dokumen Penanganan covid 19 tingkat desa dan kelurahan	9		Dana Tranfer - Umum Dana Alaokasi Umum			
					Pembinaan Penanganan covid 19 tingkat desa dan kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Penanganan covid 19 tingkat desa dan kelurahan	Jumlah dokumenPembinaan Penanganan covid 19 tingkat desa dan kelurahan	9	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah dokumenPembinaan Penanganan covid 19 tingkat desa dan kelurahan	9		Dana Tranfer - Umum Dana Alaokasi Umum			
					Pengadaan Pendukung Pembinaan Penanganan covid 19 tingkat desa dan kelurahan	Terlaksannya Pengadaan Pendukung Pembinaan Penanganan covid 19 tingkat desa dan kelurahan	Jumlah dokumenPembinaan Penanganan covid 19 tingkat desa dan kelurahan	9	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah dokumenPembinaan Penanganan covid 19 tingkat desa dan kelurahan	9		Dana Tranfer - Umum Dana Alaokasi Umum			

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksanya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							14.000.000				15.000.000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Camat	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Camat							14.000.000				15.000.000	
8	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	14.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Honor sebagai Narasumber;		15.000.000	
																	-	
7	01	06			PROGRAM DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksanya Pembinaan dan Pengawasan Penmerintahan Desa							92.709.000				128.000.000	
7	01	06	2.01		Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksanany Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							92.709.000				128.000.000	
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dala rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4		Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum			2.000.000	
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	25.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Pilkades 1 Desa Ampelsari			20.000.000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksanay Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	3.650.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum			2.000.000	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	6.644.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum			40.000.000	
7	01	06	2.01	09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengawasan dg Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengawasan dg Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	8.350.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum			15.000.000	
7	01	06	2.01	11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	33.200.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Kegiatan Pembinaan Linmas se Kecamatan (Kelurahan dan Desa) (Tahun 2023 direfocusing tinggal 1 kegiatan); Pelatihan dan uang transport			34.000.000
7	01	06	2.01	16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	5.970.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum			16.000.000	

7	01	06	2.01	16	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4	9.895.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum			21.000.000
													TOTAL				

Kode					Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Target)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Simber Dana (Rp)		
									Lokasi Out Put Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan (Target)
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01											900.137.450			
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksanya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota									
7	01	01													
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							22.920.000			
					Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	3	Kabupaten Banjarnegara	3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	100	22.920.000		Honor KPA, pengurus barang, bendahara pengeluaran pembantu
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah							79.656.700		
7	01	01	2.'06												
7	01	01	2.'06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	1	Kabupaten Banjarnegara	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	100	16.404.200	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Alat kebersihan
7	01	01	2.'06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10	Kabupaten Banjarnegara	10	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		63.252.500	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Mamin rapat, ATK
7	01	01	2.'08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							20.400.000		
7	01	01	2.'08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	Kabupaten Banjarnegara	3	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100	8.400.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.'08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.	1	Kabupaten Banjarnegara	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.	100	12.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.'09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							49.330.750		

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Kabupaten Banjarnegara	6	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	12.737.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	pajak service, 5 roda 2, 1 unit roda 3
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kntor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung KANTOR	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor, bangunan lain yang di sediakan	3	Kabupaten Banjarnegara	3	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor, bangunan lain yang di sediakan	100	13.597.500		Pembelian AC 3 unit
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya /Rehabilit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Kabupaten Banjarnegara	2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	8.814.250	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Pengecatan gedung kantor dan rehab la
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	14.182.000		Service laptop, PC, printer
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat							27.830.000		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Kabupaten Banjarnegara	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		27.830.000		
7	01	03			PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							700.000.000		
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Kelurahan	TerlaksananyaPembdayaan Kelurahan							-		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	4	Kabupaten Banjarnegara	4	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	100	466.749.600		aspal jalan, talud, poskampling, saluran drainase

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	6	Kabupaten Banjarnegara	6	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	100	233.250.400		Mamin rapat lembaga, PKK, RT-RW , Karang Taruna, dll
TOTAL													900.137.450		

Kode					Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Target)		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	(Simber Dana (Rp)	
									Lokasi Out Put Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Target)			
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN								918.993.483		
7	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksanya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota							218.993.680		
7	01	01													
7	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanyanta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							22.920.000		
7	01	01	2.'02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan Daerah	Terlaksanany Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	22.920.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.'06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah							47.427.200		
7	01	01	2.'06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	7.427.200	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	

7	01	01	2.'06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	40.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.'07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah							31.382.000		
					Pengadaan Barang Personal Komputer	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (Laptop, Scanner, Printer Scanner)	Jumlah peralatan komputer yang disediakan	6	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah peralatan komputer yang tersedia dalam pengadaan barang	6	31.382.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.'08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							41.000.000		
7	01	01	2.'08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12	5.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.'08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	36.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.'09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							34.564.480		

7	01	01	2.'09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	7.468.300	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.'09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya /Rehabilit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	18.896.180	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.'09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	8.200.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksanya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									
7	01	02	2.'04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat							41.700.000		

7	01	02	2.'04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Terlaksanaya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	41.700.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	03			PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							699.999.803		
7	01	03	2.'02		Pemberdayaan Kelurahan	TerlaksanayaPemberdayaan Kelurahan							699.999.803		
7	01	03	2.'02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksanany Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	10	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	10	505.762.653	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	termasuk Pengadaan Gerobak sampah
7	01	03	2.'02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	7	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	7	194.237.150	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
TOTAL													918.993.483		

Renja RKPD Kelurahan Wangon TA. 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Target)			Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (Rp)	
									Lokasi	Out Put Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Target)				
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN										911.568.000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							191.568.000				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							23.568.000				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan/ Verifikasi Keuangan SKPD yang disediakan	12 bulan	Kelurahan Wangon		Jumlah Dokumen Penatausahaan/ Verifikasi Keuangan SKPD yang disediakan	12 bulan	23.568.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah							55.000.000				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	1 paket	Kelurahan Wangon		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	1 paket	5.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	Kelurahan Wangon		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	50.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah							40.000.000				
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan prasarana kantor yang dipenuhi	17 unit	Kelurahan Wangon		Jumlah Sarana dan prasarana kantor yang dipenuhi	17 unit	40.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							27.000.000				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan	Kelurahan Wangon		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan	8.700.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum			

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	Kabupaten Banjarnegara		100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	18.300.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								46.000.000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak serta perizinannya	3 unit	Kelurahan Wangon			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak serta perizinannya	3 unit	3.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2 gedung	Kelurahan Wangon			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2 gedung	40.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum	Rehab gedung PKD, LPMK, Toliet aula, Pengecatan
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	10 unit	Kelurahan Wangon			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	10 unit	3.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									20.000.000		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat								20.000.000		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	Kelurahan Wangon			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	20.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum	
7	01	03			PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								700.000.000		
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan								700.000.000		

7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	7 lokasi	Kelurahan Wangon		Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	7 lokasi	525.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	29 kelompok	Kelurahan Wangon		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	29 kelompok	175.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum	termasuk KWT
TOTAL													911.568.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Simber Dana (Rp)	Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Target)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)				
									Lokasi Out Put Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan (Target)			
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN								897.340.185			
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksana penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota							257.340.185			
7	01	01														
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							22.920.000			
7	01	01	2.	'02												
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan	Kelurahan Karangtengah	3	Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	100%	22.920.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum		
7	01	01	2.	'06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah							55.840.185			
7	01	01	2.	'06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karangtengah	17	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	4.840.185	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Rutin	
7	01	01	2.	'06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karangtengah	10	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	51.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum		

[illegible]

7	01	01	2.'09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Kelurahan Karangtengah	3	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	5.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	02	2.'04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat							17.130.000		
7	01	02	2.'04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karangtengah	3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	17.130.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	03			PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							640.000.000		
7	01	03	2.'02		Pemberdayaan Kelurahan	TerlaksananyaPemberdayaan Kelurahan							640.000.000		
7	01	03	2.'02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Prasarana Fasilitas Umum Yang Terpeliharaa	Jumlah terlaksananya Prasarana Fasilitas Umum Yang Terpelihara	Kabupaten Banjarnegara	10	Jumlah Prasarana Fasilitas Umum Yang Terpeliharaa	100%	478.450.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana		Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana		150.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
					Peningkatan Partisipasi Masyaraka (musren)	Terlaksana Peningkatan Partisipasi Masyaraka (musren)	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana		Kabupaten Banjarnegara	3	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana	100%	11.550.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
TOTAL															

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Target)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Simber Dana (Rp)		
									Lokasi Out Put Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan (Target)
7	01	01	2.'09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67.500.000			
7	01	01	2.'09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit Kendaraan	Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit Kendaraan	1.500.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kntor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung KANTOR	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor, bangunan lain yang di sediakan		Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor, bangunan lain yang di sediakan		30.000.000		Pengadaan 25 Kursi Rapat dan 1 Printer
7	01	01	2.'09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya /Rehabilit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket Kegiatan	Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket Kegiatan	30.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.'09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6.000.000		
7	01	02	2.'04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat							29.000.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Target)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Simber Dana (Rp)		
									Lokasi Out Put Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan (Target)
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN								867.837.120		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksanya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota							167.837.120		
7	01	01			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanyanta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							22.920.000		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	22.920.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah							42.520.500		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	8.000.500	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	34.520.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.000.000			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12	6.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	24.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	

7	01	02	2.'04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	27.900.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	03			PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							700.000.000		
7	01	03	2.'02		Pemberdayaan Kelurahan	TerlaksananyaPemberdayaan Kelurahan							700.000.000		
7	01	03	2.'02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Prasarana Fasilitas Umum Yang Terpeliharaa	9	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Prasarana Fasilitas Umum Yang Terpeliharaa	9	535.321.400	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	03	2.'02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana	7	Kabupaten Banjarnegara	100	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana	7	164.678.600	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
TOTAL													867.837.120		

[illegible]

7	01	01	2.'08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							18.000.000		
7	01	01	2.'08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 laporan	Kabupaten Banjarnegara		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 laporan	6.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.'08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.	1 Paket Kegiatan	Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.	1 Paket Kegiatan	12.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	
7	01	01	2.'09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100.593.500		
7	01	01	2.'09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	

					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kntor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung KANTOR	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor, bangunan lain yang di sediakan	4 unit	Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor, bangunan lain yang di sediakan	4 unit	38.644.000		
7	01	01	2.'09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya /Rehabilit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	44.949.500	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum	Rehab gedung , dapur, Ruang PPS (alihan 30 juta dari logistik)
7	01	01	2.'09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	10.000.000		
7	01	02	2.'04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat							26.200.000		

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Target)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Simber Dana (Rp)	
									Lokasi Out Put Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan			
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KELURAHAN ARGASOKA							890.955.200		
7	01	01			Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayana Publik	Prosentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan Sesuai Ketentuan						215.058.100		
7	01	01	2.'06		Administrasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah						65.860.500		
7	01	01	5.1	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan Daerah	3 orang	Kelurahan Argasoka	100	3 orang	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan Daerah	22.920.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.'06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang terpenuhi	2 kegiatan	Kelurahan Argasoka	100	2 kegiatan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang terpenuhi	7.215.700	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.'06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	9 paket	Kelurahan Argasoka	100	9 paket	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	35.724.800	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum
7	01	01	2.'08		Program Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya air						30.000.000		

7	01	01	2.'08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	3 paket	Kelurahan Argasoka	100	3 paket	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	6.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2.'08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	480 o/k	Kelurahan Argasoka	100	480 o/k	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2.'09		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							97.492.200		
7	01	01	2.'09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	Kelurahan Argasoka	100	3 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.581.200	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum	
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor, bangunan lain yang di sediakan	2 unit	Kelurahan Argasoka	100	2 unit	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor, bangunan lain yang di sediakan	40.180.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum	Meja Kursi Eselon, meubeler, sound system, CCTV, mesin rumput
7	01	01	2.'09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya /Rehabilit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	2 unit	Kelurahan Argasoka	100	2 unit	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	47.471.000	Dana Tranfer Umum Dana Alokasi Umum	

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Target)			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Simber Dana (Rp)	
									Lokasi Kegiatan	Out Put	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Target)				
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN										867.520.000		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksana penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota							167.520.000				
7	01	01															
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanyanta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							22.920.000				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		22.920.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah							50.000.000				
7	01	01	2.'06														
7	01	01	2.'06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum			
7	01	01	2.'06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		40.000.000	Dana Tranfer Umum Dana Alaokasi Umum			
7	01	01	2.'08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							9.600.000				

[illegible]

7	01	01	2.'09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5.000.000		
					Pengadaan peralatan perlengkapan kantor								25.000.000		Soundsystem
7	01	02	2.'04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat							40.000.000		
7	01	02	2.'04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		40.000.000		
7	01	03			PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							700.000.000		
7	01	03	2.'02		Pemberdayaan Kelurahan	TerlaksananyaPemberdayaan Kelurahan							700.000.000		
7	01	03	2.'02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Prasarana Fasilitas Umum Yang Terpeliharaa		Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Prasarana Fasilitas Umum Yang Terpeliharaa		577.008.400		

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana		Kabupaten Banjarnegara		Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana		122.991.600		termasuk prioritas lembaga/ pengelola sampah
TOTAL													867.520.000		

Banjarnegara , 25 Januari 2023

LURAH SOKANANDI

ERNA YUSTIYATI
NIP. 19660201 199003 2 005

BAB I

PENDAHULAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun

2024 disusun dengan berdasarkan pada:

RenjaKecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten dalam LingkunganPropinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor:183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

25. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).

26. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

1.2 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud:

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Kecamatan Bawang agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran Kecamatan Bawang dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2024 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kecamatan Bawang pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.3. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.770.767.000,- dengan fokus utama pada

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah.

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 5 (enam) kegiatan yakni :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - a.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c.2. Penyedia bahan logistik kantor
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - d.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - d.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - e.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - e.2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni :
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat
- Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
- 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha
 - 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
 - 3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
3. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 7 (tujuh) sub Kegiatan :
 1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 2. Fasilitasi administrasi pemerintahan desa
 3. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
 4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum
 6. Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
 7. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Dari 4 program, 8 kegiatan, dan 22 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 3 program, 6 kegiatan, dan 10 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.152.166.422,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 8 kegiatan, dan 18 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar 1.779.490.516,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, meliputi Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Peralihan pelimpahan kewenangan perijinan dari kecamatan ke OPD Kabupaten.
 2. Peralihan kewenangan pelayanan administrasi kependudukan dari OPD Kecamatan ke Pemerintah Desa.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Nilai SAKIP OPD 55,18 atau (CC) dan IKM dengan nilai 83,31 sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat, sub kegiatan Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di limpahkan jumlah penyaluran SPPT PBB

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Faktor SDM yang mendukung;
2. Faktor Anggaran yang memadai;
3. Koordinasi Internal yang mendukung.
4. Kesadaran Masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Koordinasi masing – masing Kasi dan Kasubag
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan
3. Anggaran belanja yang dapat mendukung semua Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang direncanakan secara maksimal

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Nilai IKM	83,4	83,97	84	83,31	99,18	84	250,62	3,01
		Nilai SAKIP	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC

[illegible]

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	2	1	1	100	1	4	100
			paket	paket	paket	paket		paket	paket	
	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	10	30	8	8	100	10	48	480
			paket	paket	paket	paket		paket	paket	
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	15	3	3	100	12	30	250
			lapoan		paket	paket	100%	lap	paket/lap	
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	15	3	3	100	12	30	250
			lapoan	orang	orang	orang	100%	lap	lap/orang	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	0	0	0	0	1	1	100

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase tertib administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%			
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36	16	18	18	100%	36	70	1,94
			Dokumen (Perdes tentang APBDES) dan Laporan Pertanggungjawaban APBDES	desa	desa	desas		dok	dok/desa	
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3	16	18	18	100%	18 desa	18 desa	
			dok	desa	desa	desa		dokk	dok/desa	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	18	0	0	-	0	18	
			dok	desa	desa	desa		dokk	dok/desa	

	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	16	18	18	100%	1	18	18
			dok musrenbagkec	desa	desa	desa		dok	desa	
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	1	16	18	18	100%	1	18	1
			dok	desa	desa	desa		dok	desa	
	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	16	18	18	100%	1	18	1
			dok	desa	desa	desa		dok	desa	

	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3	16	18	18	100%	3	18	1
			(1.Lap penyaluran Bansos, 2.Laporan Rakor E.Warung. 3.laporan DTKS, 4.lap dokumen kegiatan PIK	desa	desa	desa		dok	dok/desa	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan tugas forkopimca	12	16	10	7	0,7	12	35	2,916666667
			dok	dok	dok	dok		dok	dok	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 Indikator. Dari 3 indikator tersebut, 3 berstatus tercapai, namun terdapat 2 Program kegiatan dengan capaian kurang dari 100% yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub Kegiatan Penyedia gaji dan tunjangan ASN dengan capaian kinerja 87% dan Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sub kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha dengan capaian kinerja sebesar 63% dan sub kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peijinan Pelayanan Kartu Keluarga dengan capaian kinerja 63,75%

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Belum Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
2. Belum maksimal dalam menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
3. Adanya kebijakan pemerintah kabupaten tentang penarikan wewenang perijinan non usaha khususnya IUMK, IMB dan Ho;
4. Pelayanan KK dan KTP terkadang membutuhkan waktu yang agak lama, hal ini terkait dengan jaringan internet yang terkadang mengalami kendala dan pelayanan di sebenarnya sudah baik, namun demikian masyarakat berharap untuk lebih ditingkatkan lagi;
5. Adanya perubahan mekanisme pelayanan Kependudukan dari Kantor Kecamatan ke Kantor Desa

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Menyesuaian serta merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;

3. Meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat;
4. Menemukan dan mengenali kelemahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan upaya-upaya perbaikan

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai survey kepuasan masyarakat	-	-	83	83,5	84	84,5	83,81	83,97	83,31	84,5	84,6	
2	Indek penilaian SAKIP			CC	B	B	B	CC	CC	CC	CC	CC	
3	Prosentase jumlah SPPT PBB tersalurkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam Fungsi Penunjang Kewilayahan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup ke empat Program tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
2. Keterbatasan sumber daya manusia aparat desa dan belum tertib administrasi;
3. Rendahnya Sarana untuk Fasilitasi Pendampingan desa yang belum tertib administrasi;
4. Keterbatasan Tenaga atau SDM yang menjadi pendamping desa , sehingga masih adanya desa yang belum terdampingi.
5. Belum semua masyarakat yang datang ke Kecamatan terlayani dengan cepat karena keterbatasan pegawai
6. Sarana prasarana umum yang belum memadai di wilayah kecamatan sehingga mengakibatkan kegiatan pelayanan publik di kecamatan kurang optimal;
7. Kecepatan proses penyelesaian pelayanan non perizinan dan perizinan non usaha masih rendah;
8. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan khususnya dengan Penguasaan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan
9. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;

10. Sarana prasarana yang belum memadai untuk pelayanan administrasi dan kependudukan;
11. Sarana prasarana dan gedung kantor dengan kondisi yang kurang memadai/ layak;
12. Beberapa program/ kegiatan dilaksanakan oleh OPD langsung ke desa dan kurang koordinasi dengan kecamatan;
13. Penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Kecamatan Bawang belum optimal.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Rendahnya Mutu Pelayanan Publik
2. Rendahnya Tata Kelola Administrasi
3. Belum optimalnya Pendampingan Desa

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sehingga pelayanan kepada Masyarakat belum Optimal ,
2. Fasilitas yang belum terpenuhi diantaranya anggaran yang mendukung suatu kegiatan
3. Regulasi yang jelas sebagai dasar atau payung hukum sehingga suatu kegiatan dapat di laksanakan.
4. Kebijakan-kebijakan yang bersifat mendesak yang mengakibatkan peralihan anggaran ,sehingga rencana kerja tidak dapat tercapai sesuai ketentuan.
5. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana prasarana umum dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024, Rencana Pemabangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2024-2026 dan Renstar Perangkat Daerah tahun 2024-2024. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi Pelayanan urusan Pemerintahan dalam Fungsi Penunjang Kewilayahan, yaitu,

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output	Target	Rp	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output	Target	Rp	Catatan Penting
		Kec.Bawang	Nilai SKM	83,4			Kec.Bawang	Nilai SKM	83,5		
		Kec.Bawang	Nilai SAKIP	53,4			Kec.Bawang	Nilai SAKIP	53,5		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Bawang	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	100%	1.966.398.700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Bawang	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	100%	2.262.489.067	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Bawang	Persentase Dokumen dan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	4.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Bawang	Persentase Dokumen dan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan	100%	4.492.600	

								Evaluasi Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10 dokumen (1.Renja, 2.KUA PPAS, 3.RKA Murni 4. DPA murni 5. RKA Perubahan, 6. DPA Perubahan, 7. KAK, 8. Perjanjian Kinerja, 9. RKT, 10. Cascading IKU)	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10 dokumen (1.Renja, 2.KUA PPAS, 3.RKA Murni 4. DPA murni 5. RKA Perubahan, 6. DPA Perubahan, 7. KAK, 8. Perjanjian Kinerja, 9. RKT, 10. Cascading IKU)	1.619.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Bawang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan (1.Laporan pengukuran kinerja, 2.LKJIP, 3.LKPJ-LPPD, 4.Laporan POK, 5.Lap tindak lanjut LHE)	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Bawang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	5 Laporan (1.Laporan pengukuran kinerja, 2.LKJIP, 3.LKPJ-LPPD, 4.Laporan POK, 5.Lap tindak lanjut LHE)	2.873.600	

								Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Kec.Bawang	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima dengan Prosedur yang jelas	100%	1.672.693.356	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Kec.Bawang	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima dengan Prosedur yang jelas	100%	1.913.164.851	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Bawang	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Pegawai	1.621.574.956	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Bawang	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Pegawai	1.862.245.251	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 dok (1.SPP 12 kali, 2.SPM 12 kali, 3.SPJ GU 12 kali 4.SPJ Gaji 12 kali, 5.SPJ Tamsil 12 kali, 6.Kas Opname 12 kali)	49.198.800	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 dok (1.SPP 12 kali, 2.SPM 12 kali, 3.SPJ GU 12 kali 4.SPJ Gaji 12 kali, 5.SPJ Tamsil 12 kali, 6.Kas Opname 12 kali)	49.000.000	

	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kec.Bawang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan, (1.Laporan SPJ Fungsional, 2. Laporan Akuntansi, 3.Laporaan Rekonsiliasi Pajak, 4. Laporaan POK, 5.Laporan barang milik daeraah) 6.Laporan Realisasi Anggaran, 7.Laporan Neraca 8. Laporan Operasional	1.919.600	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kec.Bawang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	8 laporan	1.919.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Bawang		100%	96.846.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Bawang		100%	94.639.200	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Bawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 paket	4.636.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Bawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 paket	4.639.200	
	Penyedia bahan logistik kantor	Kec.Bawang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 paket	92.210.500	Penyedia bahan logistik kantor	Kec.Bawang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 paket	90.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	7.620.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	154.595.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Bawang	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Bawang	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Bawang	Jumlah Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Bawang	Jumlah Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Bawang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	7.620.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec.Bawang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 unit	154.595.000	

						atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Bawang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	68.497.416	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Bawang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	68.497.416	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec.Bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	19.200.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec.Bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	19.200.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec.Bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	49.297.416	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec.Bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	49.297.416	
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kec.Bawang	Persentase Sarana dan Prasaran Aparatur	100%	116.741.228	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kec.Bawang	Persentase Sarana dan Prasaran Aparatur	100%	27.100.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Bawang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	12.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Bawang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	12.100.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung	Kec.Bawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	4.710.100,	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung	Kec.Bawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Bawang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	99.981.128	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Bawang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	10.000.000	

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Bawang	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	143.886.300	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Bawang	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	163.440.000	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec.Bawang	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	8.240.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec.Bawang	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	8.900.000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	8.240.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	8.900.000	
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat</i>	Kec.Bawang	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai Ketentuan	100%	135.646.300	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat</i>	Kec.Bawang	Persentase Pelayanan Administrasi	100%	154.540.000	

								Kependudukan sesuai Ketentuan			
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	250 dokumen	395.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	250 dokumen	395.000	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	4.145.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	4.145.000	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan (laporan Rekonsiliasi Penyaluran SPPT PBB)	131.106.300	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan (laporan Rekonsiliasi Penyaluran SPPT PBB)	150.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Bawang	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	0%	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Bawang	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	100%	-	

	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</i>	Kec.Bawang	Prosentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-%	-	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</i>	Kec.Bawang	Prosentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100%	-	
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Bawang	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	12.050.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Bawang	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	16.250.000	

	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Kec.Bawang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	12.050.000	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Kec.Bawang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	16.250.000	
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen (dokumen Pelaksanaan Kegiatan Forkompinca)	12.050.000	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen (dokumen Pelaksanaan Kegiatan Forkompinca)	16.250.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Bawang	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	164.665.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Bawang	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	271.759.780	
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kec.Bawang	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	164.665.000	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kec.Bawang	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	271.759.780	

	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen (Perdes tentang APBDES) dan Laporan Pertanggungjawaban APBDES	7.565.000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen (Perdes tentang APBDES) dan Laporan Pertanggungjawaban APBDES	3.775.000	
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen (1.Buku Administrasi Umum 2.Buku administrasi Kependudukan, 3.LPPD Desa	4.720.000	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen (1.Buku Administrasi Umum 2.Buku administrasi Kependudukan, 3.LPPD Desa	3.775.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 dokumen pelaksanaan Pilkades	125.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11 dok	240.404.780	

	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen (1.Hasil Musrenbang Kecamatan)	9.100.000	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen (Hasil Musrenbang Kecamatan)	9.945.000	
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen (1.dokumen pembinaan Linmas)	5.990.000	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen (1.dokumen pembinaan Linmas)	7.000.000	
	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 dokumen	8.105.000	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec.Bawang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen (dokumen sertifikat pembentukan Badan Hukum Bumdes)	1.860.000	

	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec.Bawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 laporan	4.185.000	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec.Bawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan (1.Lap penyaluran Bansos, 2.Laporan Rakor E. Warung. 3.laporan DTKS, 4.lap dokumen kegiatan PIK	5.000.000	
JUMLAH					2.287.000.000					2.713.938.847	

Berdasarkan rancangan akhir RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:
Memprioritaskan Kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD.Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Rehab Jalan, gorong2 dan Drainase jalur Banjarnegara-Kebumen	DESA WANADRI		1500 M	APBD I
2	Pengaman Jalan Ruas Jalan Kabupaten (Baja Pengaman Jalan Depan Toko Pak Wahab/sebelum tikungan titik 1,30)	DESA WANADRI		30 M	APBD II
3	Penerangan Jalan Kabupaten Pasar Wanadri-Silangit	DESA WANADRI		10 UNIT TOGOR LISTRIK	APBD II
4	Talud Pengaman Jalan Kabupaten Ruas Kebondalem-Duren (Blok Petir)	DESA KEBONDALEM		100 M	APBD II
5	Pengadaan Peralatan Kesenian Tradisional Kuda Lumping/ Ebeg Dusun Kwali Desa Kebondalem	DESA KEBONDALEM		1 Pkt	APBD II
6	Pelatihan Produksi Pemasaran Pengolahan Pangan Berbahan Dasar Singkong	DESA KEBONDALEM		1 Pkt	APBD II
7	Pembangunan Talud Jalan Majalengka - Lebakwangi Dusun Tembelang (Kec. Bawang-Kec. Pagedongan)	DESA MAJALENGKA		40 M	APBD II

8	Pembangunan Puskesmas Bawang II	DESA MAJALENGKA			APBD II
9	Penerangan Jalan Kabupaten (sepanjang jalan Kali Putih)	DESA WIRAMAstra		10 UNIT TOGOR LISTRIK	APBD II
10	Talud Pengaman Jalan Kabupaten (sepanjang Jalan Raya Wiramastra-Wanadri)	DESA WIRAMAstra			APBD II
11	Pembangunan Jembatan Kali Parakan	DESA KUTAYASA		20 M	APBD II
12	Peningkatan Jalan Tembus Winong - Serang (Rt 5/2)	DESA WINONG			APBD II
13	Peningkatan Jalan Tembus Winong - Mantrianom (Rt 2/4)	DESA WINONG			APBD II
14	Peningkatan Jalan Tembus Winong - Depok (Dusun Kuncen Kedawung)	DESA WINONG			APBD II
15	Pembangunan talud pengaman jalan kabupaten (Depok pinggir jalan kabupaten Rt 3/2)	DESA DEPOK		50 M	APBD II
16	Pembangunan drainase sepanjang jalan kabupaten (Depok pinggir jalan kabupaten Rt 3/1)	DESA DEPOK		470 M	APBD II
17	Pembangunan Talud dan Drainase sepanjang Jalan Dusun Binangun ke Krikil	DESA WATUURIP		1 Pkt	APBD II
18	Pembangunan Drainase sepanjang Jalan Kabupaten di Kadus I	DESA WATUURIP			APBD II
19	Pengadaan Bak Sampah di Desa Watuurip	DESA WATUURIP			APBD II
20	Pengaspalan jalan Masaran - Serang (PIK)	DESA MASARAN		P. 950 M L.3 M	APBD II
21	Pengaspalan Jalan Serang - Masaran (PIK)	DESA SERANG		P. 950 M L.3 M	APBD II
22	Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Serang dengan Desa Winong (Jalan Baru)	DESA SERANG		P. 6 M L.3 M	APBD II
23	Pembangunan jembatan Jl. Raden jati Kusuma Ngebak Banjarsari Rt 1/5	DESA MANTRIANOM		15 M	APBD I

24	Rabat Beton Bahu Jalan (PIK)	DESA MANTRIANOM		1 Pkt	APBD II
25	Penerangan Jalan Kabupaten (sepanjang jalan dari Pertigaan Ponpes Tangho - Masaran)	DESA MANTRIANOM		20 UNIT TOGOR LISTRIK	APBD II
26	Pembangunan Trotoar Jalan Raya (Terminal Mrica RT 01 RW 01 - RT 04 RW 02)	DESA BINORONG		400 M	APBD I
27	Peningkatan Jalan Rt 2/2 - Rt 2/3	DESA BINORONG		650 M	APBD II
28	Peningkatan Jalan Rt 4/2	DESA BINORONG		290 M	APBD II
29	Pembangunan Talud Monumen Renville	DESA JOHO		1 Pkt	APBD I
30	Pembangunan Trotoar Jalan Raya s/d Terminal Mrica	DESA JOHO			APBD II
31	Pelatihan perbengkelan sepeda motor	DESA JOHO			APBD II
32	Pembangunan Jalan Usaha Tani Gligir (menghubungkan Desa Bawang dengan Desa Mantrianom)	DESA BAWANG		905 M	APBD II
33	Normalisasi Saluran Irigasi Primer	DESA BAWANG		868 M	APBD II
34	Pembangunan Lokasi Pusat UMKM Sentra Dawet Ayu depan Indonesia Power	DESA BAWANG		1 Pkt	APBD II
35	Pembangunan Trotoar Jalan Raya s/d Blambangan (Timur Puskesmas Bawang I s/d Blambangan)	DESA BANDINGAN		180 M	APBD II
36	Rehab Aspal dan Drainase Jalan Kabupaten (Pasar Caplek Kawasan Obyek Wisata Mrica)	DESA BANDINGAN		130 M	APBD II
37	Pengadaan tanah untuk PUSKESMAS Bawang I	DESA BLAMBANGAN		1 Pkt	APBD II
38	Aspal Jalan Pramuka & Pemeliharaan Drainase (Jalan Kabupaten Patung Sapi ke Utara)	DESA BLAMBANGAN		P. 2559, L. 3,7 dan 3m	APBD II
39	Talud Pengaman Jalan Arjawinangun (Jalan Kabupaten Patung Sapi ke Utara)	DESA BLAMBANGAN		P. 200m, T 1.6 M, L. 0,3 M	APBD II

40	Peningkatan Jalan Lingkungan Perum Syafira	DESA GEMURUH		485 M	APBD II
41	Pembangunan Saluran Irigasi	DESA GEMURUH		400 M	APBD II
42	Pembangunan Jalan Tepi Irigasi	DESA GEMURUH		1 Pkt	APBD I
43	Pembangunan Bronjong Bantar Benda (Sungai Blimbing)	DESA PUCANG		4 M x 20 M	APBD II
44	Pembangunan Trotoar Jalan (dari Jembatan TK Pembina ke arah Barat SMP N 2 Bawang/ sepanjang Jalan Nasional)	DESA PUCANG		1 Pkt	APBD II
45	Pembangunan Bahu Jalan Kabupaten (Pertigaan Pucang/jalan baru ke selatan arah Banjarmasin / jalan baru)	DESA PUCANG		1 Pkt	APBD II
46	Pengadaan Trafic Light Pertigaan Pasar Pucang dan Pertigaan jalan Baru	DESA PUCANG		1 Pkt	APBD II

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan.Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah kepada MTs Muhammadiyah Bawang,Kec.Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Verifikasi Perangkat Daerah
2	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah kepada MI Muhammadiyah 01 Blambangan Kec.Bawang , Kab. Banjarnegara , Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) RT 02 RW 08 Dusun Kalilandak Desa Wanadri Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Verifikasi Perangkat Daerah
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Bleder RT 02 RW 02 Desa Depok Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Verifikasi Perangkat Daerah
5	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	Bankeudes untuk peningkatan jalan RT 03 RW 04 Desa Serang Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
6	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Bankeudes untuk drainase jalan lingkungan RT 2 RW 2 Desa Kebondalem Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
7	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	Bankeudes untuk peningkatan jalan Dusun Wiragunan RT 03 RW 04 Desa Gemuruh Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
8	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Bankeudes untuk drainase jalan lingkungan RT 01 RW 04 Desa Winong Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui

9	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembuatan Drainase Dukuh Deker (Kanan Jalan) RT. 002 RW. 004 Desa Binorong Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
10	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten)	Hibah kepada Forum Masyarakat Peduli (FMPK) Desa Kutayasa Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
11	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa - Infrastruktur Jalan Desa	Bantuan Keuangan khusus Desa untuk Pengaspalan Jalan Dukuh Jengggul RT. 03 RW. 04 Desa Winong Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
12	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti)	Bantuan Kepada Yayasan Salam Abadi Indonesia "YASIN" Desa Pucang RT. 06 RW. 07 Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
13	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Drainase Desa Kutayasa Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
14	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	Peningkatan jalan Dusun Sireok Rt. 01 Rw. 01 Desa Gemuruh Kecamatan Bawang , Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
15	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Drainase Dusun Kademangan dan Dusun Sireok Desa Gemuruh Kecamatan Bawang , Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
16	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Bnkeudes untuk peningkatan jalan usaha tani RT 01 RW 08 Desa Pucang Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Verifikasi Perangkat Daerah
17	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Peningkatan jalan usaha tani Dusun Derma Desa Joho Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Verifikasi Perangkat Daerah
18	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	Bankeudes untuk Pembangunan aspal sit dan talud jalan RT 03 RW 04 Desa Serang Kec. Bawang , Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
19	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	Bankeudes untuk peningkatan jalan lingkungan RT 5 RW 3 - RT 3 RW 4 Desa Binorong Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
20	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Bankeudes untuk drainase RT 04 RW 08 Desa Mantrianom Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui

21	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Jaya Abadi Dusun Dogleg RT 01 RW 05 Desa Majalengka Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
22	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Margo Mulyo RT 01 RW 04 Desa Majalengka Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
23	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Sri Rejeki Dusun Wiradrana Desa Majalengka Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
24	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya (Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)	Pembangunan talud pengaman embung Kelompok Tani Sri Lestari Dusun Wiradrana Desa Majalengka Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Verifikasi Perangkat Daerah
25	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Hibah kepada Kelompok Tani Ngudi Mulyo RT 02 RW 02 (Gondang) Desa Majalengka Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
26	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Hibah kepada Kelompok Tani SUKA TANI Desa Majalengka Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
27	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Hibah kepada Kube Ternak Tani Mulya Desa Majalengka Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
28	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa- Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Kanak-kanak Al-Qur'an/Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Madrasah Non Formal	Pembangunan TPQ AL ATQO Desa Wiradrana Desa Majalengka Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
29	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa-b. pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/ kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK)	Pembangunan sarana air bersih RT 02 RW 07 Desa Majalengka Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
30	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa- Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Kanak-kanak Al-Qur'an/Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Madrasah Non Formal	Pengadaan Alat Peraga Edukasi dan Perlengkapan Sekolah POS PAUD Tunas Bangsa Desa Kutayasa Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
31	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Rehabilitasi Jalan Desa Kutayasa Dusun 1 Desa Kutayasa Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui

32	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Pembangunan JUT Kelompok Tani Berkah Tani Dari Jembatan Sawangan Ke Blok Beran Kutayasa Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
33	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Peningkatansarpras TPQ Al Hidayah RW 05 Desa Winong Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
34	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah kepada PD Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara untuk Rehab Masjid AL BAYYINAH RT 04 RW 02 Desa Pucang Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
35	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah kepada PD Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara untuk Sarana dan Prasarana Majelis Ta'lim AL BAYYINAH RT 04 RW 02 Desa Pucang Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
36	Pembangunan Jembatan (Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota)	Pembangunan Jembatan Winaraja RW 06 Desa Pucang Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Verifikasi Perangkat Daerah
37	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Pembangunan Bronjong Lindungan Desa Pucang Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Verifikasi Perangkat Daerah
38	Pembangunan/Peningkatan Irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Turi Desa Pucang Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Verifikasi Perangkat Daerah
39	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah Kepada PC NU TPQ NU Az Zaenudin RT 02 RW 04 Dusun Blater Desa Pucang Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
40	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah kepada NU untuk Mushola Al Ikhlas RT 02 RW 04 Desa Majalengka Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
41	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah kepada NU untuk Mushola Al Amin 01 RW 05 Desa Majalengka Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
42	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah kepada PD Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara untuk Rehab Atap Panti Asuhan Putri Desa Bambang Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui

43	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah kepada PD Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana (Tratag) Kelompok Sosial Kematian Desa Blambangan Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
44	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)	Bantuan kepada Panti Asuhan PKU AISYIYAH BLAMBANGAN, Desa Blambangan Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
45	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah Kepada PD Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara untuk Pembangunan TPQ AT TAQWA, RT 04 RW 08 Desa Blambangan Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
46	Penyediaan Sandang (Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial)	Bantuan kepada Panti Asuhan Yatim PKU AISYIYAH BLAMBANGAN Desa Blambangan Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
47	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa - Infrastruktur Jalan Desa	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan RT 02 RW 01, Desa Winong Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
48	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya)	Pembangunan Talud pengaman Jalan RT 03 dan 01 RW I Desa Pucang Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
49	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa - Infrastruktur Jalan Desa	Pengaspalan Sheet Jalan Majatengah RT 01 dan 02 RW I Desa Pucang Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
50	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa - Infrastruktur Jalan Desa	Pengaspalan Jalan Lindungan RT 03 RW 11 Desa Pucang Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
51	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Hibah kepada Kelompok Wanita Tani "Kemangi", Dusun Gembirit, Desa Pucang Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
52	Bantuan Pada Kelompok Seni	Bantuan Kepada Kelompok Kuda Kepang SEKAR SARI BUDAYA, Desa Winong Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
53	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Bantuan Kepada MI Muhammadiyah 2 Blambangan Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui

54	Pembangunan/Peningkatan Irigasi	Dusun Kaliwuluh, Desa Gemuruh, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Verifikasi Perangkat Daerah
55	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	SDIT Bina Insan Desa Pucang Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara		1	Usulan disetujui
56	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa - Infrastruktur Jalan Desa	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Gemuruh Kecamatan Bawang , Kab. Banjarnegara		1	Verifikasi Perangkat Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bawang tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, pengembangan isu-isu strategis daerah juga disusun dengan melakukan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 maupun kebijakan strategis nasional lainnya.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, untuk adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 14 sub kegiatan.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

d. Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pemerintah Desa

yang terdiri dari 1(satu) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diarahkan pada sub kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat desa dan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, maka Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra PD Tahun 2024-2026 RPJPD Tahun 2005-2025, Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah:

BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam Renja

Perangkat Daerah Kecamatan Bawang Tahun 2024-2026
diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan yang ke-5 adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

b. Tujuan yang Ke 6 adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Sasaran:

Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

1.3. Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7.01
 Organisasi : 7-02.0-00.0-00.01 Kecamatan Bawang
 Sub Unit Organiasasi : 7-02.0-00.0-00.01.01 Kecamatan Bawang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil			
					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN							2.287.000.000			
7	.01	.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana		Kec.Bawang	NILAI IKM		100%	1.966.398.700	DAU	

7	.01	.01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah		Kec.Bawang				4.000.000	DAU	
7	.01	.01	2,01	.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	dokumen Rencana Perangka t Daerah	Kec.Bawang		10 dokumen (1.Renja, 2.KUA PPAS, 3.RKA Murni 4. DPA murni 5. RKA Perubahan, 6. DPA Perubahan, 7. KAK, 8. Perjanjian Kinerja, 9. RKT, 10. Cascading IKU)	dokumen Rencana Perangkat Daerah	1.500.000	DAU	

7	.01	.01	2,01	.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi	Kec.Bawang		5 Laporan (1.Laporan pengukuran kinerja, 2.LKJIP, 3.LKPJ-LPPD, 4.Laporan POK, 5.Lap tindak lanjut LHE)	laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi	2.500.000	DAU	
7	.01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima dengan Prosedur yang jelas		Kec.Bawang				1.672.693.356	DAU	
7	.01	.01	2,02	.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Bawang		13 orang	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.621.574.956	DAU	

7	.01	.01	2,02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Bawang		72 dok (1.SPP 12 kali, 2.SPM 12 kali, 3.SPJ GU 12 kali 4.SPJ Gaji 12 kali, 5.SPJ Tamsil 12 kali, 6.Kas Opname 12 kali)	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.198.800	DAU	
7	.01	.01	2,02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec.Bawang		8 Laporan, (1.Laporan SPJ Fungsional, 2. Laporan Akuntansi, 3.Laporan Rekonsiliasi Pajak, 4. Laporan POK, 5.Laporan barang milik daerah) 6.Laporan Realisasi Anggaran, 7.Laporan Neraca 8. Laporan Operasional	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.919.600	DAU	

7	.01	.01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kec.Bawang				96.846.700	DAU	
7	.01	.01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi	Kec.Bawang		1 paket	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi	4.636.200	DAU	
7	.01	.01	2.06	04	Penyedia bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kec.Bawang		10 paket	Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	92.210.500	DAU	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.620.000		

7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan Gedung dan mesin Lainnya	tersedianya Unit Peralatan Gedung dan mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan Gedung dan mesin Lainnya yang Disediakan				0 unit miniset sound system		0		
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya						-		
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 unit		7.620.000,		
7	.01	.01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec.Bawang				68.497.416	DAU	

7	.01	.01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Bawang		12 laporan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	19.200.000	DAU	
7	.01	.01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Bawang		12 laporan	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49.297.416	DAU	
7	.01	.01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasaran Aparatur		Kec.Bawang				116.741.228	DAU	

7	.01	.01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Bawang		7 unit	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12.050.000	DAU	
7	.01	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Bawang		0 unit	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.710.100	DAU	

7	.01	.01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Bawang		2 unit	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	99.981.128	DAU	
7	.01	.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Kec.Bawang	NILAI IKM		100%	143.886.300	DAU	
7	01	02	2.'03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						8.240.000		
7	01	02	2.'03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana	Kec.Bawang		1 Dokumen	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana	8.240.000	DAU	

							Pelayanan Umum	dan Prasarana Pelayanan Umum				dan Prasarana Pelayanan Umum			
7	.01	.02	2.04		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat</i>	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai Ketentuan		Kec.Bawang				135.646.300	DAU	
7	.01	.02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec.Bawang		250 dokumen	Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	395.000	DAU	
7	.01	.02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec.Bawang		12 laporan	Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4.145.000	DAU	

7	.01	.02	2.04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Bawang		1 Laporan (laporan Rekonsiliasi Penyaluran SPPT PBB)	Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	131.106.300	DAU	
7	.01	.05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Kec.Bawang	NILAI SAKIP		100%	12.050.000	DAU	
7	.01	.05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec.Bawang				12.050.000	DAU	
7	.01	.05	2.01	08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Bawang		4 dokumen (dokumen Pelaksanaan Kegiatan Forkompinca)	Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.050.000	DAU	

7	.01	.06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Kec.Bawang	NILAI SAKIP		100%	164.665.000	DAU	
7	.01	.06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec.Bawang				164.665.000	DAU	
7	.01	.06	2.01	01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Bawang		36 Dokumen (Perdes tentang APBDES) dan Laporan Pertanggungjawaban APBDES	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.565.000	DAU	

7	.01	.06	2.01	02	Fasilitasi administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Bawang		3 Dokumen (1.Buku Administrasi Umum 2.Buku administrasi Kependudukan , 3.LPPD Desa	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.720.000	DAU	
7	.01	.06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Bawang		5 Dokumen Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	125.000.000		

7	.01	.06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Bawang		1 Dokumen (1.Hasil Musrenbang Kecamatan)	Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.100.000	DAU	
7	.01	.06	2.01	11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Bawang		1 Dokumen	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.990.000	DAU	
7	.01	.06	2.01	16	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Kec.Bawang		2 Dokumen	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	8.105.000	DAU	

								Masyarak at Desa					Masyarak at Desa			
7	.01	.06	2.01	17	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan Hasil Koordina si Pendamp ingan Desa di Wilayahn ya	Kec.Bawang		3 Laporan (1.Lap penyaluran Bansos, 2.Laporan Rakor E.Warung. 3.laporan DTKS, 4.lap dokumen kegiatan PIK	Laporan Hasil Koordinas i Pendampi ngan Desa di Wilayahn ya	4.185.000	DAU		
JUMLAH													2.287.000.000			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada Renja Perangkat Daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c.2. Penyedia bahan logistik kantor
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - d.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d.2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - f.2. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung
 - f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerntahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :
 - a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
 - a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha
 - b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
 - b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
- 3. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan:
 - a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 7 (tujuh) sub Kegiatan :
 - a.1. Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - a.2. Fasilitas administrasi pemerintahan desa
 - a.3. Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - a.4. Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 - a.5. Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum
 - a.6. Fasilitas penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
 - a.7. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Juli 2023

KEPALA PERANGKAT DAERAH,



ANTON RISDIANTO, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19780221 199803 1 003

**PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA**



**RENCANA KERJA (RENJA) AWAL
KECAMATAN BAWANG
TAHUN 2024**

**KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MADUKARA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat

Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2023 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 5 program, 9 kegiatan, dan 24 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.639.130.682-, dengan fokus utama pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan tugas yang di limpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam rangka menunjang Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja perekam data

administrasi kependudukan yang secara langsung melayani masyarakat, dan tugas – tugas lain.

4. Keterbatasan Kemampuan aparatur kelurahan dan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan terkait dengan implementasi DAU Tambahan Kelurahan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
5. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam mengerjakan buku-buku Administrasi Desa (tidak sesuai Juknis).
6. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di kelurahan dan desa masing-masing.
7. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi perubahan yaitu Penambahan pagu anggaran program/kegiatan/sub kegiatan, - pada saat Perencanaan itu sampai ke pada DPPKAD terjadi perubahan yaitu berdasarkan KUA PPAS anggaran Kecamatan Madukara menjadi 4.639.130.682 , perubahan Pagu Anggaran tersebut di berdasarkan Petunjuk dari Bapak Bupati terkait urusan wajib yang menjadi prioritas , yang akhirnya pada uruwan wajib Kecamatan Banjarnegara mendapat Tambahan Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pokok OPD antara lain meliputi : Gaji, Air, Listrik , Telpon.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian yang sesuai target maupun yang melebihi target.

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu Indikator Kinerja Sasaran Kepala Perangkat Daerah meliputi , (1) Tersalurnya

SPPT PBB dengan target 37.500 lembar dan terealisasi 37.722 lembar SPPT PBB kepada wajib pajak , (2) , Nilai SAKIP. Dengan nilai CC atau (52,87), dari target B atau (60) , (3) SKM, dengan nilai 84,58, dari target 84, 20 Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Faktor SDM yang mendukung
2. Faktor Anggaran yang memadai
3. Koordinasi Internal yang mendukung

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka (*jelaskan implikasi dari poin di atas*). Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran dalam rangka mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik dan untuk mendukung kinerja para pemangku kegiatan agar lebih baik lagi, dengan memperhatikan beberapa faktor , diantaranya:

1. Koordinasi masing – masing Kasi dan Kasubag
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan
3. Anggaran yang mendukung kegiatan
4. Regulasi yang jelas sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangka t Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7 +9	(11)=10 /4
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	B	B	B	CC	CC	B	B	B
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	KUALITAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	100%	100%	1	100%	300	3
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	1	100%	300	3
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun	8 Dokumen	7 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	1 dokumen	9 dokumen	23 dokumen	2.55

	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar yang disusun	7 Dokumen	8 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	1 dokumen	7 dokumen	23 dokumen	3.28
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	1	100%	300	3
	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	28 asn	28 asn	28 asn	28 asn	1	28 asn	84 asn	3
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah UP/GU/LS/TUP yang diuji dan diverifikasi	41 Dok	10 orang	41 dok	41 dok	100 %	41 Dok	30	0.73
	Koordinasi dan penyusunan laporan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah LK Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan disusun	18 dokumen	8 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	1 dokumen	18 Dok	24	3
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	1	100%	300	3
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1	3 Paket	9 Paket	3
	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	3 Paket	13 Paket	3 Paket	3 Paket	1	3 Paket	30 Paket	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas Pengadaan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100%	100%	1	100%	300	3
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia		4 unit			1	3 paket	7	2.33
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	100%	1	100%	300	3
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	12 bulan	1 tahun	12 bulan	12 bulan	1	12 bulan	36	3
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 bulan	8 orang	12 bulan	12 bulan	1	12 bulan	28	2.33

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	100%	100%	1	100%	300	3
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	3 paket	15 Unit	3 paket	3 paket	100 %	3 paket	33	11
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3 paket	3	1
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung Kantor dan bangunan lainnya	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100 %	3 paket	9 Paket	3
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%		100%			100%	100%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kualitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Kelurahan	100%		100%			100%	100%	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 paket		2 paket			2 paket	4	2
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terlaksana	2 paket		2 paket			2 paket	4	2

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 paket		2 paket			2 paket	4	2
	Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Evaluasi Kelurahan	2 paket		2 paket			2 paket	4	2
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kualitas Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	100%	100%	100%	100%	1	100%	300	3
	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kualitas Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	1	100%	300	3
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Pemerintahan	18 desa	14 desa	18 desa	18 desa	100 %	18 desa	36 desa	9
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pilkades	6 desa	1 desa			100 %	18 Desa	1	0
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	18 desa+2 kel	14 desa	18 desa + 2 kel	18 desa + 2 kel	100 %	18 desa	36 desa	9
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan trantibum yang terfasilitasi	18 desa	14 desa	18 desa	18 desa	100 %	18 Desa + 2 kel	32	8
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah kegiatan penyusunan program dan Pemberdayaan yang terfasilitasi	18 desa	14 desa	18 desa	18 desa	100 %	18 Desa	32	8
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah rapat koordinasi/kegiatan pendampingan Desa	18 desa	14 desa	18 desa	18 desa	100 %	18 Desa	32	8
	Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai SKM	84	86.56			103.41	84	254.22	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	100%	100%	100%	1	100%	300	3
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	1	100%	300	3
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi/kegiatan Forkompinca yang dilaksanakan	12 bulan	1 tahun	12 bulan	12 bulan	1	12 bulan	3	3
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100%			1	100%	300	3
	KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100%			1	100%	300	3
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat/pertemuan/kegiata n dengan toga dan tomas	12 bulan	2 Kelurahan			1		4	0.33
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kualitas Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	100%	100%	100%	100%	1	100%	300	3
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kuantitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang Dilimpahkan t	100%	100%	100%	100%	1	100%	300	3
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah SPPT PBB tersalurkan	37.722	37.511	37.722	37.722	1	37.500	75.110	2.0029

	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani	12 bulan	1.947	1.378	1.947	0.59	12 bulan	5386	448.83
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peizinan	Jumlah pengelola operator siak yang terbayarkan	12 bulan	2 orang	12 bulan	12 bulan	1	12 bulan	16	1.33

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu tiga. Indikator. Dari tiga indikator tersebut, satu berstatus tercapai dan dua indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan.
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Melakukan Koordinasi Internal di tingkat OPD
2. Evaluasi terhadap hasil kinerja
3. Optimalisasi Kinerja dan pendampingan terhadap agar tercapai target kinerja.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikutini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2021	2022	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai IKM		-	84	86,58	86,59	86,60	86,57	84,58	84,58	86,58	
	Nilai SAKIP			B	B	B	B	B	CC	B	B	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2023 mencakup urusan tersebut. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2023 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (baru sesuai cascading)
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam rangka menunjang Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja perekam data administrasi kependudukan yang secara langsung melayani masyarakat, dan tugas – tugas lain yang terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan.
4. Keterbatasan Kemampuan aparatur kelurahan dan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan terkait dengan implementasi DAU Tambahan Kelurahan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
5. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam mengerjakan buku-buku Administrasi Desa (tidak sesuai Juknis).

6. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di kelurahan dan desa masing-masing.
7. Belum Optimalnya kesadaran aparat pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Rendahnya Mutu Pelayanan Publik
2. Rendahnya Tata Kelola Administrasi
3. Belum optimalnya Pendampingan Desa

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sehingga pelayanan kepada Masyarakat belum Optimal,
2. Fasilitas yang belum terpenuhi diantaranya anggaran yang mendukung suatu kegiatan
3. Regulasi yang jelas sebagai dasar atau payung hukum sehingga suatu kegiatan dapat di laksanakan.
4. Kebijakan - kebijakan yang bersifat mendesak yang mengakibatkan peralihan anggaran, sehingga rencana kerja tidak dapat tercapai sesuai ketentuan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2023 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan
2. Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan tugas yang di limpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kec. Madukara				UNSUR KEWILAYAHAN	Kec. Madukara				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Madukara	Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.638.917.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Madukara	Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.638.917.000	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Madukara	Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	8.000..000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Madukara	Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8.000..000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Madukara	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	8 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Madukara	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	8 Dokumen	3.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Madukara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar yang disusun	7 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Madukara	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	7 Dokumen	5.000.000	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Madukara	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.160.402.684	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Madukara	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.160.402.684	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Madukara	Jumlah ASN yang terbayarkan gajinya dan Tunjangan	28 ASN	3.038.652.684	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Madukara	Jumlah ASN yang terbayarkan gajinya dan Tunjangan	28 ASN	3.038.652.684	
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Madukara	Jumlah UP/GU/LS/TUP yang diuji dan diverivikasi	UP=1 GU=16 LS=24 TU=	118.860.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Madukara	Jumlah UP/GU/LS/TUP yang diuji dan diverivikasi	UP=1 GU=16 LS=24 TU=-	118.860.000	

8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec Madukara	Jumlah LK Bulanan/Triwulanan/ Semesteran dan disusun	Blan=12 Triwulanan =4 Semesteran=2	2.890.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec Madukara	Jumlah LK Bulanan/Triwulanan/ Semesteran dan disusun	Bulan =12 Triwulanan =4 Semesteran=2	2.890.000	
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Madukara	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	158.876.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Madukara	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	158.876.700	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Madukara	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	3 paket	30.076.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Madukara	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	3 paket	30.076.700	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Madukara	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor yang tersedia	3 paket	128.800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Madukara	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor yang tersedia	3 paket	128.800.000	
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Madukara	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		56.240.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Madukara	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		56.240.000	
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Madukara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	3 paket	56.240.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Madukara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	3 paket	56.240.000	
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Madukara	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	181.023.456	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Madukara	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	181.023.456	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Madukara	Jumlah jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	25.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Madukara	Jumlah jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	25.200.000	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Madukara	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12 bulan	155.823.456	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Madukara	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12 bulan	155.823.456	
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Madukara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	74.374.160	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Madukara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	74.374.160	

18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Madukara	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	3 paket	20.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Madukara	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	3 paket	20.500.000	
19	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Madukara	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 paket	33.921.860	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Madukara	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 paket	33.921.860	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Madukara	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 paket	19.952.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Madukara	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 paket	19.952.300	
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Madukara	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	100%	1.361.156.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Madukara	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	100%	1.361.156.500	
22	PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Kec. Madukara	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan		1.361.156.500	PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Kec. Madukara	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan		1.361.156.500	
23	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Madukara	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 paket	20.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Madukara	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 paket	20.000.000	
24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec.Madukara	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 paket	931.156.500	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec.Madukara	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 paket	931.156.500	
25	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec.Madukara	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 paket	400.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec.Madukara	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 paket	400.000.000	

26	Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Kec.Maduk ara	Jumlah Evaluasi Kelurahan	2 paket	10.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Maduk ara	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 paket	10.000.000	
27	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Madukara	Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	264.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Madukara	Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	264.500.000	
28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Madukara	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		264.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Madukara	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		264.500.000	
29	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Madukara	Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Pemerintah	18 Desa	25.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Madukara	Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Pemerintah	18 Desa	25.000.000	
30	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Kec Madukara	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18 Desa	150.000.00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Madukara	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18 Desa	150.000.00	
31	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Madukara	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18Desa + 2 Kel	9.500.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Madukara	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18Desa + 2 Kel	9.500.000	
32	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Madukara	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi	18Desa + 2 kel	25.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Madukara	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi	18Desa + 2 kel	25.000.000	
33	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec Madukara	Jumlah Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18 Desa	25.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec Madukara	Jumlah Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18 Desa	25.000.000	

34	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Madukara	Jumlah rapatkoordinasi/kegiatan pendampingan Desa	18 Desa	30.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Madukara	Jumlah rapatkoordinasi/kegiatan pendampingan Desa	18 Desa	30.000.000	
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Madukara	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	12.600.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Madukara	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	12.600.000	
36	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Madukara	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintah sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan		12.600.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Madukara	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintah sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan		12.600.000	
37	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Madukara	Jumlah Koordinasi /Kegiatan Forkompimca yang dilaksanakan	12 bulan	12.600.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Madukara	Jumlah Koordinasi /Kegiatan Forkompimca yang dilaksanakan	12 bulan	12.600.000	
38	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Madukara	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	100%	106.826.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Madukara	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	100%	106.826.500	
39	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Madukara	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	86.826.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Madukara	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	86.826.500	
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Madukara	Jumlah SPPT yang tersalurkan	37.500	79.605.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Madukara	Jumlah SPPT yang tersalurkan	37.500	79.605.000	
41	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non- Usaha	Kec Madukara	Jumlah Perijinan Non Usaha yang terlayani	12 bulan	3.621.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non- Usaha	Kec Madukara	Jumlah Perijinan Non Usaha yang terlayani	12 bulan	3.621.500	

42	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Madukara	Jumlah Pelayanan Non-Perizinan yang Terlayani	12 bulan	3.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non- Usaha	Kec Madukara	Jumlah Pelayanan Non-Perizinan yang Terlayani	12 bulan		
43	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec Madukara	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	20.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec Madukara	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	20.000.000	
44	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Madukara	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec Madukara	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	20.000.000	
	TOTAL				5.384.000.000					5.384.000.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

Memprioritaskan Kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

**DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PRIORITAS
 KELURAHAN DAN DESA DI KECAMATAN MADUKARA**

DATA SEBAGAIMANA TERLAMPIR

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	Alamat Lokasi	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	STATUS
1	17-01-2023	Taufikuddin	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pemugaran/ pembangunan rumah tidak layak huni warga desa)	Masih terdapatnya warga yang masih menempati tempat tinggal yang kurang sehat dan kurang layak huni	Desa Bantarwaru, Kab. Banjarnegara	Madukara	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
2	17-01-2023	Taufikuddin	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/ sumur bor))	Terdapatnya sumber mata air yang belum secara maksimal dimanfaatkan oleh warga karena instalasi /jaringan perpipaan dan bak tampungnya kurang berfungsi optimal	Kadus 4 dan Kadus 5, Kab. Banjarnegara	Madukara	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
3	17-01-2023	Taufikuddin	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	Masih terdapatnya warga yang belum memiliki jamban sehat	Desa bantarwaru, Kab. Banjarnegara	Madukara	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
4	19-01-2023	Taufikuddin	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Saluran pembuangan air yang kurang memadai menyebabkan ruas jalan cepat rusak dan tergenang air dimusim penghujan	Bantarwaru, Kab. Banjarnegara	Madukara	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
5	19-01-2023	Taufikuddin	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Ruas Jalan Desa yang rusak mengakibatkan terganggunya aktifitas masyarakat dalam segala bidang akibat dari anggaran desa yang dialokasikan untuk pencegahan dan penanganan pandemi covid-19	RW 01,02,03 ,04 dan 05, Kab. Banjarnegara	Madukara	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
6	20-01-2023	Taufikuddin	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air	Terdapatnya jaringan sarana air bersih yang perlu mendapatkan perawatan karena kondisi perpipaan dan bak tampungnya yang sudah	Kadus 4 dan Kadus 5, Kab. Banjarnegara	Madukara	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

			bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/ sumur bor))	rusak					
7	20-01-2023	Taufikuddin	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/ sumur bor))	Terdapatnya jaringan saluran air bersih yang membutuhkan perawatan karena jalur perpipaan dan bakampungnya sudah mulai rusak	Kadus 4 dan Kadus 5, Kab. Banjarnegara	Madukara	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
8	18-01-2023	Somad	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Kondisi jalan yang sempit mengganggu aktifitas mobilitas warga	RT 05 RW 01 DESA CLAPAR, Kab. Banjarnegara	Madukara	Clapar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
9	19-01-2023	Somad	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Kondisi jalan yang rusak dan sebagian besar masih berupa tanah membahayakan pengguna jalan	RT 03 RW 02 DESA CLAPAR, Kab. Banjarnegara	Madukara	Clapar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
10	19-01-2023	Somad	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Kondisi jalan yang sempit dan rusak menyebabkan akses masyarakat terganggu karena jalan licin pada saat musim hujan sehingga jika dilewati akan membahayakan pengguna jalan	RT 04 RW 02 DESA CLAPAR, Kab. Banjarnegara	Madukara	Clapar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
11	19-01-2023	Somad	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Kondisi drainase yang belum permanen dan rusak menyebabkan aliran air terhambat dan dapat menyebabkan banjir	RW 03, Kab. Banjarnegara	Madukara	Clapar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
12	20-01-2023	Somad	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Kondisi jalan yang rusak membahayakan aktifitas warga yang melintasi jalan tersebut baik pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor	RT 03 RW 01 DESA CLAPAR, Kab. Banjarnegara	Madukara	Clapar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
13	20-01-2023	Somad	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Kondisi jalan yang masih berupa tanah dapat membahayakan pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna sepeda motor karena sangat licin ketika musim hujan	RW 02 DESA CLAPAR, Kab. Banjarnegara	Madukara	Clapar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
14	18-01-2023	Muhtar	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Kondisi jalan desa rusak berat sehingga mengganggu aktivitas masyarakat	Dawuhan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Dawuhan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
15	18-01-2023	Muhtar	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana	Masih terdapat warga yang belum memiliki jamban sehat yang layak	Dawuhan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Dawuhan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

			dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/MCK)						
16	18-01-2023	Muhtar	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)	Gedung PAUD sudah mengalami rusak berat	Dawuhan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Dawuhan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
17	20-01-2023	Kadi, SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Kurangnya prasana jalan lain dan drainase yg tidak berfungsi maksimal sehingga ketika hujan jalan banjir	ruas jalan kabupaten, Kab. Banjarnegara	Madukara	Gununggiana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
18	20-01-2023	Kadi, SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Drainase kurang berfungsi optimal sehingga ketika hujan jalanan banjir	Ruas jalan kabupaten Madukara-Pakelen, Kab. Banjarnegara	Madukara	Gununggiana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
19	12-01-2023	Radi	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan desa)	Jembatan saat ini rusak, tidak bisa dilewati	Sigedang RT 003/ 002 Desa Kaliurip Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kaliurip	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
20	12-01-2023	Radi	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Jalan saat ini rusak parah	RT 003/ 004 - RT 005/ 005 Desa Kaliurip Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kaliurip	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
21	20-01-2023	Radi	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pemugaran/ pembangunan rumah tidak layak huni warga desa)	Saat ini masih banyak warga menghuni rumah yang tidak layak huni	Desa Kaliurip, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kaliurip	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
22	20-01-2023	Radi	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Akses ekonomi, pendidikan, sosial. Saat kondisi jalan rusak parah. Menghambat jalur ekonomi, pendidikan, sosial.	RT 001/ 004 s.d. RT 001/ 005, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kaliurip	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
23	20-01-2023	Radi	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan	Saat ini kondisi senderan/ talud di RT 001 s.d. RT 004 RW 002 dalam kondisi masih batu kosong dan sangat membahayakan pemukiman	RT 001 s.d. RT 004 RW 002, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kaliurip	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

			desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))						
24	20-01-2023	Radi	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan prasarana jalan milik desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Kondisi saluran air masih dasar/ tanah, bisa mengikis senderan/ talud	RT 002/ 001 S.D. RT 002/ 003 , Kab. Banjarnegara	Madukara	Kaliurip	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
25	20-01-2023	Radi	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan prasarana jalan milik desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Saat ini kondisi jalan rusak parah	RT 001 s.d. RT 003 RW 001, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kaliurip	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
26	20-01-2023	Radi	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan prasarana jalan milik desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Kondisi talud/ senderan masih tanah, sangat membahayakan pemukiman dan gedung TK dan akses usaha tani	RT 004 dan RT 003 RW 005, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kaliurip	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
27	20-01-2023	Radi	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan Jembatan Milik Desa)	Jembatan saat ini putus dikarenakan usia dan cuaca, penghubung RT dalam satu Dusun	RT 002/ 003, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kaliurip	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
28	20-01-2023	Radi	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Saat ini kondisi senderan/ talud jalan masih tanah, membahayakan pemukiman	RT 002/ 004, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kaliurip	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
29	20-01-2023	Tarso	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Aspal Jalan Desa sudah rusak	Desa Karanganyar, Kab. Banjarnegara	Madukara	Karanganyar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
30	20-01-2023	Tarso	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan Desa sudah rusak	Desa Karanganyar, Kab. Banjarnegara	Madukara	Karanganyar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
31	20-01-2023	Tarso	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Jalan Usaha Tani sudah rusak, sehingga untuk pengangkutan hasil pertanian susah.	Kadus I Blok Jumbleng, Kab. Banjarnegara	Madukara	Karanganyar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

32	20-01-2023	Tarso	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Jalan Usaha Tani yang sudah rusak sehingga pengangkutan hasil pertanian sulit	Kadus I Blok Jumbeng, Kab. Banjarnegara	Madukara	Karanganyar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
33	20-01-2023	Tarso	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Akses JUT yang sudah rusak sehingga transportasi untuk pengangkutan hasil pertanian terkendala/sulit	Kadus I Blok Jumbeng, Kab. Banjarnegara	Madukara	Karanganyar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
34	19-01-2023	Teguh Prihatno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)	Pembangunan Ruang kantor	TK di Kelurahan Kenteng, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kenteng	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
35	19-01-2023	Teguh Prihatno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)	Penambahan ruang untuk kantor	Paud di Kelurahan Kenteng, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kenteng	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
36	17-01-2023	Surjanto Harso Tjahyadi	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	Masih kurangnya jamban komunal	rt 01 rw 02 Desa Kutayasa Kec. Madukara Kab. Banjarnegara	Madukara	Kutayasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
37	17-01-2023	Surjanto Harso Tjahyadi	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Terdapat jalan desa yang mengalami kerusakan kerusakan	Rt 01,02,03 RW 03, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kutayasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
38	20-01-2023	Surjanto Harso Tjahyadi	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Seringnya terjadi kikisan tanah yang mengganggu akses jalan warga, Juga merupakan wajah Desa Kutayasa yang merupakan pintu masuk Kecamatan Madukara sehingga terlihat kurang elok.	RT 04 RW III Desa Kutayasa Kec. Madukara Kab. Banjarnegara Prov Jawa Tengah, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kutayasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
39	27-02-2023	Surjanto Harso Tjahyadi	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	Masih kurangnya jamban komunal	rt 01 rw 02 Desa Kutayasa , Kab. Banjarnegara	Madukara	Kutayasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
40	16-01-2023	Pujianto	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan	Masih terdapat jalan yang sudah tidak layak untuk menjadi sarana	RW 01 RW 02	Madukara	Limbangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

			Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	transportasi	RW 03, Kab. Banjarnegara				
41	16-01-2023	Pujianto	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)	Kurangnya dukungan APE untuk TK dan PAUD	RW 01 RW 03, Kab. Banjarnegara	Madukara	Limbangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
42	18-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Kondisi drainase yang kurang memadai	Dusun Bogaraji, Rw. 05, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
43	18-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Kondisi tebing yang longsor akibat bencana alam mempersulit akses jalan karena hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 dan membahayakan pengguna jalan	Dusun Pungangan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
44	19-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Belum adanya drainase jalan yang memadai	Dusun Sipete, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
45	19-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/ sumur bor))	Saluran Air Bersih di desa yang belum memadai	Desa Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
46	19-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Kondisi jalan yang belum di talud pengaman dapat mengakibatkan jalan longsor dan membahayakan pengguna jalan	Dusun Laban, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
47	19-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan	Kondisi jalan desa yang rusak dan menghambat akses masyarakat	Dusun Kalipura, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

			Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)						
48	27-02-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	Cakupan jambanisasi yang masih kurang di Desa Madukara	Desa Madukara, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
49	27-02-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	Jambanisasi di Dusun Jurang, Desa Madukara, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara terkendala lokasi pembuatan jamban di masing-masing rumah sehingga perlu dibuatkan jamban komunal	Dusun Jurang, Desa Madukara, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
50	27-02-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Kondisi tebing yang longsor akibat bencana alam mempersulit akses jalan karena hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 dan membahayakan pengguna jalan	Dusun Pungangan, Desa Madukara, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
51	27-02-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pemugaran/ pembangunan rumah tidak layak huni warga desa)	Masih banyak rumah tidak layak huni di Desa Madukara yang perlu dilakukan pemugaran	Desa Madukara, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
52	27-02-2023	Marsono	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	Banyak warga masyarakat Desa Pagelak yang belum mempunyai jamban sehat	Desa Pagelak Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pagelak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
53	27-02-2023	Kusnan	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Belum tersedianya bronjong penahan pemukiman kadas 2 sehingga membahayakan masyarakat ketika musim penghujan dikarenakan wilayah tersebut rawan longsor	Desa Pakelen (Kadas 2), Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
54	27-02-2023	Kusnan	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Belum tersedianya saluran pembuangan air bah Kadas 2 sehingga air hujan mengalir ke badan jalan sehingga merusak aspal	Desa Pakelen (Kadas 2), Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
55	27-02-2023	Kusnan	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/	Belum tersedianya drainase Kadas 2 sehingga banjir ketika musim penghujan mengakibatkan jalan rusak	Desa Pakelen (Kadas 2), Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

			peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))						
56	27-02-2023	Kusnan	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Jalan sudah ada, akan tetapi masih setapak dan belum perlu adanya pelebaran dan pengecoran Jalan Desa Pakelen-Kaliurip untuk mempermudah kegiatan masyarakat sekitar	Desa Pakelen, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
57	27-02-2023	Kusnan	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Belum tersedianya talud penahan pemukiman di wilayah Kadus 3, dan Desa Pakelen termasuk wilayah rawan longsor sehingga membahayakan keselamatan masyarakat di saat musim penghujan	Desa Pakelen (Kadus 3), Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
58	27-02-2023	Kusnan	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Nelum tersedianya talud penahan pemukiman khususnya di wilayah Kadus 1 sehingga membahayakan keselamatan warga masyarakat karena Pakelen merupakan wilayah rawan longsor	Desa Pakelen (Kadus 1), Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
59	27-02-2023	Kusnan	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Belum tersedianya talud penahan pemukiman khususnya di wilayah Kadus 1 sehingga membahayakan keselamatan warga masyarakat karena Pakelen merupakan wilayah rawan longsor	Desa Pakelen (Kadus 1), Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
60	27-02-2023	Kusnan	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan tembus kadus 1 dan 2 sudah ada, namun masih rusak dan belum bisa di lewati kendaraan bermotor sehingga memerlukan pelebaran dan pengerasan sehingga mempermudah aktifitas sosial ekonomi masyarakat	Desa Pakelen, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
61	27-02-2023	Kusnan	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	Masih banyaknya warga yang belum memiliki jamban sehat dan masih membuangnya ke kolam maupun kebun (50 unit)	Desa Pakelen, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
62	16-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/ pemukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain))	Belum punya tempat pembuangan sampah di lingkungan desa penawangan	Penawangan Rt 01 Rw 01, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
63	16-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pemeliharaan sarana/prasarana pos	Pos Kesehatan Desa Rusak , Atap Bocor, Plapon rusak	Penawangan Rt 02 Rw 01, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

			pelayanan terpadu/pondok bersalin desa/Pos Kesehatan Desa)						
64	16-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan Desa Mengalami kerusakan	Penawangan Rt 02 Rw 02, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
65	16-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan Desa Mengalami kerusakan	Desa Penawangan Rt 01 Rw 01, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
66	16-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan desa mengalami kerusakan	Penawangan Rt 02 Rw 01, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
67	16-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan desa mengalami kerusakan	Penawangan Rt 01 Rw 02, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
68	16-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan Desa rusak	Desa Penawangan Blok Kulon, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
69	16-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan desa mengalami kerusakan	Desa Penawangan Blok Wetan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
70	16-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan Desa mengalami kerusakan	Penawangan wilayah kadus dua, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
71	16-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan desa mengalami kerusakan	Desa Penawangan RW 01, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
72	16-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan Desa mengalami Kerusakan	Desa Penawangan RW 02, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
73	16-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Jalan mengalami kerusakan	Desa Penawangan Blok Kayu Bima, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

74	16-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/ sumur bor))	Kurangnya penampungan Air bersih untuk warga desa	Desa Penawangan Rw 02, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
75	16-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan desa mengalami kerusakan	Desa Penawangan Wilayah Kadus I, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
76	18-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Jalan desa mengalami kerusakan	Desa Penawangan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
77	18-01-2023	Prayitno	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam)	Permukiman Rawan tebing longsor	Desa Penawangan RW 02, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
78	10-01-2023	Hery Setyo Pranadi, SE	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa	Akses jalan yang sudah rusak sehingga membuat aktifitas perekonomian dan keseharian warga terganggu	RW002 s/d RW003, Kab. Banjarnegara	Madukara	Petambakan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
79	10-01-2023	Hery Setyo Pranadi, SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/ pemukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain))	Masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, tempat umum dan/atau di sekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum; serta membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan; karena itu desa Petambakan sangat membutuhkan TPST	RT004 RW001, Kab. Banjarnegara	Madukara	Petambakan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
80	10-01-2023	Hery Setyo Pranadi, SE	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Terkikisnya tanah warga akibat tidak adanya talud saluran di wilayah RW004 yang mengakibatkan terkikisnya tanah disekitar dan tersendanya aliran air akibat tidak adanya saluran	RW004, Kab. Banjarnegara	Madukara	Petambakan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
81	20-01-2023	Hery Setyo Pranadi, SE	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Kondisi jalan yang tidak memadai , akses yang susah digunakan untuk kegiatan warga	Desa Petambakan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Petambakan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
82	18-01-2023	Nisran	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air	Sumber mata air mengering saat musim kemarau, masyarakat di wilayah dusun karangtalun mengandalkan dropping air bersih dari	Dusun Karangtalun, RT 04/1, 05/1, 07/1, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rakitan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

			bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/ sumur bor))	pemerintah, atau mengambil air dari wilayah lain.					
83	18-01-2023	Nisran	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Jalan rusak	RT 02 RW 2 Dusun Bogoan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rakitan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
84	18-01-2023	Nisran	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa	Ukuran lapangan sepak bola belum standart dan tidak rata	RT 03 RW 01 Desa Rakitan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rakitan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
85	19-01-2023	Nisran	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/ pemukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain))	Banyaknya limbah/sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan, karena belum adanya pengelolaan sampah terpadu	Desa Rakitan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rakitan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
86	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Belum tertangani	kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
87	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/ pemukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain))	Oprasional TPS3R	kelurahan rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
88	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan/air bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/MCK)	Gedung PKD tidak layak	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
89	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan prasarana jalan milik desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Perbaikan gedung kantor kelurahan	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

90	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan prasarana jalan milik desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Penigkatan drainase	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
91	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Peningkatan jalan lingkungan	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
92	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Peningkatan jalan lingkungan	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
93	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan lingkungan yang belum pengerasan	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
94	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Peningkatan jalan lingkungan pemukiman	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
95	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kesehatan: Pemeliharaan sarana/prasarana pos pelayanan terpadu/pondok bersalin desa/Pos Kesehatan Desa)	Belum ada fasilitas kesehatan yang memadai	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
96	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa)	Sarana dan prasarana perpustakaan desa	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
97	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Jalan lingkungan masih tanah di wilayah utara	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
98	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:	Peningkatan drainase saluran induk wilayah barat	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

			Pemeliharaan prasarana jalan milik desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))						
99	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Peningkatan drainase wilayah tengah	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
100	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Peningkatan jalan lingkungan perumahan wilayah timur	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
101	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Logistik	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
102	17-01-2023	Yuanita Dyah Ratnawati	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Jalan desa banyak yang kondisinya rusak berat, dan berpotensi membahayakan pengguna jalan	dusun 2, Kab. Banjarnegara	Madukara	Sered	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
103	17-01-2023	Yuanita Dyah Ratnawati	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Dengan tidak adanya drainase saat ini, maka semua air mengalir ke jalan, sehingga menjadi erosi.	Rw 03 Dusun 1, Kab. Banjarnegara	Madukara	Sered	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
104	17-01-2023	Yuanita Dyah Ratnawati	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)	Lahan sudah ada bersumber dari wakaf warga, tetapi gedung belum terbangun.	RW 02 Dusun 1, Kab. Banjarnegara	Madukara	Sered	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
105	17-01-2023	Yuanita Dyah Ratnawati	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Saluran air sudah mulai memakan jalan karena tanpa adanya penahan.	dusun 1, Kab. Banjarnegara	Madukara	Sered	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

106	17-01-2023	Yuanita Dyah Ratnawati	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Badan jalan tertutup longsor, karena belum ada penahannya.	dusun 1, Kab. Banjarnegara	Madukara	Sered	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
107	17-01-2023	Yuanita Dyah Ratnawati	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Sepanjang jalan tembus antar kadus belum ada drainase, dan mengakibatkan kerusakan jalan yang saat ini terbangun.	RW 03 Dusun 2, Kab. Banjarnegara	Madukara	Sered	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
108	17-01-2023	Yuanita Dyah Ratnawati	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Jalan yang tersedia belum di makadam	Dusun 2, Kab. Banjarnegara	Madukara	Sered	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
109	19-01-2023	Yuanita Dyah Ratnawati	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Aspal yang sudah ada dalam kondisi rusak	dusun 1, Kab. Banjarnegara	Madukara	Sered	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
110	10-01-2023	Suntoro	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)	Belum adanya alokasi dana untuk bidang pendidikan	Desa Talunamba, Kab. Banjarnegara	Madukara	Talunamba	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
111	10-01-2023	Suntoro	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Talud dan drainase di sepanjang jalan Desa Talunamba-Desa Limbangan sudah rusak parah dan dapat merusak jalan aspal di lokasi tersebut	Jalan Penghubung Desa Talunamba-Desa Limbangan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Talunamba	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
112	27-02-2023	Suntoro	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Kawasan Permukiman: Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam)	Belum tersedianya akses jalan yang memadai pasca bencana	Depok, Talunamba, Kab. Banjarnegara	Madukara	Talunamba	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
113	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan	Belum terfasilitasi	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
114	19-01-2023	Taufikuddin	Pembangunan Puskesmas	Lahan Puskesmas yang tersedia kurang memadai untuk dilakukan	Desa Bantarwaru/kelura	Madukara	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

				pengembangan dan perluasan sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak bisa dilaksanakan secara maksimal	han Kenteng, Kab. Banjarnegara				
115	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belum memiliki fasilitas kesehatan yang baik	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
116	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belum tersedia	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
117	19-01-2023	Teguh Prihatno	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Dibutuhkan dukungan dan pelatihan seni dan budaya (gamelan, karawitan dll)	Kelurahan Kenteng, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kenteng	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
118	18-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Kurangnya alat kesenian yang memadai untuk pelestarian budaya	Desa Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
119	10-01-2023	Suntoro	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Kurang Peralatan grup kesenian	Desa Talunamba, Kab. Banjarnegara	Madukara	Talunamba	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
120	20-01-2023	Suntoro	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Kurangnya peralatan kesenian tradisional masyarakat	Desa Talunamba, Kab. Banjarnegara	Madukara	Talunamba	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
121	19-01-2023	Taufikuddin	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Terdapatnya drainase jalan kabupaten yang kurang memadai sehingga air sering menggenangi jalan apabila musim penghujan	Depan Alfamart Kenteng, Kab. Banjarnegara	Madukara	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
122	20-01-2023	Subalyo	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Tanah Semakin terkikis karena sering terjadi longsor saat musim hujan	Jalan Raya.Blitar-Kaliurip, Kab. Banjarnegara	Madukara	Blitar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
123	19-01-2023	Somad	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Kondisi spal/drainase yang masih belum permanen sehingga akan menghambat aliran air dan menyebabkan banjir	RW 03 DESA CLAPAR, Kab. Banjarnegara	Madukara	Clapar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
124	19-01-2023	Teguh Prihatno	Rehab/ pembangunan gedung pemerintah (Kecamatan/Kelurahan)	Sudah memerlukan rehab dan akan dibuat gedung serba guna	Kelurahan kenteng Rt 02 Rw 03, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kenteng	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
125	16-01-2023	Pujianto	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Penanggulangan pemukiman earga	rw 01 rw 02 rw 03, Kab. Banjarnegara	Madukara	Limbangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
126	19-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Belum adanya drainase jalan kabupaten mengakibatkan air hujan	Jalan Madukara-Gununggiana, Kab.	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

				masuk ke aspal dan dapat menyebabkan kerusakan jalan/aspal	Banjarnegara				
127	16-01-2023	Marsono	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Drainase belum dibangun dan air sering meluap ke jalan raya	Jalan Raya Rejasa - Madukara Km 5 Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pagelak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
128	18-01-2023	Jatmiko	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten (Peningkatan Jalan, Pelebaran Jalan)	Belum tersedianya area yang aman bagi pejalan kaki (Trotoar), sekaligus satu paket dengan Traffick Light di dua titik lokasi rawan kecelakaan	Jalan Raya Madukara-Rejasa, Km. 01 Desa Pekauman Kp. 53482, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pekauman	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
129	18-01-2023	Prayitno	Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	Jembatan memerlukan pelebaran	Akses Jalan Talunamba - Penawangan - Limbangan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
130	18-01-2023	Prayitno	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten (Peningkatan Jalan, Pelebaran Jalan)	Jalan Kabupaten mengalami kerusakan	Jalan Akses Talunamba-Penawangan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
131	18-01-2023	Prayitno	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Jalan Kabupaten Rawan longsor	Desa Penawangan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
132	17-01-2023	Yuanita Dyah Ratnawati	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Saluran air yang ada semakin curam, dengan adanya intensitas hujan yang tinggi, dan memakan badan jalan	Dusun 1, Kab. Banjarnegara	Madukara	Sered	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
133	10-01-2023	Suntoro	Rehab/ pembangunan gedung pemerintah (Kecamatan/Kelurahan)	Kantor Desa Talunamba sudah banyak kerusakan	Desa Talunamba, Kab. Banjarnegara	Madukara	Talunamba	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
134	19-01-2023	Taufikuddin	Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDes	Masih minimnya pengetahuan dari pengurus bumdes tentang manajerial, pembukuan dan penata usahaan dalam mengelola bumdes	Desa Bantarwaru, Kab. Banjarnegara	Madukara	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
135	19-01-2023	Teguh Prihatno	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelatihan Pendidikan Sebaya dan Konselor Sebaya	Kelurahan Kenteng, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kenteng	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
136	16-01-2023	Marsono	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Pagelak, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pagelak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
137	16-01-2023	Marsono	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pagelak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
138	16-01-2023	Marsono	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pagelak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

			Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
139	16-01-2023	Marsono	Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDes	Belum adanya Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes dan kurangnya alokasi anggaran untuk Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes	Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pagelak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
140	10-01-2023	Hery Setyo Pranadi, SE	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan masyarakat, perlu adanya penyediaan arena kehidupan yang lebih baik dan layak. Salah satu diantaranya adalah dengan penyediaan fasilitas tempat usaha yang layak bagi masyarakat berupa pasar yang berfungsi sebagai tempat aktifitas perdagangan	RT004 RW001, Kab. Banjarnegara	Madukara	Petambakan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
141	18-01-2023	Nisran	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tanah kas desa belum bersertifikat	Desa Rakitan Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rakitan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
142	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pendanaan kegiatan PKK	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
143	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi kelembagaan kelurahan	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
144	19-01-2023	Taufikuddin	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Terdapatnya (sarana utilitas) Pagar sari sekolah yang kurang memadai menyebabkan lingkungan sekolah kurang aman dan nyaman	SDN 1 Bantarwaru, Kab. Banjarnegara	Madukara	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
145	19-01-2023	Taufikuddin	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Terdapatnya (sarana utilitas) Pagar sari sekolah yang kurang memadai mengakibatkan lingkungan sekolah kurang aman dan nyaman	SDN 2 Bantarwaru, Kab. Banjarnegara	Madukara	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
146	20-01-2023	Kadi, SE	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Kurangnya ruang kelas untuk pembelajaran siswa	Puntuk Gondang Lor RT 2 RW 2, Kab. Banjarnegara	Madukara	Gununggiana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
147	20-01-2023	Kadi, SE	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Kurangnya ruang kelas untuk pembelajaran siswa	SDN 1 Gununggiana, Kab. Banjarnegara	Madukara	Gununggiana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
148	17-01-2023	Tarso	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	Belum ada perpustakaan SD	SDN Karanganyar RT 01RW 02, Madukara, Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Karanganyar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
149	18-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Kondisi pagar SD yang sudah rusak dan kurang memadai	Dusun Bogaraji, Rt. 03 Rw. 05, Kab.	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

					Banjarnegara				
150	16-01-2023	Marsono	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	2 unit ruang kelas yang sudah rusak berat dan tidak bisa difungsikan	Desa Pagelak RT 02 RW 02 Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pagelak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
151	18-01-2023	Prayitno	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Sarana dan Prasarana SD sudah mulai rusak	Desa Penawangan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
152	19-01-2023	Taufikuddin	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Terdapatnya akses jalan dan lingkungan yang kurang terang mengakibatkan kerawanan sosial	Desa Bantarwaru, Kab. Banjarnegara	Madukara	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
153	20-01-2023	Kadi, SE	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Kurangnya penerangan sepanjang bjalan kabupaten Gununggiana-Pakelen	Ruas Jalan Kabupaten Gununggiana-Pakelen, Kab. Banjarnegara	Madukara	Gununggiana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
154	20-01-2023	Kadi, SE	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Kurangnya penerangan jalan sepanjang ruas jalan kabupaten Gununggian-Pakelen	Sepanjang Ruas Jalan Gununggiana-Pakelen, Kab. Banjarnegara	Madukara	Gununggiana	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
155	19-01-2023	Teguh Prihatno	Penanganan Traffick Light dan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Pembangunan Traffic Light di pertigaan jalan baru Kenteng	Pertigaan Jalan Baru Kenteng, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kenteng	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
156	19-01-2023	Teguh Prihatno	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Belom adanya penerangan jalan di beberapa tempat dan perbaikan lampu di jalan raya wilayah kenteng	rt 02 rw 03, politeknik, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kenteng	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
157	16-01-2023	Marsono	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Belum adanya lampu penerangan jalan sepanjang jalan kabupaten di desa Pagelak sampai desa Pekauman yang mengakibatkan sering terjadi kecelakaan	Jalan Raya Rejasa - Madukara Km 5 - Km 7 Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pagelak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
158	16-01-2023	Marsono	Penanganan Traffick Light dan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Belum adanya rambu-rambu jalan sepanjang jalan kabupaten di desa Pagelak sampai desa Pekauman yang mengakibatkan sering terjadi kecelakaan	Jalan Raya Rejasa - Madukara Km 5 - Km 6 Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pagelak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
159	18-01-2023	Jatmiko	Penanganan Traffick Light dan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Lokasi pertigaan jalan kabupaten dengan jalan masuk desa merupakan akses masuk sekolah MIN 3 Banjarnegara dan PAUD SHAMILA Desa Pekauman, saat jam masuk dan jam pulang sekolah sangat padat dan sering terjadi kecelakaan	Jalan Raya Madukara-Rejasa, Km. 01 Desa Pekauman Kp. 53482, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pekauman	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
160	24-02-2023	Jatmiko	Penanganan Traffick Light dan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Lokasi pertigaan jalan kabupaten dengan jalan masuk desa merupakan akses masuk sekolah MIN 3 Banjarnegara dan PAUD SHAMILA Desa Pekauman, saat jam masuk dan jam	Jalan Raya Madukara-Rejasa, Km. 01 Desa Pekauman Kp. 53482, Kab.	Madukara	Pekauman	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

				pulang sekolah sangat padat dan sering terjadi kecelakaan	Banjarnegara , Kab. Banjarnegara				
161	18-01-2023	Prayitno	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Belum ada Sarana Lampu Jalan	Jalan Desa Penawangan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
162	18-01-2023	Hery Setyo Pranadi, SE	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Jalan di desa kami yang kekurangan lampu penerangan jalan sangat kurang nyaman dalam melakukan kegiatan maupun aktivitas pada malam hari, terlebih lagi berpotensi terjadinya kerawanan dan hal-hal negatif di lingkungan kami	Desa Petambakan RW001 RW002 RW003 RW004, Kab. Banjarnegara	Madukara	Petambakan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
163	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Pengadaan lampu jalan	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
164	10-01-2023	Suntoro	Penanganan Traffick Light dan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Kurangnya rambu-rambu lalu lintas di jalan tikungan seperti spion cembung. Hal ini mengakibatkan sering terjadi laka lantas di jalan tersebut	Desa Talunamba, Kab. Banjarnegara	Madukara	Talunamba	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
165	10-01-2023	Suntoro	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Kurangnya penerangan di jalan Pemukiman Desa	Desa Talunamba, Kab. Banjarnegara	Madukara	Talunamba	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
166	20-01-2023	Suntoro	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Kurangnya penerangan jalan pemukiman desa	Jalan Desa Talunamba, Kab. Banjarnegara	Madukara	Talunamba	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
167	19-01-2023	Taufikuddin	Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan	Terdapatnya para pelaku usaha ekonomi mikro yang membutuhkan pelatihan dan ketrampilan pengolahan makanan agar bisa bersaing di pasar	Desa Bantarwaru, Kab. Banjarnegara	Madukara	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
168	16-01-2023	Marsono	Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan	Banyak warga yang belum bisa mengolah makanan ringan yang berkualitas	Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pagelak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
169	16-01-2023	Marsono	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK)	Banyak pelaku UMKM yang belum bisa mengelola manajemen usaha	Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pagelak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
170	19-01-2023	Taufikuddin	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Terdapatnya akses jalan menuju ke jalur pertanian yang kurang memadai mengakibatkan biaya operasional meningkat	Blok Situ Jeruk, Kab. Banjarnegara	Madukara	Bantarwaru	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
171	18-01-2023	Somad	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi jalan masih berupa jalan setapak berupa jalan tanah yang mengakibatkan petani kesulitan mengangkut hasil pertanian	RW 02 DESA CLAPAR, Kab. Banjarnegara	Madukara	Clapar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
172	19-01-2023	Somad	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi jalan yang masih berupa jalan setapak sehingga sangat membahayakan ketika musim hujan karena sangat licin	RW 02 DESA CLAPAR, Kab. Banjarnegara	Madukara	Clapar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
173	19-01-2023	Somad	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi jalan yang belum permanen membuat petani kesulitan mengangkut hasil pertanian terutama pada saat	RW 02 DESA CLAPAR, Kab. Banjarnegara	Madukara	Clapar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

				musim hujan karena sangat licin					
174	19-01-2023	Somad	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi jalan yang masih berupa tanah sehingga membuat warga kesulitan mengangkut hasil pertanian karena licin dan membahayakan pengguna jalan	RW 02 DESA CLAPAR, Kab. Banjarnegara	Madukara	Clapar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
175	18-01-2023	Muhtar	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi Jalan usahatani di Blok Jali menuju Tasaba masih jalan setapak dan sulit dilalui kendaraan transportasi pengangkut hasil pertanian	Dawuhan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Dawuhan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
176	18-01-2023	Muhtar	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi Jalan Usaha Tani di Blok Kalilongkrang masih berupa jalan setapak yang sulit dilalui kendaraan transportasi pengangkut hasil pertanian	Dawuhan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Dawuhan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
177	18-01-2023	Muhtar	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi Jalan Usaha Tani di Blok Jali Menuju Dawuhan Tengah masih berupa jalan setapak sehingga sulit dilalui kendaraan pengangkut hasil pertanian	Dawuhan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Dawuhan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
178	18-01-2023	Muhtar	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi Jalan Usaha Tani di Blok Jali menuju Beji masih berupa jalan setapak yang sulit dilalui kendaraan pengangkut hasil pertanian	Dawuhan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Dawuhan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
179	20-01-2023	Tarso	Peningkatan Perikanan Berbasis Masyarakat	Susahnya budi daya ikan karena tempat yang terbatas	Desa Karanganyar, Kab. Banjarnegara	Madukara	Karanganyar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
180	20-01-2023	Tarso	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Akses jalan yang masih makadam, ketika musim hujan tiba, jalan jadi licin dan sulit dilalui	RW III Desa Karanganyar, Kab. Banjarnegara	Madukara	Karanganyar	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
181	16-01-2023	Pujianto	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Memudahkan kelancaran transportasi pertanian, memudahkan membawa hasil pertanian	RW 01 RW 02 RW 03, Kab. Banjarnegara	Madukara	Limbangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
182	18-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi akses pertanian yang belum memadai menghambat distribusi hasil bumi	Dusun Bogaraji, Rt. 03 Rw. 05, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
183	18-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kondisi tebing rawan longsor yang membahayakan lokasi pertanian	Dusun Bogaraji, Rt. 02 Rw. 05, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
184	18-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kondisi tebing rawan longsor yang membahayakan pengguna jalan	Dusun Laban, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
185	18-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi jalan usaha tani yang rusak dan menghambat distribusi hasil pertanian	Blok Sumingkir, Dusun Sipete, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
186	18-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi jalan usaha tani yang kurang memadai menghambat akses dan distribusi hasil bumi	Kebun Curug, Dusun Pungangan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

187	18-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi jalan yang kurang memadai dan menghambat akses serta distribusi hasil bumi	Kebun Trenggulun, Dusun Pungangan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
188	19-01-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Peningkatan Perikanan Berbasis Masyarakat	Banyaknya minat masyarakat terhadap pengembangan budidaya perikanan dengan sistim bioflog namun terkendala modal	Desa Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
189	27-02-2023	Sodikin, A. Ma. Pd	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kondisi jalan usaha tani yang kurang memadai dan menghambat akses serta distribusi hasil bumi	Kebun Pethung, Rw. 06, Dusun Sipete, Desa Madukara, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Madukara	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
190	16-01-2023	Marsono	Peningkatan Perikanan Berbasis Masyarakat	Kelompok perikanan belum punya benih ikan super	Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pagelak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
191	16-01-2023	Marsono	Peningkatan Perikanan Berbasis Masyarakat	Kelompok perikanan belum paham tentang hama dan penyakit perikanan dan sangat memerlukan pelatihan tentang perikanan	Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pagelak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
192	18-01-2023	Kusnan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Masih kurangnya fasilitas jalan usaha tani untuk menunjang perekonomian di Desa	Desa Pakelen, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
193	27-02-2023	Kusnan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi jalan usaha tani Kadus 2 masih rusak sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengambil hasil pertaniannya	Desa Pakelen (Kadus 2), Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
194	27-02-2023	Kusnan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi jalan usaha tani Tegal Bonang-Talun Kadus 2 rusak sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengambil hasil pertaniannya	Desa Pakelen (Kadus 2), Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
195	27-02-2023	Kusnan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi Jalan Usaha Tani Kadus 3 (Canggal) masih rusak sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengambil hasil pertaniannya	Desa Pakelen (Kadus 3), Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
196	27-02-2023	Kusnan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan sudah ada namun keadaan jalan rusak sehingga perlu adanya pelebaran dan pengecoran jalan usaha tani kadus 2 (Sirata-Silidong) untuk mempermudah warga dalam mengambil hasil pertaniannya	Desa Pakelen (Kadus2), Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
197	27-02-2023	Kusnan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan sudah ada namun keadaan jalan masih belum layak sehingga perlu adanya pelebaran dan pengerasan jalan usaha tani Kadus 1 (Gondang-garung) untuk mempermudah masyarakat dalam mengambil hasil pertaniannya	Desa Pakelen (Kadus 1), Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

198	16-01-2023	Prayitno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	JUT Mengalami kerusakan	Desa Penawangan Blok Kali Curug, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
199	16-01-2023	Prayitno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	JUT mengalami kerusakan	Desa Penawangan Blok Kali Kulon, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
200	16-01-2023	Prayitno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	JUT mengalami kerusakan	Desa Penawangan Blok Klesem, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
201	16-01-2023	Prayitno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	JUT Mengalami kerusakan	Desa Penawangan Blok Kobar, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
202	16-01-2023	Prayitno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jut mengalami kerusakan	Desa Penawangan Blok Larangan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
203	16-01-2023	Prayitno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jut mengalami kerusakan	Desa Penawangan Blok Serit, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
204	16-01-2023	Prayitno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jut mengalami kerusakan	Desa Penawangan Blok Siranti, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
205	16-01-2023	Prayitno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jut mengalami kerusakan	Desa Penawangan Blok Sirau, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
206	16-01-2023	Prayitno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jut mengalami kerusakan	Desa Penawangan Blok Siton, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
207	16-01-2023	Prayitno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jut mengalami kerusakan	Desa Penawangan Blok Busung, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
208	16-01-2023	Prayitno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jut mengalami kerusakan	Desa Penawangan Blok Suling, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
209	18-01-2023	Prayitno	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	JUT mengalami kerusakan	Desa Penawangan Blok Tadah, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
210	18-01-2023	Prayitno	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan	Budidaya ikan belum berkembang dengan baik	Desa Penawangan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
211	18-01-2023	Prayitno	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan	Pembudidaya ikan belum maju	Desa Penawangan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
x212	18-01-2023	Prayitno	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan	Budi daya ikan belum maju	Desa Penawangan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Penawangan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
213	10-01-2023	Hery Setyo Pranadi, SE	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Tingginya biaya angkut hasil pertanian disebabkan akses transportasi belum layak/memadai	RW001 BLOK GUNUNG, Kab. Banjarnegara	Madukara	Petambakan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
214	19-01-2023	Nisran	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan Usaha Tani masih berupa tanah, belum ada pengerasan	RT 01/1, RT 02/1, RT 06/1, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rakitan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

215	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan JUT	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
216	17-01-2023	Yuanita Dyah Ratnawati	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan sudah terbuka, akan tetapi belum ada pengerasan sehingga saat musim hujan warga kesulitan dalam mengangkut hasil taninya.	dusun 2, Kab. Banjarnegara	Madukara	Sered	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
217	19-01-2023	Teguh Prihatno	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Bantuan sosial Pembangunan dan Perbaikan rumah	wilayah Kelurahan Kenteng, Kab. Banjarnegara	Madukara	Kenteng	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
218	16-01-2023	Marsono	Perluasan Akses sanitasi melalui jambanisasi	Banyak rumah yang belum mempunyai jamban sehat	Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pagelak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
219	16-01-2023	Marsono	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Banyak rumah warga miskin yang sudah tidak layak huni	Desa Pagelak Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pagelak	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
220	27-02-2023	Kusnan	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Masih banyak rumah tidak layak huni di wilayah Desa Pakelen	Desa Pakelen, Kab. Banjarnegara	Madukara	Pakelen	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
221	19-01-2023	Nisran	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Masih ada rumah tidak layak huni yang belum terakomodir bantuan	Desa Rakitan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rakitan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
222	19-01-2023	Nisran	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten	Belum tersedianya IPAL Komunal	Desa Rakitan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rakitan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
223	19-01-2023	Nisran	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal	Limbah rumah tangga dibuang ke drainase jalan, menimbulkan bau dan juga menjadi sarang nyamuk	Desa Rakitan, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rakitan	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
224	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (Dana Kelurahan di Kec. Madukara)	Pembangunan Talud dan atau senderan	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
225	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (Dana Kelurahan di Kec. Madukara)	Anggaran yang diberikan tidak mencukupi untuk pembanguna skal prioritas besar	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
226	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan Kec. Madukara)	Evaluasi kelurahan	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
227	27-02-2023	Mohammad Nasrulloh, S.IP	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan Kec. Madukara)	Penyelenggaraan musren bangkel	Kelurahan Rejasa, Kab. Banjarnegara	Madukara	Rejasa	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL SEMENTARA				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Penegakan hukum nasional;
 - c. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
 - d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, untuk kecamatan adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 13 sub kegiatan.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Dengan 4 sub kegiatan yaitu : Sub Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan ,

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan , Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan.

c. Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dengan 6 sub kegiatan yaitu : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa ,Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa , Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Madukara pada kurun waktu 4 (Empat) tahun kedepan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran-sasaran yang lebih terukur, spesifik dan rasional. Perumusan tujuan dan sasaran memperhatikan indikator-indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan, yang mendukung Tujuan Rencana Perangkat Berdasarkan Rencana tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran tersebut Kecamatan Madukara dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Daerah mendukung Visi dan Misi ke Misi Pemerintah Daerah, sedangkan Visi Pemerintahan Daerah adalah ***Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian***. Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi

Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Madukara sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari Empat misi tersebut adalah **Misi Ketiga** yaitu :

Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good govermend) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.

Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Kemerdekaan berpendapat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia Pasal 28 dan Pasal 28 pasal 3 , memperkuat komitmen untuk menciptakan *good and clean government*. Fokus peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, diharapkan pelayanan dan kinerja yang baik mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Adapun sasaran dalam misi ini meliputi:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik;

Kecamatan Madukara menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Madukara dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2023-2026.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan

Berikut ini Usulan Kegiatan Tahun 2024 dan Prediksi Tahun 2025 Kecamatan dan Kelurahan Banjarnegara

REKAPITULASI USULAN ANGGARAN KECAMATAN DAN KELURAHAN MADUKARA
RENJA 2024

NO	LOKASI	RENCANA ANGGARAN 2024	
1	KECAMATAN MADUKARA	Rp	3.873.835.140
2	KELURAHAN REJASA	Rp	755.083.000
3	KELURAHAN KENTENG	Rp	755.081.860
		Rp	5.384.000.000

TOTAL ANGGARAN

Format rincian terlampir

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Banjarnegara

Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Madukara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Madukara

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		SumberDana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Madukara							3.873.835.140,00			4.043.865.218,00			
7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.873.835.140,00			4.043.865.218,00			
7	01				KECAMATAN							3.489.908.640,00			3.803.254.218,00			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.489.908.640,00			3.803.254.218,00			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8.000.000,00			8.000.000,00			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	8 Dokumen	-	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	3.000.000,00

7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Laporan	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	5.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.160.402.684,00					3.414.430.762,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	28 Orang/bulan	-	3.038.652.684,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.296.682.762,00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	41 Dokumen	-	118.860.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41 Dokumen	113.748.000,00

							n/Verifikasi Keuangan SKPD											
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	18 Laporan	-	2.890.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	4.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								78.800.000,00					95.000.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Paket	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	35.000.000,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Paket	-	68.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	115.000.000,00

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													70.000.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	34.760.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	70.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								169.023.456,00					170.823.456,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	13.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan	12 Laporan	27.000.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						-	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	155.823.456,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	155.823.456,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								38.922.500,00					65.000.000,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	10.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	23.250.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	19.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000,00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	8.172.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	22.500.000,00
7	01				KECAMATAN								383.926.500,00					240.611.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								106.826.500,00					109.811.000,00
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								20.000.000,00					20.000.000,00
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													

						-	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Ko ordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	20.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								86.826.500,00					89.811.000,00
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
						-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanak an	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	3.621.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Doku men	4.000.000,00
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
						-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	3.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.960.000,00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													

						-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	37500 Laporan	-	79.605.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	37500 Laporan	81.851.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								12.600.000,00					10.800.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								12.600.000,00					10.800.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
						-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	12.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	10.800.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								264.500.000,00					120.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								264.500.000,00					120.000.000,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	18 Dokumen	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerinahan Desa	18 Dokumen	25.000.000,00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													

						-	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Dokumen	-	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
						-	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	18 Dokumen	-	9.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18 Dokumen	10.000.000,00
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
						-	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Dokumen	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Dokumen	25.000.000,00
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													

						-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Dokumen	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20 Dokumen	25.000.000,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	18 Laporan	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	18 Laporan	35.000.000,00
					Kelurahan Rejasa								755.083.000,00					784.083.000,00
7	01				KECAMATAN								74.500.000,00					101.000.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								74.500.000,00					101.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								40.000.000,00					45.000.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Paket	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	-	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	30.000.000,00	-		-	-	35.000.000,00

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								10.000.000,00					20.000.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6.000.000,00					6.000.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								18.500.000,00					30.000.000,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	7.500.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3 Unit	15.000.000,00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3 Unit	7.500.000,00
7	01				KECAMATAN								680.583.000,00					683.083.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								680.583.000,00					683.083.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								680.583.000,00					683.083.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Lembaga Kemasya rakatan	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Ke masyarakatan yang Berpa rtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasya rakatan	10.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													

						-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	- Semua Kecam atan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	465.583.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	465.583.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						-	Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Pokmas /Ormas	-	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	200.000.000,00
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan													
						-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	7.500.000,00
					Kelurahan Kenteng								755.081.860,00					777.333.000,00
7	01				KECAMATAN								74.508.360,00					94.250.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								74.508.360,00					94.250.000,00
7	01	01	2.06		Administarsi Umum Perangkat Daerah								40.076.700,00					45.000.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Paket	-	10.076.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Paket	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	35.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								11.480.000,00				20.000.000,00	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	11.480.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6.000.000,00				6.000.000,00	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								16.951.660,00				23.250.000,00	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	4.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	750.000,00

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	6.621.860,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3 Unit	15.000.000,00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	5.779.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3 Unit	7.500.000,00
7	01				KECAMATAN								680.573.500,00					683.083.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								680.573.500,00					683.083.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								680.573.500,00					683.083.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Lembaga Kemasya rakatan	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Ke masyarakatan yang Berpa rtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasya rakatan	10.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													

						-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	465.573.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	465.583.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						-	Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Pokmas /Ormas	-	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	200.000.000,00
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan													
						-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	7.500.000,00
TOTAL													5.384.000.000,00					5.605.281.218,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di

Sebagai berikut

(mengacu pada bab 5 RKPD)

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026;
- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- 4) Ketersediaan prana dalam perencanaan pengembangan kawasan/wilayah;
- 5) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja(Renja) Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, penelitian

dan pengembangan daerah Kabupaten Banjarnegara serta penyusunan perencanaan anggaran(*budgeting*);

- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program yang terdiri 1 program pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, 1 program Urusan Keuangan dan 4 program pada Urusan Kewilayahan;
- 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 sebanyak 10 kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan, 2 Kegiatan pada Program Pelayanan Publik, 1 Kegiatan Pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dan 1 Kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa. Dan 1 Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Umum.

Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 secara total sebesar Rp. 5.384.000.000,- yang semuanya bersumber dari dana APBD Kabupaten Banjarnegara

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 2023

CAMAT MADUKARA,

(FAJAR NIDA'UL SYARIFAH, AP)
NIP. 19741120 199311 2 001

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SIGALUH
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SIGALUH TAHUN LALU .	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SIGALUH	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SIGALUH	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Sigaluh, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Kecamatan Sigaluh. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Kecamatan Sigaluh (Renja Kecamatan Sigaluh) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Sigaluh untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Sigaluh, yang disusun berpedoman kepada Renstra Kecamatan Sigaluh dan RKPD.

Penyusunan Renja Kecamatan Sigaluh Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum Kecamatan Sigaluh/lintas Kecamatan Sigaluh, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Kecamatan Sigaluh dan RKPD, penyusunan Renja Kecamatan Sigaluh juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Kecamatan Sigaluh Provinsi terkait. Renja Kecamatan Sigaluh adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. UU tentang Penyelenggaraan urusan yang diampu
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Sigaluh (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Sigaluh (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);

27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sigaluh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Kecamatan Sigaluh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sigaluh, serta sistematika dokumen Renja Kecamatan Sigaluh.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SIGALUH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sigaluh tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Sigaluh, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sigaluh, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sigaluh, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SIGALUH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sigaluh, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SIGALUH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan Sigaluh yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Sigaluh dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SIGALUH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sigaluh Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sigaluh

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sigaluh. Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Sigaluh meliputi urusan meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Kecamatan Sigaluh Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 5 program, 8 kegiatan, dan 15 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.470.310.397,-, dengan fokus utama sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

- a. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa;
- c. Masih lemahnya peran pemerintah desa dalam memberdayakan Bumdes;
- d. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
- e. Belum terpenuhinya keterwakilan partisipasi perempuan dalam pembangunan;

Belum optimalnya kesadaran pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat

(penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keagamaan, dan ketertiban / keamanan);

Dari 5 program, 8 kegiatan, dan 15 sub kegiatan yang dalam Renja Kecamatan Sigaluh tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 5 program, 8 kegiatan, dan 15 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.551.608.922,-

Pada Perubahan Renja Kecamatan Sigaluh Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Kecamatan Sigaluh menjadi 5 program, 8 kegiatan, dan 15 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.470.310.397,- Pada Perubahan Renja Kecamatan Sigaluh tahun 2022, program/kegiatan/sub kegiatan tidak bertambah.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Kecamatan Sigaluh. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Semua Beban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga tidak dikenakan denda.
2. Jaringan Komunikasi Internet dan biaya penggunaan air tahun 2022 tidak ada.

3. Pejabat yang bertugas melakukan fasilitasi, lebih sering turun langsung ke desa-desa. Sehingga biaya rapat tidak bisa digunakan secara maksimal.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan, Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Kegiatan -kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat wajib dan rutin;
2. Kesesuaian antara jumlah anggaran dan target kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka (*jelaskan implikasi dari poin di atas*). Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;

5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sigaluh dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sigaluh sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2....
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sigaluh dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sigaluh
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program/ kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7-01	KECAMATAN									
7-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Kecamatan Sigaluh	Terlaksananya Prosentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan								

[illegible]

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan		12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100%	14 desa	14 desa	100%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100%	14 desa	14 desa	100%
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	100%	14 desa	14 desa	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sigaluh

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Kecamatan Sigaluh mengampu 15 Indikator. Dari 15 indikator tersebut, 3 berstatus tercapai dan 12 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan dan penyelarasan target kinerja dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang baik;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
3. Kinerja petugas kecamatan yang baik dalam mendukung pencapaian target kinerja pelunasan PBB.

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya 3 indikator dalam pelaksanaan pelayanan, Kecamatan Sigaluh adalah tidak terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan. Dan Indikator lain yang tidak tercapai adalah Nilai IKM dan Nilai SAKIP.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian Nilai IKM, antara lain :

1. Belum lengkapnya fasilitas pelayanan publik di kantor kecamatan;
2. Kelengkapan administrasi dan informasi belum terpenuhi sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
3. Adanya penambahan jumlah responden survey IKM;
4. Kurangnya pemahaman SDM tentang SOP pelayanan publik.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian Nilai SAKIP, antara lain :

1. Belum terpenuhinya materi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai ketentuan;
2. Sosialisasi dan pendampingan dalam penilaian SAKIP yang masih kurang dari instansi pengampu.
3. Kapasitas SDM dan pemahaman yang masih terbatas dalam penyusunan dokumen Kecamatan Sigaluh.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Merencanakan target kinerja;

2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Kinerja pelayanan Kecamatan Sigaluh disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.....
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara

[illegible]

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Sigaluh

Kecamatan Sigaluh dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) urusan, yaitu Pelayanan Publik. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sigaluh untuk tahun 2024 mencakup 1 (satu) urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sigaluh diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
2. Belum optimalnya peran pemerintah desa dalam memberdayakan BUMDes
3. Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah desa dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.
4. Belum terpenuhinya keterwakilan partisipasi perempuan dalam, pembangunan.
5. Belum optimalnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
6. Belum optimalnya kesadaran pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (pemeliharaan jalan desa, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keagamaan, dan ketertiban / keamanan);
7. Jumlah SDM kecamatan yang terbatas kurang memadai dalam memberikan pelayanan publik yang optimal;

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kinerja

3. Belum optimalnya perencanaan kinerja

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Sigaluh, yaitu:

1. Belum optimalnya budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
2. Masih kurangnya jumlah Aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih kurangnya sumber dana pendukung kerja
4. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana dan prasarana umum serta pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sigaluh pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Sigaluh pada tahun 2026 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi 5 (lima) kegiatan yaitu Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Sigaluh, administrasi keuangan Kecamatan Sigaluh, administrasi umum Kecamatan Sigaluh, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
3. Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang meliputi 1 (satu) kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kecamatan Sigaluh				3.852.336.051					3.348.695.550	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KEC. SIGNALUH	Nilai SKM	85,3	3.091.136.051					3.348.695.550	
			Nilai SAKIP	B	-						
			Prosentase SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak	100%	-						
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sigaluh	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan	100%	3.000.000,-				100%	1.680.000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen perencanaan, renstra dan renja yang disusun	8 dok	1.500.000,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen perencanaan, renstra dan renja yang disusun	8 dok	840.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	7 dok	1.500.000,-	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	7 dok	840.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sigaluh	Prosentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan	100%	2.750.010.041					2.958.022.250	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Sigaluh	Jumlah ASN yang terbayarkan	22 ASN	2.639.412.041	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Kec. Sigaluh	Jumlah ASN yang terbayarkan	22 ASN	2.871.314.450	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Sigaluh	Jumlah pengelola keuangan yang terbayarkan	7 orang	96.298.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Sigaluh	Jumlah pengelolaan keuangan yang terbayarkan	7 orang	109.280.000	
	Koordinasi dan penyusunan	Kec. Sigaluh	Jumlah laporan	16 dok	14.300.000	Koordinasi dan penyusunan	Kec. Sigaluh	Jumlah laporan	16 dok	15.727.800	

	laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran		keuangan yang disusun			laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran		keuangan yang disusun			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sigaluh	Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	87.484.100				100%	47.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1 tahun	7.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1 tahun	6.000.000	
	Penyedia bahan logistik kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	1 tahun	79.984.100	Penyedia bahan logistik kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	1 tahun	70.078.000	
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sigaluh	Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	166.168.630					109.521.200	
	Penyedia jasa komunikasi,	Kec. Sigaluh	Jumlah penyedia jasa	1 tahun	32.500.000	Penyedia jasa komunikasi,	Kec. Sigaluh	Jumlah penyedia jasa	1 tahun	18.300.000	

	sumber daya air dan listrik		komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi			sumber daya air dan listrik		komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi			
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang terbayarkan	7 orang	133.668.630	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang terbayarkan	7 orang	91.221.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sigaluh	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	84.473.280					57.900.000	
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Sigaluh	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	10 Unit	9.264.000	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Sigaluh	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	10 Unit	6.500.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah gedung kantor dan rumah	2 Unit	27.129.480	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah gedung kantor, rumah	2 Unit	15.000.000	

	dan bangunan lainnya		dinas yang terpelihara			dan bangunan lainnya		dinas dan uala yang terpelihara			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sigaluh	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang terpelihara	2 paket	48.079.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sigaluh	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang terpelihara	2 paket	36.400.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC. SIGALUH			63.000.000					61.283.000	
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Sigaluh	Prosentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	-	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Sigaluh	Prosentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	0	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sigaluh	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	63.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	61.283.000	

							kepada Camat				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEC. SIGALUH			617.000.000					335.342.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Kalibenda	Terlaksananya Kualitas Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan	100%	617.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Kalibenda	Terlaksananya Kualitas Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan	100%	335.342.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalibenda	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	100%	491.386.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalibenda	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	100%	210.342.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalibenda	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	125.614.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalibenda	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	125.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KEC. SIGALUH			-					16.500.000	

	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sigaluh	Prosentase penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	15.000.000					16.500.000	
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Kec. Sigaluh	Jumlah pelaksanaan tugas forkompimca	12 bulan	15.000.000	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Kec. Sigaluh	Jumlah pelaksanaan tugas forkompimca	12 bulan	16.500.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	Kec. Sigaluh			43.200.000					122.064.900	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sigaluh	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	43.200.000					122.064.900	

	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Sigaluh	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang disusun	14 desa	7.200.000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Sigaluh	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang disusun	14 desa	0	
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Sigaluh	Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan desa	14 desa	7.200.000	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Sigaluh	Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan desa	14 desa	3.200.000	
	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Sigaluh	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	14 desa	7.200.000	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Sigaluh	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	14 desa	10.500.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa	4 desa		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan		Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa	4 desa	98.764.900	
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Sigaluh	Jumlah pembinaan trantibum	14 desa	7.200.000	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Sigaluh	Jumlah pembinaan trantibum	14 desa	3.200.000	
	Fasilitasi penyusunan	Kec. Sigaluh	Jumlah pembinaan	14 desa	7.200.000	Fasilitasi penyusunan	Kec. Sigaluh	Jumlah pembinaan	14 desa	3.200.000	

	program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa		penyusunan program PMD			program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa		penyusunan program PMD			
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec. Sigaluh	Jumlah koordinasi pendampingan desa	14 desa	7.200.000	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec. Sigaluh	Jumlah koordinasi pendampingan desa	14 desa	3.200.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Mengoptimalkan Rencana Target Kinerja
2. Menyelaraskan target kinerja dengan anggaran kinerja
3. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kinerja

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sigaluh. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

NO	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Bantuan Keuangan kepada Desa Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	PRINGAMBA	Terlaksananya kegiatan pembangunan akses jalan dari Desa Pringamba menuju Desa Prigi		Validasi Baperlitbang
2	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten (Peningkatan dan Pelebaran Jalan)	PRINGAMBA	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Pringamba menuju Desa Lain		Validasi Baperlitbang
3	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong jalan kabupaten	PRINGAMBA	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong jalan kabupaten		Validasi Baperlitbang
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD	PRINGAMBA	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD		Validasi Baperlitbang
5	Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat	PRINGAMBA	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat		Validasi Baperlitbang

6	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Pemeliharaan Jalan Desa	WANACIPTA	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan desa		Validasi Baperlitbang
7	Pengadaan meubelair SD	WANACIPTA	Terlaksananya kegiatan Pengadaan meubelair SD		Validasi Baperlitbang
8	Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	WANACIPTA	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif		Validasi Baperlitbang
9	Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan	WANACIPTA	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan		Validasi Baperlitbang
10	Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat	WANACIPTA	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat		Validasi Baperlitbang
11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD	WANACIPTA	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD		Validasi Baperlitbang
12	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Kesehatan	TUNGARA	Terlaksananya kegiatan Pembangunan Posyandu		Validasi Baperlitbang
13	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong jalan kabupaten	TUNGARA	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong jalan kabupaten		Validasi Baperlitbang
14	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pemukiman	TUNGARA	Terlaksananya Kegiatan Pembuatan saluran air bersih yang memadai		Validasi Baperlitbang
15	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pendidikan	TUNGARA	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Gedung TK		Validasi Baperlitbang
16	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	SINGAMERTA	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan desa		Pengajuan Usulan

17	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pariwisata	SINGAMERTA	Terlaksananya kegiatan pengembangan sarana dan Prasarana Pariwisata		Pengajuan Usulan
18	Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDes	SINGAMERTA	Terlaksananya kegiatan pelatihan ketrampilan manajemen BUMDes		Pengajuan Usulan
19	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK)	SINGAMERTA	Terlaksananya kegiatan pelatihan manajemen usaha kecil untuk mengembangkan ekonomi masyarakat		Pengajuan Usulan
20	Pembangunan Sarana Air Bersih	SINGAMERTA	Tercukupinya ketersediaan Sarana Air Bersih		Pengajuan Usulan
21	Peningkatan Ternak Berbasis Masyarakat	SINGAMERTA	Terlaksananya peningkatan peternak dalam masyarakat		Pengajuan Usulan
22	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	SIGALUH	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan desa		Validasi Baperlitbang
23	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	SIGALUH	Terlaksananya pembuatan akses jalan ke kawasan pertanian		Validasi Baperlitbang
24	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Kesehatan	SAWAL	Terlaksananya kegiatan pengadaan jamban sehat untuk warga desa		Validasi Baperlitbang
25	Penanganan rumah terdampak bencana	SAWAL	Terlaksananya rehabilitasi rumah yang terdampak bencana		Validasi Baperlitbang
26	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	SAWAL	Terlaksananya pembuatan akses jalan ke kawasan pertanian		Validasi Baperlitbang
27	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	SAWAL	Terlaksananya kegiatan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat		Validasi Baperlitbang
28	Rehabilitasi pembangunan Gedung Pemerintah Desa	SAWAL	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi pembangunan dan pemeliharaan Gedung pemerintah desa		Validasi Baperlitbang

29	Pengembangan Kapasitas Budidaya Ikan	SAWAL	Terlaksananya kegiatan pengembangan kapasitas budidaya ikan di desa		Validasi Baperlitbang
30	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	RANDEGAN	Terlaksananya kegiatan pembangunan jalan desa Randegan Penawaren		Validasi Baperlitbang
31	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	RANDEGAN	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif		Validasi Baperlitbang
32	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	RANDEGAN	Terlaksananya kegiatan pembangunan Gedung serbaguna untuk kegiatan di desa		Validasi Baperlitbang
33	Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Kabupaten	RANDEGAN	Terlaksananya pembangunan jembatan penghubung Randegan Bojanegara yang sempit dan berongga		Validasi Baperlitbang
34	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten	KARANGMANGU	Terlaksananya kegiatan peningkatan dan pelebaran jalan desa		Validasi Baperlitbang
35	Pembangunan turap/talud/bronjong jalan kabupaten	KARANGMANGU	Terlaksananya kegiatan pembangunan talud pengaman di lingkungan desa		Validasi Baperlitbang
36	Rehabilitasi/Pembangunan Gedung Pemerintah	KARANGMANGU	Terlaksananya pembangunan Gedung TK dan Kesenian		Validasi Baperlitbang
37	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	KALIBENDA	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pembangunan jalan desa yang sudah rusak berat		Pengajuan Usulan
38	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	KALIBENDA	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pembangunan PAUD/TK/TPQ yang sudah rusak berat		Pengajuan Usulan
39	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	KALIBENDA	Terlaksananya kegiatan pelatihan budidaya perikanan		Pengajuan Usulan

40	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	GEMBONGAN	Terlaksananya pembuatan akses jalan ke kawasan pertanian		Pengajuan Usulan
41	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	GEMBONGAN	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan desa yang rusak berat		Validasi Baperlitbang
42	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK)	GEMBONGAN	Terlaksananya kegiatan pelatihan usaha kecil (batik) yang belum maksimal		Validasi Baperlitbang
43	Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan	GEMBONGAN	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengolahan makanan ringan di desa		Validasi Baperlitbang
44	Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDes	GEMBONGAN	Terlaksananya kegiatan pelatihan ketrampilan manajemen BUMDes		Validasi Baperlitbang
45	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	BOJANEGARA	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan desa yang rusak dan jalan usaha tani yang belum memadai		Validasi Baperlitbang
46	Fasilitasi Tim Penggerak dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	BOJANEGARA	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga		Validasi Baperlitbang
47	Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDes	BOJANEGARA	Terlaksananya kegiatan pelatihan ketrampilan manajemen BUMDes		Validasi Baperlitbang
48	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan PAD	BOJANEGARA	Terlaksananya kegiatan pembinaan BUMDes di unit usaha produksi dan pemasaran		Validasi Baperlitbang
49	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pendidikan	BANDINGAN	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kesenian kuda lumping wahyu budoyo		Validasi Baperlitbang

50	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	KEMIRI	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan desa yang rusak dan jalan usaha pariwisata curug pitu yang belum memadai		Pengajuan Usulan
51	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	PANAWAREN	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan desa yang belum memadai		Validasi Baperlitbang
52	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	PANAWAREN	Terlaksananya pembuatan akses jalan ke kawasan pertanian		Validasi Baperlitbang
53	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum	PRIGI	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan desa yang rusak dan jalan usaha tani yang belum memadai		Validasi Baperlitbang
54	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	PRIGI	Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kesenian		Validasi Baperlitbang
55	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten	PRIGI	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi jalan kabupaten yang rusak dan kurang lebar		Validasi Baperlitbang
56	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	PRIGI	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan jalan kabupaten yang rusak		Validasi Baperlitbang
57	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK)	PRIGI	Terlaksananya kegiatan pelatihan manajemen usaha kecil untuk mengembangkan ekonomi masyarakat		Validasi Baperlitbang
58	Pelatihan Perikanan Berbasis Masyarakat	PRIGI	Terlaksananya Pelatihan Perikanan Berbasis Masyarakat untuk warga desa		Validasi Baperlitbang

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sigaluh. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SIGALUH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan produktifitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukkamham dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Penegakan hukum nasional;
 - c. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
 - d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, untuk kecamatan adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 12 (duabelas) sub kegiatan;

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan;

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan;

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan;

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SIGALUH

Program pada Kecamatan Sigaluh merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5
Kecamatan Sigaluh				3.348.695.550
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEC. SIGALUH	Nilai SKM	85,3	3.348.695.550
		Nilai SAKIP	B	
		Prosentase SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak	100%	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sigaluh	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan	100%	1.680.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen perencanaan, renstra dan renja yang disusun	8 dok	840.000
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Sigaluh	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	7 dok	840.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sigaluh	Prosentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan	100%	2.958.022.250
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Sigaluh	Jumlah ASN yang terbayarkan	22 ASN	2.871.314.450

Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Sigaluh	Jumlah pengelola keuangan yang terbayarkan	7 orang	109.280.000
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kec. Sigaluh	Jumlah laporan keuangan yang disusun	7 dok	15.727.800
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sigaluh	Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	47.500.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1 tahun	6.000.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	1 tahun	70.078.000
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sigaluh	Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	109.521.200
Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Sigaluh	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi	1 tahun	18.300.000
Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Kec. Sigaluh	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang terbayarkan	7 orang	91.221.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sigaluh	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	57.900.000
Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Sigaluh	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	9 Unit	6.500.000

Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Sigaluh	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang terpelihara	2 Unit	15.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sigaluh	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	2 paket	36.400.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC. SIGALUH			61.283.000
Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Sigaluh	Prosentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sigaluh	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	61.283.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEC. SIGALUH			335.342.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Kalibenda	Terlaksananya Kualitas Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan	100%	335.342.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalibenda	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	100%	210.342.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalibenda	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	125.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KEC. SIGALUH			16.500.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sigaluh	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	16.500.000
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Kec. Sigaluh	Jumlah pelaksanaan tugas forkompimca	12 bulan	16.500.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sigaluh			122.064.900
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sigaluh	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	122.064.900
Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Sigaluh	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang disusun	14 desa	0
Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Sigaluh	Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan desa	14 desa	3.200.000
Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Sigaluh	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	14 desa	10.500.000

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Kec. Sigaluh	Jumlah Desa Pemilihan Kepala Desa	4 Desa	98.764.900
Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Sigaluh	Jumlah pembinaan trantibum	14 desa	3.200.000
Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Sigaluh	Jumlah pembinaan penyusunan program PMD	14 desa	3.200.000
Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec. Sigaluh	Jumlah koordinasi pendampingan desa	14 desa	3.200.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sigaluh Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sigaluh Tahun 2023-2026. Renja Kecamatan Sigaluh selanjutnya menjadi platform operasional bagi Kecamatan Sigaluh dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Sigaluh digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sigaluh setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Kecamatan Sigaluh masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Kecamatan Sigaluh menjadi acuan bagi Camat Sigaluh dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.



Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 27 Juli 2023

CAMAT SIGALUH,

DANIAL ALOYS, S.STP.,MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19800830 199810 1 002



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK**

Jl. Raya No.42 Purwareja Klampok Telp. (0286) 479002
<http://banjarnegarakab.go.id> Surat Elektronik
kec_purwarejaklampok@banjarnegarakab.go.id
Kode Pos 53474

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, kemudahan dalam pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah serta Penutup. Penyusunan Rancangan Awal Renja tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah.

Demikian Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok disusun, dengan harapan dapat untuk menjadi acuan rencana kerja perangkat daerah dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Purwareja Klampok, Juli 2023
CAMAT PURWAREJA KLAMPOK

Drs. SUSANTO
Pembina Tk.I
NIP. 19731219 199302 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	64
BAB V PENUTUP.....	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain

berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);

27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 4 program, 9 kegiatan, dan 21 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.121.773.235,-, dengan fokus utama pada membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

- a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
- b. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;

- c. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
- d. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
- e. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
- f. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
- g. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
- h. Tahun 2020 di seluruh wilayah Indonesia umumnya dan di Kecamatan Purwareja Klampok pada khususnya, sangat terdampak dengan adanya pandemi virus covid19 yang telah merubah dan mengganggu semua lini kehidupan.

Dari 3 program, 8 kegiatan, dan 17 sub kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 3 program, 8 kegiatan, dan 17 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.230.426.004,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 9 kegiatan, dan 21 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.287.208.485,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi 1 Program yaitu Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, 4 Sub Kegiatan.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan

kewenangan lain yang dilimpahkan Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Perencanaan target kinerja yang sesuai;
2. Penyelarasan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Penyelarasan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Pengerjaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka masih banyak yang harus di perhatikan dan ditingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan indikator kinerja.

Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Koordinasi yang baik antara masing – masing Kasi dan Kasubag
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan
3. Adanya anggaran yang mendukung kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan									
	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	Nilai SKM	84,35	88,05	87	88,05	100%	84,34	86,81	100%
		Nilai SAKIP	CC	B	CC	B	B	CC	CC	CC

		Prosentase SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak	-	100 %	100%	100 %	100 %	-	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
4.11.4.11.05.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.11.4.11.05.01.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%

4.11.4. 11.05. 01.01. 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	7 dokumen	7 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100 %
4.11.4 .11.05 .01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.11.4. 11.05. 01.02. 01	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terbayar	18 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	100 %
4.11.4. 11.05. 01.02. 03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/v	Jumlah Dokumen Penatausahaan	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100 %

	erifikasi keuangan SKPD	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
4.11.4.11.05.01.02.06	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %

4.11.4 .11.05 .01.06	Administra si Umum Perangkat Daerah	Prosent ase pemu han kebutuh an pelayan an adminis trasi umum perangk at daerah	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %
4.11.4. 11.05. 01.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/P enerang an Bangun an Kantor yang Disedi ak an	1 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100 %
4.11.4. 11.05. 01.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralata n dan Perlengk	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100 %

		apan Kantor yang Disediakan								
4.11.4.11.05.01.06.04	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 paket	8 Paket	8 paket	8 Paket	8 Paket	100 %
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase keterseediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	3 laporan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 laporan	3 laporan	100 %

		Listrik yang Disediakan								
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 laporan	2 laporan	100 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	-	-	-	-	-	-	100 %
	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	

	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	-	-	-	-	3 unit	3 unit	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		na aparatu r								
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	10 unit	10 unit	100 %
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %

	prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	na Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		kepada Camat								
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	1 laporan (3.000 pemohon KK 3.000 pemohon KTP)	1 laporan (3.000 pemohon KK 3.000 pemohon KTP)	4.890 pemohon KK 2.157 pemohon KTP	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (jumlah SPPT yang tersalurkan ke WP)	1 laporan	1 laporan (23.336 SPPT)	1 laporan (23.336 SPPT)	1 laporan (24.419 SPPT)	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAK	Persentase pelaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

	AT DESA DAN KELURAHAN	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Kegiatan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	10 lembaga kemasyarakatan	100%

		naan Pemban gunan di Desa								
	PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	Persenta se pelaksa naan program penyelen ggaraan urusan pemerint ahan umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyelengg araan Urusan Pemerintah an Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosent ase penyele nggaraa n Urusan Pemerin tahan Umum sesuai penugas an Kepala Daerah yang dilaksan akan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pelaksanaa	Jumlah	1 dokumen	1 dokumen	1	1 dokumen	1	1	1	1

	n tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			dokumen		dokumen	dokumen	dokumen	dokumen
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		asan pemerin tahan desa								
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokume n yang Difasilita si dalam rangka Penyusu nan Peratura n Desa dan Peratura n Kepala Desa	4 dokumen	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	4 dokumen	4 dokumen	100 %
	Fasilitasi administrasi tata pemerintah n desa	Jumlah Dokume n yang Difasilita si dalam rangka Adminis trasi Tata Pemerint ahan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100 %

		Desa								
	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitas i Terlaksanakannya Pilkades	-	-	-	-	-	-	-	100%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%

	Pembangunan Desa	gunakan Daerah dengan Pembangunan Desa								
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%

		Masyara kat Desa								
	Koordinasi pendamping an desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordin asi Pendampingan Desa di Wilayah nya	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 Indikator. Dari 3 indikator tersebut, 3 berstatus tercapai dan 0 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai IKM	-	-	86	87	84,34	84,35	90,16	88,05	88	88	
	Nilai SAKIP	-	-	CC	B	CC	CC	C	B	B	B	
	Persentase Realisasi SPPT PBB	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/202

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 1 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum seluruh desa terlayani oleh kecamatan karena keterbatasan SDM.
2. Rendahnya Kemampuan aparat desa dan belum tertib administrasi pemerintahan desa
3. Rendahnya Sarana untuk Fasilitasi Pendampingan desa yang belum tertib administrasi.;
4. Keterbatasan Tenaga atau SDM yang menjadi pendamping desa , sehingga masih adanya desa yang belum terdampingi.
5. Belum semua masyarakat terlayani dengan cepat karena keterbatasan pegawai
6. Rendahnya pelayanan publik di kecamatan
7. Rendahnya pelayanan non perizinan dan perizinan non usaha
8. masih adanya KTP, KK, REKOMENDASI, SKCK, MUTASI, LEGALISASI, ANDON NIKAH yang belum terbit yang di sebabkan oleh kurang cepat di proses
9. masih adanya ijin Hajatan dan Ijin Keramaian yang belum di terbitkan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun

capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Tidak optimalnya hasil pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sehingga pelayanan kepada Masyarakat belum Optimal
2. Fasilitas yang belum terpenuhi diantaranya anggaran yang mendukung suatu kegiatan
3. Regulasi yang jelas sebagai dasar atau payung hukum sehingga suatu kegiatan dapat di laksanakan.
4. Kebijakan – kebijakan yang bersifat mendesak yang mengakibatkan peralihan anggaran ,sehingga rencana kerja tidak dapat tercapai sesuai ketentuan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangn tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
2. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Belum optimalnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
5. Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
6. Belum optimalnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
7. Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan
2. Mengkoordinasikan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
3. Mengkoordinasikan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Purwareja Klampok

No	Rancangan Awal RKPD			Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KECAMATAN				3.452.728.056	KECAMATAN				3.356.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec. Purwar eja Klamp ok	Terlaksanan ya Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	100%	3.001.378.056	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec. Purwar eja Klampo k	Terlaksana nya Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	100%	3.005.900.000	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kec. Purwar eja Klamp ok	Terlaksanan ya Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	8.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kec. Purwar eja Klampo k	Terlaksana nya Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	7.000,000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Purwar eja Klampo k	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	4.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Purwar eja Klampo k	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	8 dokume n	3.500.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	3.500.000	
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,001,975,336	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,994,121,650	
7.01.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah ASN yang terbayar gajinya	19 ASN	1,950,704,336	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah ASN yang terbayar gajinya	18 ASN	1,950,705,976	
7.01.01.2.02.03	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian	12 dokumen	45,480,000	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian	12 dokumen	52,925,00000	

			/Verifikasi Keuangan SKPDumu m					/Verifikasi Keuangan SKPDumu m			
7.01. 01.2. 02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semester an SKPD	7 dokumen	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan /Semester an SKPD	7 dokume n	6,000,000	
7.01. 01.2. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Purwar eja Klamp ok			115.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Purwar eja Klamp ok			156,994,50 0	
7.01. 01.2. 06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Purwar eja Klamp ok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan	1 paket	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Purwar eja Klamp ok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan	1 paket	4,999,500	

			Bangunan Kantor yang Disediakan					Bangunan Kantor yang Disediakan			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	25,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	25,000,000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	85,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	126,995,000	
7.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Purwaraja Klampok	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	550,168,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Purwaraja Klampok	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	506,129,200	
7.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	45,000,000	Pengadaan Mebel	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	45,150,200	

7.01.0 1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	40,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	46,771,000	
7.01.0 1.2.07 .07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 unit	45.168.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 unit	-	
7.01.0 1.2.07 .09	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	320,000,000	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	320,000,000	
7.01.0 1.2.07 .11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	94,208,000	
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Purwareja Klampok	T erlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	100%	56.234.720	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Purwareja Klampok	T erlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	100%	56.234.516	

			Urusan Pemerintahan Daerah					Urusan Pemerintahan Daerah			
7.01.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Purwarej a Klampok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	15,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Purwarej a Klampok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	15,000,000	
7.01.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Purwarej a Klampok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	41.234.720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Purwarej a Klampok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	41,234,516	
7.01. 01.2. 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Purwarej a Klampok	Terlaksanan ya Pemeliharaan n Barang Milik Daerah	100%	270.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Purwarej a Klampok	Terlaksanan ya Pemeliharaan n Barang Milik Daerah	100%	269.910.808	

			Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah					Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah			
7.01.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	30,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	29,921,700	
7.01.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	199,999,808	
7.01.0 1.2.09 .10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	2 paket	40,000,000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	2 paket	39,989,300	

			Direhabilitasi					Direhabilitasi			
7.01.02	Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Purwaraja Klampok	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	120.100.000	Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Purwaraja Klampok	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	120.100.000	
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Purwaraja Klampok	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	10,000,000	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Purwaraja Klampok	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	100%	10.000.000	

								Umum			
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	10,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	10.000.000	
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Purwaraja Klampok	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada	100%	110.100.000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Purwaraja Klampok	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada	100%	110.100.000	

			Camat					Camat			
7.01.0 2.2.04 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Purwar eja Klampok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	5,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Purwar eja Klampok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	5,000,000	
7.01.0 2.2.04 .02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha	Kec. Purwar eja Klampok	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 dokumen	5,100,000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha	Kec. Purwar eja Klampok	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 dokumen	5,100,000	
7.01.0 2.2.04 .03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Purwar eja Klampok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	100,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Purwar eja Klampok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	100,000,000	

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan K	Kec. Purwaraja Klampok	Persentase Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	5,000,000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan K	Kec. Purwaraja Klampok	Persentase Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	5,000,,000	
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Purwaraja Klampok	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	5,000,000	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Purwaraja Klampok	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	5,000,000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga kemasyarakatan	5,000,000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga kemasyarakatan	5,000,000	

7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Purwaraja Klampok	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	20,000,000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Purwaraja Klampok	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	20,000,000	
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Purwaraja Klampok	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	20,000,000	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Purwaraja Klampok	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	20,000,000	
7.01.05.2.01.08	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	20,000,000	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	20,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Purwaraja Klampok	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan	100%	286,250,000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Purwaraja Klampok	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan	100%	205,000,000	

			pemerintah an desa					n pemerintah an desa			
7.01. 06.2. 01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Purwar eja Klamp ok	Terlaksana nya Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa n Pemerintah an Desa	100%	286,250,000	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Purwar eja Klampok	Terlaksana nya Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa n Pemerinta han Desa	100%	205,000,000	
7.01. 06.2. 01.0 1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Purwar eja Klampok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 dokumen	20,000,000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Purwar eja Klampok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusuna n Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 dokume n	20,000,000	
7.01. 06.2. 01.0 2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Purwar eja Klampok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Adminstras	4 dokumen	56,250,000	Fasilitasi administrasi pemerintahan desa	Kec. Purwar eja Klampok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Adminstras	4 dokume n	25,000,000	

			i Tata Pemerintah an Desa					i Tata Pemerintah an Desa			
7.01. 06.2. 01.0 3	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 dokumen	15,000,000	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 dokume n	15,000,000	
7.01. 06.2. 01.0 4	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pemilihan kepala desa	1 dokumen	25,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pemilihan kepala desa	1 dokume n	25,000,000	
7.01. 06.2. 01.0 9	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaa n Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	20,000,000	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen Sinkronisas i Perencanaa n Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokume n	20,000,000	

7.01. 06.2. 01.1 1	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	20,000,000	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokume n	35,000,000	
7.01. 06.2. 01.1 6	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaa n Pemberdaya an Masyarakat Desa	3 dokumen	50,000,000	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaa n Pemberdaya an Masyarakat Desa	3 dokume n	25,000,000	
7.01. 06.2. 01.1 7	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 laporan	80,000,000	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec. Purwaraja Klampok	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampin gan Desa di Wilayahnya	2 laporan	40,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Tujuan
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Sirkandi	1 ls	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)	Kaliwinasuh	1 unit	200.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
3	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Kalilandak	730 m	185.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
4	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pendidikan: Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/Taman	Pagak	1 unit	100.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

	Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/TPQ/Madrasah Non Formal)				
5	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan Jembatan Milik Desa)	Kaliwinasuh	1 unit	150.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
6	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Kaliwinasuh	300 m	200.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
7	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Kaliwinasuh	300 m	200.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
8	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Kaliwinasuh	300 m	100.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
9	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Kaliwinasuh	300 m	100.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
10	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Kalimandi	340 m	177.500.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

11	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan		850 m	180.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
12	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Purwareja		180.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
13	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Kaliwinasuh	300 m	177.500.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
14	Pembangunan Puskesmas (Pengadaan Tanah)	Sirkandi	2.000 m	3.000.000.000	Dinas Kesehatan
15	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Pagak	1 ls	25.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Kalilandak	1 ls	25.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17	Pemeliharaan Jalan Kabupaten (Selamerta = 1500m, Sirkandi = 2000 m)	Sirkandi	3.500 m	2.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten	Kalimandi	1.600 m	950.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	Pagak	8x7 m	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Klampok	250 m	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten	Purwareja	100 m3	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

22	Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	Kaliwinasuh	2 unit	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten	Pagak	6x4 m	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Jalan Kabupaten	Klampok	500 m	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Kaliwinasuh	1.000 m	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kalimandi	10 unit	600.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sirkandi	1 ls	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
29	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kalilandak	1 ls	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
30	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kalimandi	1 ls	500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Pagak	50 titik	1.000.000.000	Dinas Perhubungan
32	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Kalilandak	20 titik	400.000.000	Dinas Perhubungan

34	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Sirkandi	50 m	50.000.000	Dinas Perhubungan
35	Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan	Kaliwinasuh	1 ls	100.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
36	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kecitran	100 m	100.000.000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
37	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kecitran	300 m	100.000.000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
38	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kaliwinasuh	350 m	500.000.000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
39	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Kalilandak	75 unit	1.500.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
40	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Sirkandi	100 unit	2.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
41	Bantuan Sosial Penanganan RTLH	Kaliwinasuh	75 unit	1.500.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Penegakan hukum nasional;
 - c. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
 - d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, untuk kecamatan adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 17 sub kegiatan.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada 1)Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Dengan 3 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan 2)Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen RPD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, Visi yang diusung adalah Kabupaten Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian dan Misi dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Purwareja Klampok sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah **Misi Ketiga** yaitu :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan RENSTRA Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2023-2026. Kecamatan Purwareja Klampok menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Purwareja Klampok dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2023-2026.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Terlampir

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan

Sebagai berikut :

Pertama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan dengan 6 Kegiatan: antara lain 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah 2 (dua) Sub Kegiatan 2)Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tiga sub Kegiatan antara lain Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD; 3)Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 3 Sub Kegiatan 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 Sub Kegiatan 5)Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 5 Sub Kegiatan 6)Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 Sub Kegiatan. Kedua Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan 3 Sub Kegiatan dan Kegiatan Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan 1 sub kegiatan. Ketiga Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan 1 Sub Kegiatan. Keempat Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan satu Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

dengan 1 Sub Kegiatan. Kelima Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 Kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 7 Sub Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2022-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Juli 2023

CAMAT PURWAREJA KLAMPOK

Drs. SUSANTO
Pembina Tk.I
NIP. 19731219 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**RANCANGAN
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

**KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Awal Renja tersebut berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, Renstra Kecamatan Susukan Tahun 2023-2026, dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara, 31 Juli 2023

CAMAT SUSUKAN

SUROSO, S.STP,M.Si

Pembina

NIP. 19840904 200312 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	33
3.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB V PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dan Pencapaian Renstra Kecamatan Susukan Kabupaten BANJARNEGARA Tahun 2022.....	hal 15
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	hal 27
Tabel 2.4	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamtan Susukan.....	hal 29
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	hal 30
Tabel 1.3	Rencana Program dan Kegiatan tahun 2024.....	hal 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat

daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan, dan 19 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.803.853.384-, dengan fokus utama sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dengan fokus utama sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi :

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;

2. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
4. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
6. Masih terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;

Dari 4 program, 8 kegiatan, dan 19 sub kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan, dan 19 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.803.853.384,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.803.853.384,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka masih banyak yang harus di perhatikan dan ditingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan indikator kinerja.

Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Koordinasi yang baik antara masing – masing Kasi dan Kasubag
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan
3. Adanya anggaran yang mendukung kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d Tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN									
		Nilai SKM		100%	84	8,30	100%	86	86	100%
		Nilai SAKIP		C	B	C		CC	CC	
	Urusan Perencanaan									
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan		100%	7 dok	7 dok	100%	7dok	7 dok	100%

[illegible]

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi		100%	2 Paket	2 paket	100 %	2 Paket	2 paket	100%
	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi		100%	13 Paket	11 Paket	81 %	12 Paket	12 paket	100%
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi		100%	3 paket	3 paket	100%	2 Pake	2 paket	100%
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang terbayarkan		100%	3 org	3 org	100%	3 orang	3 orang	1000%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur								
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		100%	6 unit	6 unit	100%	7 Unit	7 unit	100%

	operasional atau lapangan									
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan uala yang terpelihara		100%	1 unit	1 unit	100%	2 unit	2 Unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara		100%	2 paket	2 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat								
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani	100%	-	4 paket	4 paket	100%	2000 pemohon	2000 pemohon	100%

s.d.
Tahun
2022*
Kabupaten
Banjarne
gara

	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peizinan	Jumlah pengelola operator siak yang terbayarkan	2 orang	--	2 orang	2 orang	100%	2 orang	2 orang	100%
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pengelola SPPT PBB tersalurkan	100%		3000 pemohon	100%	100%	36783 Lbr	36783 lbr	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan								
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di	Jumlah pelaksanaan tugas forkompimca		100%	4 kegiatan/ Dokumen	4 kegiatan/ dokumen	100%	1 tahun	1 tahun	1 tahun

	Kecamatan									
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa								
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan desa		100%	15 Desa	15 desa	100%	15 Desa	15 Desa	100%

	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa								
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pembinaan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa		15 Desa	15 Dea	15 desa	100%	15 Desa	15 Desa	100%
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pembinaan trantibum		15 Desa	15 Dea	15 desa	100%	15 Desa	15 Desa	100%
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah pembinaan penyusunan program PMD		15 deea	15 Dea	15 desa	100%	15 Desa	15 Desa	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 2 Indikator, yaitu Nilai IKM, Nilai SAKIP. Dari 2 indikator tersebut berstatus 1 tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang diinginkan sesuai dengan rencana kerja
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

Kegagalan capaian 1 indek kinerja yaitu penilaian SAKIP tersebut disebabkan antara lain :

- a. Kurangnya data yang valid dan akuntabel.
- b. Belum terpenuhinya materi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai ketentuan;
- c. Sosialisasi dan pendampingan dalam penilaian SAKIP yang masih kurang dari instansi pengampu.
- d. Kapasitas SDM dan pemahaman yang masih terbatas dalam penyusunan dokumen perangkat daerah.
- e. Adanya rasionalisasi anggaran dan pandemic covid 19.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran 2 (dua) pada indikator nilai Indeks penilaian SAKIP :

- a. Dokumen Renstra 2017 – 2022 belum memuat tujuan yang ditetapkan dengan dilengkapi indikator, tujuan yang disertai target keberhasilan, kinerja sasaran dan target tahunan belum tersajikan;
- b. Output dan *outcome* yang dilaporkan belum menyajikan capaian target secara penuh dengan perbandingan tahun sebelumnya dan informasi yang disajikan belum dapat diandalkan .
- c. Belum melakukan reviu Renstra

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target tahun selanjutnya antara lain adalah : yang telah dilakukan untuk pencapaian target selanjutnya adalah dengan lebih teliti lagi dalam menyandingkan data.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

[illegible]

2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan Kewilayahan yaitu Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya kesadaran aparaturnya pemerintah Desa dalam melakukan implementasi program bidang kesra, PMD dan Pemerintahan.
2. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah Kecamatan.
3. Masih rendahnya kesadaran aparaturnya pemerintah Desa dalam mengerjakan buku-buku Administrasi Desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di desa masing-masing.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurangnya pemahaman perangkat pemerintah desa tentang administrasi kependudukan dan regulasi yang ada terkait pemerintahan desa.
2. Lemahnya pelayanan di pemerintah desa karena kurangnya pemahaman perangkat desa tentang penatausahaan keuangan desa dan aturan lainnya.

3. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Tuntutan masyarakat dalam pelayanan yang cepat dan prima dan menuju profesionalisme kerja ASN / Perangkat desa.
2. Wacana kemandirian desa dan tuntutan adanya inovasi dan system aplikasi program dan kegiatan di desa.
3. Adanya tenaga pendampingan di desa – desa guna mencapai pembangunan desa yang lebih baik.
4. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana dan prasarana umum serta pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Penyesuaian anggaran di pemerintah daerah sebagai tidak lanjut kebijakan pusat.

2. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas, belum meratanya fasilitas laptop bagi pelaksana dan pejabat struktural, printer, LCD, lemari file, CCTV.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu serta tidak adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak yang tidak langsung menyetorkan pembayaran pajak dari masyarakat ke bank.
4. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai yang ada di Kecamatan Susukan sehingga pengoptimalan tugas dan fungsi aparatur pemerintah kurang bisa tercapai sehingga menyebabkan kelambanan birokrasi.
5. Kurangnya pagu anggaran di tahun berjalan sehingga tidak semua program kegiatan bisa dilaksanakan secara 100% dan target yang ditentukan juga tidak tercapai 100%.

2.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, anggaran belanja yang dialokasikan untuk Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara diusulkan sebesar Rp 2.250.000.000,- yang terbagi dalam 6 program 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan mulai Tahun 2024. Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program kegiatan dan sub kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 2.250.085.770)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 2.250.000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kecamatan Susukan				2.250.085.770						
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Susukan	Nilai SKM	85							
			Nilai SAKIP	B							
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Susukan	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	100 %	4.510.000					4.510.000	

a.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Susukan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	3.250.000		Kec. Susukan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	3.250.000	
b.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	1.260.000		Kec. Susukan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	1.260.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.759.999.554					1.762.604.900	
a.	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Kec. Susukan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	11 ASN	1.704.978.554	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Kec. Susukan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	11 ASN	1.704.978.700	

								ASN			
b.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Susukan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dok	47.265.400	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Susukan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dok	49.870.600	
c.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kec. Susukan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 laporan	7.755.600	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kec. Susukan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	7 laporan	7.755.600	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Susukan	Persentase administrasi umum perangkat daerah							98.514.900	
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Susukan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	10.734.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Susukan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	9.800.800	
b.	Penyedia bahan logistik kantor	Kec. Susuk	Jumlah paket bahan logistik	11 Paket	85.223.200	Penyedia bahan	Kec. Susuk	Jumlah paket bahan logistik	11 Paket	88.714.100	

		an	kantor yang disediakan			logistik kantor	an	kantor yang disediakan			
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Susukan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Kec. Susukan			44.000.000	
a.	Pengadaan Mebel	Kec. Susukan	Jumlah paket mebel yang disediakan	50 Unit	35.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Susukan	Jumlah paket mebel yang disediakan	50 Unit	35.000.000	
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Susukan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	9.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Susukan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	9.000.000	
5.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Susukan	Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		61.492.416		Kec. Susukan			61.720.800	
a.	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Susukan	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	8.400.000	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Susukan	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	8.400.000	
b.	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Kec. Susukan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	12 Laporan	53.092.416	Penyedia jasa pelayanan	Kec. Susukan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan	12 Laporan	53.320.800	

			disediakan			umum kantor		umum kantor yang disediakan			
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Susukan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur				Kec. Susukan			27.700.500	
a.	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Susukan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	10.401.900	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Susukan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	15.454.300	
b.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Susukan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	11.440.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Susukan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 Unit	12.246.200	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN		Persentase Terlaksananya Penyelenggar		144.000.500					132.665.500	

	PUBLIK		aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
1.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Susukan									
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	18.984.200	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	18.984.200	
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				125.016.300					113.681.300	
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Susukan	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	1 lap	7.670.000	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan	Kec. Susukan	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	1 lap	7.670.000	

						Perizinan Non Usaha					
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Susukan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan Pemerintahan	12 Laporan	14.349.800	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Susukan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan Pemerintahan	12 Laporan	14.349.800	
c.	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Susukan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 dok	102.995.900	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Susukan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 Laporan	91.660.900	
C.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1.500.000					1.500.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1.500.000					1.500.000	
	Harmobisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Susukan	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan	1 Laporan	1.500.000	Harmobisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	Kec. Susukan	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan	1 Laporan	1.500.000	

			dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Tokoh Masyarakat		dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
D.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlaksana		11.171.800		Kec. Susukan			11.171.800	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				11.171.800					11.171.800	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	15 lembaga kemasyarakatan	11.171.800		Kec. Susukan		15 lembaga kemasyarakatan	11.171.800	
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		18.500.000		Kec. Susukan			18.500.000	
F.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terlaksananya Tugas Forum kordinasi Pimpinan di Kecamatan		18.500.000		Kec. Susukan			18.500.000	
a.	Pelaksanaan tugas forum koordinasi	Kec. Susuk	Jumlah dokumen	15	18.500.000	Pelaksanaan tugas forum	Kec. Susuk	Jumlah dokumen	15 Dokume	18.500.000	

	pimpinan di Kecamatan	an	tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Dokumen		koordinasi pimpinan di Kecamatan	an	tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan 4 Kali	n		
G.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa								
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Susukan			87.111.600					87.111.600	
a.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	3.402.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Kecamatan Susukan)	Kec. Susukan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	15 Dokumen	3.402.000	
b.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen yang difasilitasi	4 Dokumen	2.171.800	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen yang difasilitasi	15 Dokumen	2.171.800	

			dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa			(Kecamatan Susukan)		dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa			
c.	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan penfdayagunaan asset desa	2 Dokumen	2.263.800	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan penfdayagunaan asset desa	15 Dokumen	2.263.800	
d.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	50.000.000	
e.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	1 Dokumen	1.950.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Susukan	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	15 Dokumen	1.950.000	

[illegible]

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Tersedianya sumber Anggaran untuk membiayai Program dan Kegiatan.
2. Adanya Sumber daya Manusia yang Profesional

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel .2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catat an
1	Pembangunan /Rehabilitasi/Pe ngkatan/Pengeras an Jalan Desa	Desa Dermas ari	Pembang unan /Rehabili tasi/Pe ngkatan/ Pengeras an Jalan Desa terlaksan a	450.000.000	
2	Pembangunan /Rehabilitasi/Pe ngkatan/Pengeras an Jalan Desa	Desa Dermas ari	Pembang unan /Rehabili tasi/Pe ngkatan/ Pengeras an Jalan Desa terlaksan a	450.000.000	
3	Pembangunan /Rehabilitasi/Pe ngkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Kemran gon	Pembang unan /Rehabilit asi/Pe ngkatan/P engerasa n Jalan Desa Terlaksa	450.000.000	

			na		
4	Pembangunan /Rehabilitasi/ Penin gkatan/ Pengerasan Jalan Desa	Desa Kemran ggon	Pembang unan /Rehabilit asi/ Penin gkatan/ P engerasa n Jalan Desa Terlaksa na	500.000.000	
5	Pembangunan /Rehabilitasi/ Penin gkatan/ Pengerasan Jalan Desa	Desa Kedawu ng	Pembang unan /Rehabilit asi/ Penin gkatan/ P engerasa n Jalan Desa Terlaksa na	450.000.000	
6	Pembangunan /Rehabilitasi/ Penin gkatan/ Pengerasan Jalan Desa	Desa Kedawu ng	Pembang unan /Rehabilit asi/ Penin gkatan/ P engerasa n Jalan Desa Terlaksa na	450.000.000	
7	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Berta	Pemelihar aan/reha bilitasi jalan desa yang terlaksan a	450.000.000	
8	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK)	Desa Piasa Wetan	Banyakn ya UMKM yang belum memiliki manajem en yan baik	200.000.000	
9	Pembangunan/ Reh abilitasi/ Peningkat an Pengerasan Jalan Desa	Desa Gumele m Wetan	Pembang unan/ Pen ingkatan Pengerasa n Jalan Desa yang terlaksan a	400.000.000	
10	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Desa Karang	Pelatihan Berbasis	200.000.000	

		salam	Masyarak at yang terlaksan a		

2 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024 serta sebagai bagian dari dukungan terhadap pencapaian target RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 maupun RKP Tahun 2024.

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Penegakan hukum nasional;
 - c. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
 - d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, untuk kecamatan adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 13 sub kegiatan.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Dengan 4 sub kegiatan yaitu

1. Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan

Lain yang Dilimpahkan.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdiri dari 1 kegiatan yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dan kegiatan ini memiliki 1 fokus sub kegiatan yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

e. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan kegiatan ini memiliki 1 fokus sub kegiatan yaitu harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 8 sub kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa
2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa
3. Fasilitasi pengelolaan Keuangan desa Dan peendayagunaan Aset desa
4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan desa
5. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
6. Fasilitasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
7. Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
8. Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah “**BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA**”

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. **Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;**
3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar;
4. **Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;**
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Susukan mempunyai peran dan fungsi menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa

datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Susukan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah **Misi Kedua dan Keempat** yaitu :

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;

Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan *good and clean goverment*. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam *good and clean goverment*, diharapkan melalui misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, dan lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023-2026 dan RENSTRA Kecamatan Susukan Tahun 2023-2026.

Kecamatan Susukan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Susukan dalam tujuan organisasi pada tahun 2023-2026.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan.

3.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Susukan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Susukan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Pro gram	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolo k Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN													
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.999.051.100					
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4.510.000					
7	1	1	2.0 1	1	Penyusun an Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an Yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kec. Susukan	100 %	8doku men	1 Tahun	3.250..000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Ters usun nya doku men pere ncan aan	100%	3.250.000

7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kec. Susukan	100 %	5 dokum en	1 tahun	1.260.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	1.260.000
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.762.604.900					
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gaji ASN yang terbayar	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kec. Susukan		11 ASN	1 tahun	1.704.978.700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	1.704.978.70 0
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaa n Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksana penatausa haan keuangan yang terbayarka n	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kec. Susukan		12 dok		49.870.600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	49.870.600
7	1	1	2.0 2	3	Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Smesteran SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan bulanan/t ribulanan /semester an yang tersusun	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kec. Susukan		4 lap		7.755.600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	7.755.600
7	1	1	2.0 6		Administrasi umum Perangkat Daerah								98.514.900					

7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kec. Susukan		1 paket		9.800.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	9.800.800
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kec. Susukan		11 paket		88.714.100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	88.714.100
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								44.000.000					
7	1	01	207	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Susukan		50 unit		35.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35.000.000
7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Susukan		1 unit		9.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.000.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61.720.800				61.720.800	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan	Kec. Susukan		12 lap		8.400.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	8.400.000

							a air, listrik yang terpenuhi	perangkat daerah										
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga administra si perkantora n	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kec. Susukan		12 lap		53.320.800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			53.320.800
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							27.700.500					27.700.500	
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas/ope rasional yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Kec. Susukan		15.454 .300		15.454.300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	11.000.000
7	1	1	2.0 9	10	Pemelihara an/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Kec. Susukan		12.246 .200		12.246.200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	10.000.000
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							132.665.500					132.665.500	

7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													
7	1	2	2.3	1	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang terlaksana	Jumlah bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Susukan		18.984.200		18.984.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18.984.200
7	1	2	2.0 4	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat			Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Susukan		113.681.300		113.681.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			113.681.300
7	1	2	2.0 4	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanana perizinan Non-usaha	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan perizinan Non-usaha yang terlayani	Jumlah bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Susukan		7.670.600		7.670.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.670.600

7	1	2	2.04	3	Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an yang terkait dengan Nont- perizinan	Cakupan Penyelengga raan Pemrintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah pengelola operator siak yang terbayarka n		Kec. Susukan		14.3 49.8 00		14.349.800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			14.349.800
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an yang terkait dengan Kewenanga n Lain yang Dilimpahka n	Cakupan Penyelengga raan Pemrintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah pengelola SPPT PBB yang tersalurka n		Kec. Susukan		91.6 60.9 00		91.660.900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	91.660.900
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								1.500.000					1.500.000
7	01	04	201		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum								1.500.000					1.500.000
7	01	04	201	02	Harmonisa si hubungan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Terlaksanan ya harmonisasi hub tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksana an harmonisa si hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarak at		Kec. Susukan		1.50 0.00 0		1.500.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			

7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								11.171.800					11.171.800
7	01	03	2	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa		Kec. Susukan		11.171.800		11.171.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11.171.800
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								18.500.000					18.500.000
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								18.500.000					18.500.000
7	1	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pelaksanaan tugas forkompinca	Jumlah bulan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Susukan		18.500.000		18.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18.500.000
7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								87.111.600					37.111.600
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								87.111.600					37.111.600

7	1	06	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Kec. Susukan		3.402.000		3.402.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.402.000
7	1	06	2.01	09	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa tertib administrasi pemerintahan desa yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Susukan		2.171.800		2.171.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.171.800
7	1	06	201		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Prosentase pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kec. Susukan		50.000.000		50.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	01	06	201	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa		Kec. Susukan		2.263.800		2.263.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.263.800

7	01	06	201	11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Kec. Susukan		3.702.000		3.702.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.702.000
7	1	06	2.01	11	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan an Desa	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Susukan		1.950.000		1.950.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.950.000
7	1	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah Desa tertib Penyusunan Program dan Pelaksanaaan Pemberdayaan Masyarakat desa yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Susukan		14.520.000		14.520.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14.520.000

7	1	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pendampingan desa yang terlaksana yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Susukan		9.102.000		9.102.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.102.000
											2.250.000.000	TOTAL	2.250.000.000					2.200.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan sebagai berikut :

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 kegiatan yang diarahkan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 13 sub kegiatan;

f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum Dengan total 4 sub kegiatan.

g. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdiri dari 1 kegiatan yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dan kegiatan ini memiliki 1 fokus sub kegiatan yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa.

h. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan kegiatan ini memiliki 1 fokus sub kegiatan yaitu harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

i. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan kegiatan ini memiliki 1 fokus sub kegiatan yaitu pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dengan 8 sub kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa
2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa
3. Fasilitasi pengelolaan Keuangan desa Dan peendayagunaan Aset desa
4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan desa
5. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
6. Fasilitasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
7. Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
8. Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 31 juli 2023
CAMAT SUSUKAN

Drs. SUROSO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19840904 200312 1 001

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MANDIRAJA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	64
BAB V PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. UU Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
29. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 Tanggal 12 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

30. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 Tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 3 program, 5 kegiatan, dan 8 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.875.495.441,- dengan fokus utama pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mandiraja selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan secara terus menerus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan optimal, bersih serta akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang ada di Kecamatan, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan tepat waktu tanpa didasari paksaan untuk membayar dalam pelunasan PBB lebih awal.

3. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dari 3 program, 5 kegiatan, dan 8 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 3 program, 5 kegiatan, dan 8 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.875.495.441-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 3 program, 5 kegiatan, dan 8 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.949.915.706,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/sub kegiatan yang bertambah meliputi : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kegiatan Administrasi Umum, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya data yang berubah dari baku awal jumlah yang diterima dari BPPKAD namun setelah dilakukan penelitian oleh petugas tim intensifikasi ada beberapa SPT yang ganda atau berubah;
2. Ada beberapa pemungut Pajak di desa tidak segera menyetorkan uang pelunasan SPPT PBB yang sudah diterima dari wajib Pajak ke petugas koordinator ditingkat desa atau kecamatan dan juga dapat disetor langsung ke Kas Daerah Bank Jateng.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah nihil/tidak ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya perencanaan dan penyelarasan target kinerja dan penganggaran kegiatan yang baik;
2. Pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya;
3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparat kecamatan;
4. Dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Desa
5. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada dasarnya semua Program dan Kegiatan pada tahun 2022 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, akan tetapi masih ada yang harus diperhatikan dan ditingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan indikator kinerja. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2022;

2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan;
3. Efisiensi alokasi belanja
4. Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum terlaksana di Tahun 2022

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

	Umum Perangkat Daerah	pelayanan administrasi umum perangkat daerah								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terpenuhi		1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi		1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi		2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan		4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%

		Lainnya yang terpenuhi								
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeler yang terpenuhi		8 unit	8 unit	8 unit	100%	8 unit	8 unit	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi		7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang terpenuhi		7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpenuhi		5 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air		12 bulan			100%			100%

		dan listrik yang terpenuhi								
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran yang terpenuhi		3 orang	3 orang	3 orang		3 orang	3 orang	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan uala yang terpelihara		3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara		5 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	5 paket	100%

[illegible]

	AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Presentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terpenuhi		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokume n	1 dokumen	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi penyusunan	Jumlah Fasilitasi		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%

	peraturan desa dan peraturan kepala desa	penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang terpenuhi								
	Fasilitasi administrasi pemerintahan desa	Jumlah Fasilitasi administrasi pemerintahan desa yang terpenuhi		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang terpenuhi		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terpenuhi		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan	Jumlah Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%

	daerah dengan pembangunan desa	daerah dengan pembangunan desa yang terpenuhi								
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Jumlah Fasilitasi penyelenggaraa n ketentraman dan keteriban umum yang terpenuhi		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%
	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang terpenuhi		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya yang terpenuhi		16 desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 Indikator, yaitu Nilai IKM, Nilai SAKIP, dan Presentase Realisasi SPPT PBB. Dari 3 indikator tersebut, 2 berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang diinginkan sesuai dengan rencana kerja
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Belum Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
2. Belum maksimal dalam menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
3. Adanya kebijakan pemerintah kabupaten tentang penarikan wewenang perijinan non usaha khususnya IUMK, IMB dan Ho;
4. Pelayanan KK dan KTP terkadang membutuhkan waktu yang agak lama, hal ini terkait dengan jaringan internet yang terkadang mengalami kendala dan pelayanan di sebenarnya sudah baik, namun demikian masyarakat berharap untuk lebih ditingkatkan lagi;
5. Adanya perubahan mekanisme pelayanan Kependudukan dari Kantor Kecamatan ke Kantor Desa

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Menyesuaian serta merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat;

4. Menemukan dan mengenali kelemahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan upaya-upaya perbaikan

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai IKM		-	84,35	84,36	84,37	84,38	80,53	80,58	84,35	84,36	
2	Nilai SAKIP		-	B	B	B	B	CC	CC	B	B	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam satu urusan, yaitu Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup beberapa urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.
4. Sarana prasarana yang belum memadai untuk pelayanan administrasi dan kependudukan;
5. Sarana prasarana dan gedung kantor dengan kondisi yang kurang memadai/ layak;
6. Beberapa program/ kegiatan dilaksanakan oleh OPD langsung ke desa dan kurang koordinasi dengan kecamatan;

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Rendahnya Mutu Pelayanan Publik
4. Rendahnya Tata Kelola Administrasi
5. Belum optimalnya hasil pekerjaan
6. Belum optimalnya Pendampingan Desa

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Masih kurangnya jumlah aparatur kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
2. Masih kurangnya sumber dana pendukung kerja dan ketersediaan sarana dan prasarana .
3. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana prasarana umum dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut :

1. Tentang Kebijakan dari Pemerintah Pusat Maupun Daerah
2. Terkait Peralihan Anggaran untuk Penanggulangan Covid-19

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Terpenuhi Gaji dan tunjangan ASN, PTT dan THL;
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan di Kecamatan Mandiraja;

3. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Mandiraja;
4. Meningkatnya peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN / KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN / KOTA					
	<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					<i>Kegiatan Perencanaa n Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
	Sub.Kegiata n Penyusunan Dokumen Perangkat daerah	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen yang tersusun	8 dok	1.699.900	Sub.Kegiata n Penyusuna n Dokumen Perangkat daerah	Kec. Mandiraja	Jumlah dokumen yang tersusun	8 dok	1.676.100	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun	7 dok	1.795.600	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun	7 dok	1.475.600	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mandiraja	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	14 Orang	1.834.696.316	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mandiraja	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	14 Orang	1.834.696.350	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan	Kec. Mandiraja	Jumlah Pejabat Pengelola	9 Orang	40.860.000	Sub Kegiatan Pelaksanaa	Kec. Mandiraja	Jumlah Pejabat Pengelola	9 Orang	45.660.000	

	penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		a Keuangan SKPD			n penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		a Keuangan SKPD			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun	7 Dok	1.048.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Mandiraja	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun	7 Dok	1.048.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Kec. Mandiraja	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/P	1 Paket	5.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Kec. Mandiraja			312.500	

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		enerangan Bangunan Kantor			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mandiraja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		5.499.300	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mandiraja			5.499.300	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mandiraja	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		147.507.800	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mandiraja			142.187.600	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					

	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mandiraja			100.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mandiraja			68.082.710	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel				13.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel				0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mandiraja			30.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mandiraja			0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Mandiraja			4.710.000	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Mandiraja			0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan	Kec. Mandiraja			35.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan	Kec. Mandiraja			0	

	Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Mandiraja			19.844.800	Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Mandiraja			0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Kec. Mandiraja			17.244.860	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Kec. Mandiraja			17.000.000	

	air dan listrik					daya air dan listrik					
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec. Mandiraja			91.153.540	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec. Mandiraja			91.153.540	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan	Kec. Mandiraja			19.720.200	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan	Kec. Mandiraja			19.720.200	

	perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Sub Kegiatan Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mandiraja				Sub Kegiatan Pemeliharaa n/Rehabilit asi Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mandiraja				
	Sub Kegiatan Pemeliharaa n /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mandiraja			33.428.600	Sub Kegiatan Pemeliharaa n /Rehabilita si Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mandiraja			24.727.900	
	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINTA HAN DAN					PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN					

	PELAYANAN PUBLIK					PELAYANA N PUBLIK					
	<i>Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an yang Dilimpahka n kepada Camat</i>					<i>Pelaksana an Urusan Pemerintah an yang Dilimpahk an kepada Camat</i>					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintah an yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha	Kec. Mandiraja			9.700.000	Sub Kegiatan Pelaksanaa n urusan Pemerintah an yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha	Kec. Mandiraja			9.350.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintah an yang terkait dengan Non perijinan	Kec. Mandiraja			1.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaa n urusan pemerintah an yang terkait dengan perijinan non usaha	Kec. Mandiraja			620.000	

	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Mandiraja			109.367.900	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Mandiraja			109.367.900	
	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					
	Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau	Kec. Mandiraja			5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau	Kec. Mandiraja			5.000.000	

	Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum	Kec. Mandiraja			3.917.800	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat	Kec. Mandiraja			3.917.800	

	musyawarah perencanaan pembangunan di Desa					dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>					<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan	Kec. Mandiraja			12.101.500	Sub Kegiatan Pelaksanaa	Kec. Mandiraja			12.101.500	

	tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan					n tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>					<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>					
	Sub Kegiatan Fasilitasi	Kec. Mandiraja			1.781.500	Sub Kegiatan Fasilitasi	Kec. Mandiraja			1.781.500	

	penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					
	Sub Kegiatan Fasilitas administrasi pemerintahan desa	Kec. Mandiraja			1.335.400	Sub Kegiatan Fasilitas administrasi pemerintahan desa	Kec. Mandiraja			1.335.400	
	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Mandiraja			1.435.000	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Mandiraja			1.435.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Mandiraja			75.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Mandiraja			75.000.000	

	Sub Kegiatan Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec. Mandiraja			5.421.800	Sub Kegiatan Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec. Mandiraja			5.421.800	
	Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Kec. Mandiraja			3.384.600	Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Kec. Mandiraja			3.384.600	
	Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan program pelaksanaan pemberdaya	Kec. Mandiraja			1.630.400	Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan program pelaksanaa	Kec. Mandiraja			1.630.400	

	an masyarakat desa					pemberdaya an masyarakat desa					
	Sub Kegiatan Koordinasi pendamping an desa di wilayahnya	Kec. Mandiraja			47.714.300	Sub Kegiatan Koordinasi pendamping an desa di wilayahnya	Kec. Mandiraja			47.714.300	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

Memprioritaskan Kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Usulan Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi (Desa)	Volume	Pagu
1.	Rehab Aspal Rt 03 Rw 02 perbatasan Panggisari	Somawangi		135.000.000
2.	Peningkatan jalan RT 03 RW 04	Kebanaran		149.000.000
3.	Peningkatan jalan perbatasan Glempang Salamerta	Glempang		135.000.000

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Usulan Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi (Desa)	Besaran/ Volume	Pagu	Perangkat daerah
1.	Pemangunan Jembatan Permanen Kalisapi Penghubung menuju Kadus 4 & Desa Jalatunda	Somawangi	2 Meter	3.000.000.000	APBN
2.	Jambanisasi	Kaliwungu	200 Unit	400.000.000	DPUPR
3.	Sarana Air Bersih/Pamsimas Wil. Dusun Siteki	Kaliwungu	1 paket	400.000.000	DPKPLH
4.	Pembangunan Jambanisasi	Somawangi	100 Unit	350.000.000	APBD
5.	Rehabilitasi RLTH	Kaliwungu	50 Unit	1.000.000.000	DPKPLH
6.	Jambanisasi	Salamerta	50 Unit	200.000.000	Dinkes
7.	Pembangunan Jamban Komunal	Simbang	1 Keg	1.500.000,000	APBD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Renana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan prioritas Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing :
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kependudukan.
 - d. Peningkatan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda
 - f. Pengentasan kemiskinan, dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan public, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Penegakan hukum nasional;
 - c. Reformasi birokrasi dan tata Kelola; dan
 - d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

2.2.1 Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara adalah meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

2.2.2 Sasaran

Merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin di capai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga tercapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan.

1.3. Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN MANDIRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	KECAMATAN MANDIRAJA								2.531.000.000		
	UNSUR KEWILAYAHAN								2.282.939.800		
	KECAMATAN								2.282.939.800		
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah/kota		100%	Kec. Mandiraja	100%			2.282.939.800	DAU	

07.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah		100%	Kec. Mandiraja	100%			3.151.700	DAU	
07.01.01.2.01.001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	Kec. Mandiraja		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	1.676.100	DAU	
07.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	Kec. Mandiraja		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	1.475.600	DAU	

07.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kec. Mandiraja				1.881.104.350	DAU	
07.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	Kec. Mandiraja		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.834.696.350	DAU	
07.01.01.2.02.003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 orang	Kec. Mandiraja		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 orang	45.360.000	DAU	
07.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 laporan	Kec. Mandiraja		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 laporan	1.048.000	DAU	

07.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kec. Mandiraja				147.999.400		
07.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kec. Mandiraja		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	312.500	DAU	
07.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kec. Mandiraja		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.499.300	DAU	
07.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	Kec. Mandiraja		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	142.187.600	DAU	
07.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kec. Mandiraja				68.082.710	DAU	
07.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	Kec. Mandiraja		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	DAU	

07.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	Kec. Mandiraja		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	0	DAU	
07.01.01.2.07.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	Kec. Mandiraja		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	DAU	
07.01.01.2.07.009	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	Kec. Mandiraja		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	68.072.710	DAU	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 paket	Kec. Mandiraja		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 paket	0	DAU	
07.01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 paket	Kec. Mandiraja		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 paket	0	DAU	

07.01.01.2.08	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kec. Mandiraja				108.153.540	DAU	
07.01.01.2.08.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	Kec. Mandiraja		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	17.000.000	DAU	
07.01.01.2.08.004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	Kec. Mandiraja		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	91.153.540	DAU	
07.01.01.2.09	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kec. Mandiraja				44.448.100	DAU	

07.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	Kec. Mandiraja		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	19.720.200	DAU	
07.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	Kec. Mandiraja		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	0	DAU	
07.01.01.2.09.010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 paket	Kec. Mandiraja		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 paket	24.727.900	DAU	

07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kec. Mandiraja	100%			124.337.900	DAU	
07.01.02.2.03	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			Kec. Mandiraja				5.000.000	DAU	
07.01.02.2.03.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Urusan Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang sudah Teraksana		Kec. Mandiraja				5.000.000	DAU	
07.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat</i>	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat			Kec. Mandiraja				119.337.900	DAU	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 dokumen	Kec. Mandiraja		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 dokumen	9.350.000	DAU	

	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	Kec. Mandiraja		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	620.000	DAU	
07.01.02.2.04.003	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	Kec. Mandiraja		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	109.367.900	DAU	
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			Kec. Mandiraja	100%			3.917.800	DAU	
07.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Kec. Mandiraja				3.917.800	DAU	
07.01.03.2.01.001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	10 lembaga kemasyarakatan	Kec. Mandiraja		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	10 lembaga kemasyarakatan	3.917.800	DAU	

			Pembangunan di Desa				Pembangunan di Desa				
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum			Kec. Mandiraja	100%			12.101.500	DAU	
07.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Kec. Mandiraja				12.101.5000	DAU	
07.01.05.2.01.008	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	Kec. Mandiraja		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	12.101.500	DAU	
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			Kec. Mandiraja	100%			137.703.000	DAU	
07.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Kec. Mandiraja				137.703.000	DAU	

07.01.06.2.01.001	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kec. Mandiraja		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		1.781.500	DAU	
07.01.06.2.01.002	Fasilitasi administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 dokumen	Kec. Mandiraja		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 dokumen	1.335.400	DAU	
07.01.06.2.01.003	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	Kec. Mandiraja		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	1.435.000	DAU	

07.01.06.2.01.004	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	Kec. Mandiraja		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	75.000.000	DAU	
07.01.06.2.01.009	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	Kec. Mandiraja		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	5.421.800	DAU	
07.01.06.2.01.0011	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	Kec. Mandiraja		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	3.384.600	DAU	

07.01.06.2.01.016	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3 dokumen	Kec. Mandiraja		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3 dokumen	1.630.400	DAU	
07.01.06.2.01.017	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 laporan	Kec. Mandiraja		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 laporan	47.714.300	DAU	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan

Sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN / KOTA

Dengan 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 2 (dua) **Sub Kegiatan** :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3(tiga) **Sub Kegiatan** :

1. Penyaliran Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Lapangan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 3 (tiga) **Sub Kegiatan** :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 1 (satu) **Sub Kegiatan** :

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) **Sub Kegiatan** :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan :

Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan 1 (satu) **Sub Kegiatan** :

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan 3 (tiga) **Sub Kegiatan** :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan'

III.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan :

Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa dengan 1 **Sub Kegiatan** :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa.

IV.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan 1 (satu) **Sub Kegiatan** :

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

V.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan 1 (satu) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan

Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 8 (delapan) **Sub Kegiatan** :

1. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
2. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
3. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
4. Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
5. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
6. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Fasilitas Penyusunan Program Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2022-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 31 Juli 2023

CAMAT MANDIRAJA

ANANG SUTANTO, S.STP, M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA**

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA(RENJA)
KECAMATAN PURWANEGARA
TAHUN 2024**

**KECAMATAN PURWANEGARA
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2009 tentang RPJP. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang

dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;

- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan Penunjang Fungsi Kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 3 program, 6 kegiatan, dan 11 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.874.041.278,- dengan fokus utama pada bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Purwanegara selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan secara terus menerus mengambil langkah – langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan optimal, bersih serta

akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang ada di Kecamatan, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan tepat waktu tanpa didasari paksaan serta penyelewengan yang dilakukan oleh petugas pungut pajak.
3. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas (belum semua pelaksana dan pejabat struktural terpenuhi fasilitas laptop dan printer)

Dari 3 program, 6 kegiatan, dan 12 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 3 program, 7 kegiatan, dan 11 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.874.041.278,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 3 program, 7 kegiatan, dan 12 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.909.680.278,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi bahan

logistik kantor, belanja modal, pemeliharaan kendaraan roda 4, dan PBB.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan (Fasilitasi laptop untuk pelaksana administrasi dan Pejabat struktural belum merata/masih kurang).
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.
3. Kurangnya ketertiban administrasi di kecamatan yang menyebabkan adanya dokumen/STNK yang hilang sehingga tidak bisa dibayarkan pajak kendaraan dinas tersebut.
4. Adanya ASN yang pensiun sehingga anggaran gaji dan tunjangan ASN tidak semuanya terserap.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistic kantor, pengadaan sarana dan prasara pendukung Gedung kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah tidak ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya perencanaan, pelaksanaan dan monoring yang baik.
2. Komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing – masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai.
3. Menyelaraskan apa yang akan dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan.
4. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
5. Menyelaraskan hal – hal yang akan dikerjakan sesuai dengan target kinerja.
6. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

7. Melaksanakan evaluasi internal secara berkala.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada tahun 2022 perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor – aktor penyebab tersebut, diantaranya : Semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2022 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, akan tetapi masih banyak yang harus diperhatikan dan di tingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan harapan kita, indikator kinerjanya. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan terhadap masyarakat.
2. Menemukan dan mengenali kelemahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian di tindak lanjuti dengan upaya – upaya perbaikan.
3. Mendapatkan informasi kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
 s.d. Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7 +9	(11)=10/ 4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH	Nilai SKM	84	81,20	82,00	82,40	100	84,00	247,6	61,9

	KABUPATEN/KOTA									
		Nilai SAKIP	CC	C	CC	C	C	B	CC	CC
		Prosentase SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak	100%	100 %	100 %	100	100	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang	14 ASN	14 ASN	14 ASN	11 ASN		14 ASN	14 ASN	14 ASN

[illegible]

		yang terpenuhi								
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang terbayarkan	4 orang	3 orang	3 orang	4 orang	4 orang	4 orang	3 orang	3 orang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operas ional yang terpelihara	9 unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit		9 Unit	9 Unit	9 Unit
	Pemeliharaan/rehab ilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan uala yang terpelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit		2 unit	2 unit	2 unit

[illegible]

	PEMERINTAHAN DESA									
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah n desa	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100 %	13 desa		
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam penyusunan administrasi	13 desa	3 desa	10 desa	10 desa	100 %	13 desa		

		Tata Pemerintah n Desa								
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	100 %	4 desa		
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam fangka pengelolaan keuangan desa dan pendayaguna an aset desa	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100 %	2 dok		
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembanguna n daerah dengan pembanguna n desa	1 dok	1 dok	1dok	1dok	100 %	1 dok		

	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 dok	1dok	1dok	1dok	100 %	1dok		
	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyusunan program pelaksanaan PMD	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok		
	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	100%	2 lap		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 2 Indikator. Dari 2 indikator tersebut, 2 berstatus tercapai yaitu nilai IKM dan SAKIP walaupun pada prakteknya masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Mewujudkan transparansi instansi pemerintah.
2. Diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja serta pendisiplinan jam kerja sehingga bisa menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan wilayah kerja sesuai tugas, pokok dan fungsi masing – masing Aparatur Sipil Negara.
3. Dengan telah diberlakukannya uji coba e presensi bagi semua ASN akan meningkatkan kedisiplinan jam kerja ASN dan diharapkan akan menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas.
4. Diperlukannya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
5. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya di wilayah Kecamatan Purwanegara, dalam hal ini meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Diadakannya pembinaan dan pendampingan administrasi ke desa – desa yang dilakukan oleh Tim Kecamatan sesuai jadwal yang dtentukan, minimalnya 2 kali dalam 1 tahun.
2. Himbauan dari atasan kepada ASN yang ada untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya berdasarkan tupoksinya dan meminimalisir indiscipliner.
3. Melakukan himbauan di setiap kegiatan, rapat, upacara untuk mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap rencana kerja Kecamatan seperti pelunasan PBB secara tepat waktu tanpa

adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak dan mempedomani 12 etika budaya malu aparaturnya pemerintah desa sehingga aparaturnya pemerintah desa akan lebih loyal dalam bekerja sesuai tupoksinya dan tertib administrasi pemerintahan desa dan meningkatkan kedisiplinan jam kerja.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikutini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

[illegible]

Lampiran Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		Adanya ASN yang pensiun sehingga anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak terserap 100%	Memohon kebijakan kepada BKD untuk menambah ASN sesuai tupoksi	
				2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		Kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan meminimalisir penyelewengan dalam penyetoran uang pajak ke bank.	Monitoring dan evaluasi ke desa desa dengan menggalakkan program seperti pring pethuk nabung Bersama selama 1 tahun untuk membayar pajak dengan tepat waktu.	
				3. Program pembinaan dan	100%		Administrasi	Monitoring dan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					pengawasan pemerintahan desa			pemerintahan di desa yang kurang tertib serta penginventarisiran asset desa yang perlu diadakan pembenahan dan sosialisasi pentingnya asset desa.	evaluasi dana desa se kecamatan yang dilakukan secara berkala minimal 1 tahun 2 kali monev.	
				4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Memecahkan Bersama isu strategis atau permasalahan yang terjadi di kecamatan serta mencari solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak.	Adanya sosialisasi yang dilakukan secara rutin seperti sosialisasi tentang PBB dan 12 budaya malu bagi aparat desa.	

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 3 urusan, yaitu membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 4 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Kurangnya etos kerja dan kesadaran dari diri sendiri tentang kedisiplinan jam kerja serta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah.(Semoga aka nada perubahan kedisiplinan dengan adanya e-presensi dan e- kinerja).
2. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan sehingga menghambat pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan. (Belum meratanya fasilitas lapotop untuk pelaksana dan pejabat struktural yang ada di Kecamatan Purwanegara sehingga menghambat penyetoran yang sesuai dengan deadline yang ditentukan)
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu serta adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak yang tidak langsung menyetorkannya ke bank, apatisme dalam mengikuti musrenbang yang dilaksanakan baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Sumber Daya Manusia yang ada tidak semua memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi tidak relevan dengan uraian tugas dan menghambat tercapainya indikator kerja.

2. Beberapa sarana dan prasarana kelembagaan tidak dapat digunakan karena rusak ataupun karena belum memadai, dan banyak pelaksana serta pejabat struktural yang belum mendapatkan fasilitas laptop sehingga menghambat ketepatan penyeteroran data maupun laporan.
3. Kurangnya keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelayanan terhadap masyarakat serta kurang disiplinnya dalam penerapan jam kerja sehingga pelayanan langsung terhadap masyarakat secara umum belum optimal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan mendisiplinkan jam kerja ASN dengan aplikasi e-presensi dan e- kinerja sehingga pelayanan langsung terhadap masyarakat umum akan lebih optimal.
2. Menambah sarana dan prasarana yang memadai untuk fasilitasi pelaksana dan pejabat struktural yang ada di Kecamatan Purwanegara sehingga ketepatan penyeteroran data dan laporan akan lebih terwujud.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan tertib administrasi desa dengan cara pengawasan dan pendampingan langsung ke desa - desa di seluruh wilayah Kecamatan Purwanegara oleh tim kecamatan dengan anggaran yang sesuai kebutuhan.
4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat serta meningkatkan pelayanan prima tentunya dengan ramah dan sopan.
5. Tersedianya anggaran yang cukup di tahun berjalan tanpa adanya refocusing ataupun rasionalisasi sehingga semua program kegiatan yang sudah di targetkan akan tercapai 100%.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil

analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas, belum meratanya fasilitas laptop bagi pelaksana dan pejabat struktural, printer, LCD, lemari file, AC, CCTV.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu serta tidak adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak yang tidak langsung menyetorkan pembayaran pajak dari masyarakat ke bank.
3. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai yang ada di Kecamatan Purwanegara sehingga pengoptimalan tugas dan fungsi aparatur pemerintah kurang bisa tercapai sehingga menyebabkan kelambanan birokrasi.
4. Kurangnya pagu anggaran di tahun berjalan sehingga tidak semua program kegiatan bisa dilaksanakan secara 100% dan target yang ditentukan juga tidak tercapai 100%.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, anggaran belanja yang dialokasikan untuk Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara diusulkan sebesar

Rp 2.474.000.000,- yang terbagi dalam 5 program 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Hanya saja sudah direfocusing 2 kali menjadi Rp. 1.852.328.239 Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan mulai Tahun 2024. Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program kegiatan dan sub kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.474.000.000						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Purwanegara	Prosentase Ketepatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2.116.975.000		Kec. Purwanegara	Prosentase Ketepatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2.116.975.000	
	Program Penyeleng	Kecamatan	Prosentase	100%	153.749.800		Kec. Purw	Prosentase	100%	153.750.000	

	garaan Pemerinta han dan Pelayanan Publik	Purwa negara	Pelayana n Administ rasi Kependu dukan sesuai ketentua n				aneg ara	Pelayana n Administ rasi Kependu dukan sesuai ketentua n			
	Program Koordinas i Ketentram an dan Ketertiban Umum	Kec. Purwa negara	Prosentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	5.000.000		Kec. Purwaneg ara	Prosentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	5.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Purwa negara	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	19.999.800		Kec. Purwaneg ara	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	20.000.000	
	Program Pembinaa	Kecamatan	Prosentase Tertib	100%	178.275.400		Kec. Purw	Prosentase Tertib	100%	178.275.000	

[illegible]

2.4 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Purwanegara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Purwanegara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Cat ata n Pen ting	Hasil RKPD SIPD			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Pro gra m	Kelua ran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN													
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kec Purwane gara	100 %	8doku men	1 Tahun	3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersunny a dokumen perencanaan	100%	3.000.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	Kecamatan Purwane gara	100 %	14 dokumen	1 tahun	3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	3.000.000

					Kinerja SKPD		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusun										
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gaji ASN yang terbayar	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Purwane gara		11 ASN	1 tahun	1.551.701.370		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	1.551.701.370
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan penatausahaan keuangan yang terbayarkan	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Purwane gara		50 dok		43.262.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	43.262.800
7	1	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan bulanan/tribulanan/semesteran yang tersusun	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Purwane gara		8 dok		3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	3.000.000
7	1	1	2.06		Administrasi umum Perangkat Daerah													
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Purwane gara		1 paket		10.714.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	10.714.600

7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Purwane gara		8 paket		88.296.700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	88.296.700
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7	1	01	207	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwane gara		55 unit		65.509.400				55 unit	65.509.400
7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwane gara		4 unit		40.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit(3 laptop 1 genset)	40.000.000
7	1	1	207	11	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kec. Purwane gara		1 unit		74.999.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu			74.999.900

7	1	01	207	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Cakupan pengadaa n barang milik daerah penunjang urusan pemerinta h daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Purwane gara		1 unit		24.368.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu			24.368.800
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik yang terpenuhi	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kecamat an Purwane gara		2 lap		16.800.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	16.800.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kecamat an Purwane gara		3 orng		107.001.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			107.001.200
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasi onal yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamat an Purwane gara		9 unit		20.510.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	20.510.000

7	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah	Kecamatan Purwonegara		2 unit		49.999.030		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	49.999.030
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwonegara		9 unit		14.821.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	14.821.200
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													
7	1	2	2.3	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang terlaksana	Jumlah bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Purwonegara		1 lap		19.699.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	19.699.800

7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang terkait dengan pelayanana perizinan Non-usaha	Cakupan Penyeleng garaan Pemrinta han dan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan perizinan Non-usaha yang terlayani	Jumlah bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamat an Purwane gara		1 dok		5.500.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	5.500.000
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang terkait dengan Nont- perizinan	Cakupan Penyeleng garaan Pemrinta han dan Pelayanan Publik	Jumlah pengelola operator siak yang terbayarkan		Kecamat an Purwane gara		1 lap		8.550.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	8.550.000
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Penyeleng garaan Pemrinta han dan Pelayanan Publik	Jumlah pengelola SPPT PBB yang tersalurkan		Kecamat an Purwane gara		1 lap		120.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	120.000.000
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
7	0 1	04	201		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum													
7	0 1	04	201	02	Harmonisasi hubungan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Terlaksan anya harmonis asi hub tokoh agama dan tokoh masyarak at	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		Kecamat an Purwane gara		1 lap		5.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	5.000.000

7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah													
7	1	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyeleng graan Urusan Pemerinta han Umum	Jumlah pelaksanaan tugas forkompinca	Jumlah bulan Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. purwane gara		1 tahun		19.999.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	19.999.800
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Cakupan Penyeleng graan Urusan Pemerinta han Umum	Porsentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Porsentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamat an Purwane gara				0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
7	1	06	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Kecamat an Purwan egara		4 dok		7.125.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	7.125.500

7	1	06	2.01	09	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa tertib administrasi pemerintahan desa yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwanegara		4 dok		9.999.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	9.999.900
7	1	06	201		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Prosentase pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Purwanegara		4 desa		100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100.000.000
7	01	06	201	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa		Kec. Purwanegara		2 dok		5.750.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.750.000
7	01	06	201	11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Kec. purwanegara		1 dok		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.000.000

7	1	06	2.01	11	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwanegara		1 dok		10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	10.000.000
7	1	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa tertib Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwanegara		3 dok		30.400.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	30.400.000
7	1	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pendampingan desa yang terlaksana yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwanegara		2 lap		10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	10.000.000
												TOTAL	2.474.000.000					2.474.000.000

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

- 1) nihil

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Peningkatan jalan desa	Desa Purwanegara	Persentase perbaikan jalan desa rusak berat berlubang menggenang air menghambat akses perekonomian	146.000.000	Bankeu PIK 2022
2.	Peningkatan jalan rabat beton	Desa Kalipelus	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan rusak	145.000.000	Bankeu PIK 2022
3	Peningkatan jalan	Desa Purwanegara	Prosentase pelaksanaan jalan rusak berat susah dilewati	145.000.000	Bankeu PIK 2022
4.	Peningkatan jalan desa	Desa Purwanegara	Prosentase pelaksanaan perbaikan jalan desa yang rusak	215.000.000	Bankeu PIK 2023
5.	Pergeseran jalan/pembuatan makadam jalan	Desa Petir	Prosentase pelaksanaan pembuatan makadam di desa petir yang Sebagian masih berupa tanah dimana Ketika hujan berlumpur	150.000.000	Bankeu PIK
6.	Pemeliharaan jalan desa	Desa Mertasari	Prosentase perbaikan jalan berlubang dan	2000m	Bankeu Khusus DPU

			tergenang air		
7	Pembangunan sarana air bersih	Desa Purwonegoro	Prosentase pemenuhan ketersediaan air bersih		Bankeu Khusus
8	Peningkatan jalan dan pelebaran jalan	Desa Merden	Prosentase ketersediaan jalan kabupaten yang sempit dan rawan kecelakaan		Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten
9	Peningkatan jalan penghubung antar desa	Desa Karangyar	Prosentase pelaksanaan akses peningkatan ekonomi terhambat		Bankeu Khusus DPU
10	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Kutawuluh	Prosentase pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	1000 x 2,5	Bankeu khusus DPU
11	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Danaraja	Prosentase pelaksanaan rehabilitasi jalan usaha tani yang akan meningkatnya biaya transportasi untuk mengangkut hasil panen		Bankeu Khusus
12	Peningkatan jembatan jalan desa	Desa Gumiwang	Prosentase pelaksanaan peningkatan jembatan jalan desa yang terlalu sempit dan bangunan sudah tua		Bankeu Khusus
13	Peningkatan jalan desa yang sudah rusak parah	Desa Parakan	Terlaksananya peningkatan jalan desa yang rusak		Bankeu Khusus
14	Peningkatan dan pemeliharaan PUSTU	Desa Pucungbedug	Terlaksananya rehabilitasi PUSTU yang sudah tua dan kondisi		Bankeu Khusus

			bangunan bnayak yang rusak		
15	Rehabilitasi/pembangunan Gedung pemerintah	Desa Kalitengah	Terlaksananya rehabilitasi kantor kepala desa yang terlalu sempit		Bankeu Khusus
16	Pembangunan Sarana Air Bersih	Desa Kaliajir	Tecukupinya ketersediaan air bersih khususnya pada musim kemarau		Bankeu Khusus

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Nihil

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kependudukan;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- 2 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
- 3 Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Konsolidasi Demokrasi;
 - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - c. Penegakan hukum nasional;
 - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
 - e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

a. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Strategis Peralihan tahun 2023-2026 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terealisasinya program secara otomatis untuk perkantoran. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program penataan administrasi kependudukan,

program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Purwanegara selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara terus menerus mengambil langkah – langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat yang tentunya di dukung dengan fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai seperti pemerataan laptop untuk semua pegawai sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Purwanegara.

Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Kecamatan Purwanegara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan organisasi untuk kurun waktu peralihan satu sampai 3 tahun ke depan sambil menunggu adanya kepala daerah yaitu di tahun 2024. Diformulasikannya sasaran strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya manusia aparatur serta dengan terfasilitasinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga akan tercapai target kinerja dalam 100%. Penambahan bahan logistik kantor untuk pemenuhan kebutuhan logistik kantor selama 1 tahun berjalan dan didukung sarana dan prasarana yang memadai yang akan berpengaruh terhadap kinerja aparatur serta kelancaran birokrasi ataupun tata kelola pemerintahan yang baik tentunya di Kecamatan Purwanegara.

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Purwanegara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Purwanegara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rancangan Akhir Tahun 2024					Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Pro gra m	Kelua ran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN														
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kec Purwane gara	100 %	8doku men	1 Tahun	3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersunny a dokumen perencanaan	100%	4.000.000	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah yang	Kecamatan Purwane gara	100 %	14 dokumen	1 tahun	3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	4.000.000	

					Kinerja SKPD		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusun											
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gaji ASN yang terbayar	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Purwane gara		11 ASN	1 tahun	1.551.701.370		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	1.794.006.852	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan penatausahaan keuangan yang terbayarkan	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Purwane gara		50 dok		43.252.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	45.500.000	
7	1	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan bulanan/tribulan/semesteran yang tersusun	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Purwane gara		8 dok		3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	4.000.000	
7	1	1	2.06		Administrasi umum Perangkat Daerah														
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Purwane gara		1 paket		10714.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.000.000	

7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Purwane gara		8 paket		88.296.700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	90.000.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7	1	01	207	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwane gara		55 unit		65.509.400				55 unit	65.000.000
7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwane gara		4 unit		40.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit(3 laptop 1 genset)	40.000.000
7	1	1	207	11	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kec. Purwane gara		1 unit		74.999.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu			

7	1	01	207	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Cakupan pengadaa n barang milik daerah penunjang urusan pemerinta h daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Purwane gara		1 unit		24.368.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu			
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik yang terpenuhi	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kecamat an Purwane gara		2 lap		16.800.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	17.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kecamat an Purwane gara		3 orng		107.001.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			105.504.000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaa an, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasi onal yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamat an Purwane gara		9 unit		20.510.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	20.515.200

7	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah	Kecamatan Purwonegara		2 unit		49.999.030		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	50.000.000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Purwonegara		9 unit		14.821.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.000.000
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													
7	1	2	2.3	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang terlaksana	Jumlah bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Purwonegara		1 lap		19.669.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	19.700.000

7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang terkait dengan pelayanana perizinan Non-usaha	Cakupan Penyeleng garaan Pemrinta han dan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan perizinan Non-usaha yang terlayani	Jumlah bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamat an Purwane gara		1 dok		5.500.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	5.500.000
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang terkait dengan Nont- perizinan	Cakupan Penyeleng garaan Pemrinta han dan Pelayanan Publik	Jumlah pengelola operator siak yang terbayarkan		Kecamat an Purwane gara		1 lap		8.550.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	8.580.000
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Penyeleng garaan Pemrinta han dan Pelayanan Publik	Jumlah pengelola SPPT PBB yang tersalurkan		Kecamat an Purwane gara		1 lap		120.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	120.500.000
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
7	0 1	04	201		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum													
7	0 1	04	201	02	Harmonisasi hubungan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Terlaksan anya harmonis asi hub tokoh agama dan tokoh masyarak at	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		Kecamat an Purwane gara		1 lap		5.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	5.000.000

7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah													
7	1	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyeleng graan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pelaksanaan tugas forkompinca	Jumlah bulan Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. purwane gara		1 tahun		19.999.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	20.000.000
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Cakupan Penyeleng graan Urusan Pemerintahan Umum	Porsentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Porsentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamat an Purwane gara				0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
7	1	06	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Kecamat an Purwan egara		4 dok		7.125.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	10.000.000

7	1	06	2.01	09	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa tertib administrasi pemerintahan desa yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwanegara		4 dok		9.999.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	10.000.000
7	1	06	201		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Prosentase pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Purwanegara		4 desa		100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100.000.000
7	01	06	201	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa		Kec. Purwanegara		2 dok		5.750.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.000.000
7	01	06	201	11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Kec. purwanegara		1 dok		5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.000.000

7	1	06	2.01	11	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwanegara		1 dok		10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	30.400.000
7	1	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa tertib Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwanegara		3 dok		30.400.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	30.400.000
7	1	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pendampingan desa yang terlaksana yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwanegara		2 lap		10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	20.000.000
												TOTAL	2.474.000.000					

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Kecamatan Purwanegara adalah Rencana Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 kegiatan yang diarahkan pada :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
 - a. koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan 1 sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa dengan 6 sub kegiatan yaitu :
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
 - e. Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa.
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - g. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - h. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 31 Juli 2023

CAMAT PURWANEGARA,

WARIS PUJI RAHAYU, S. Sos
NIP. 19680111 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

RANCANGAN
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN WANADADI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

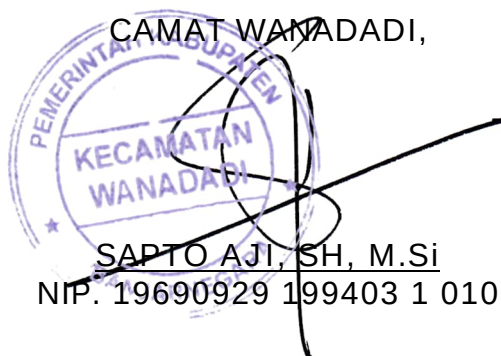
Rancangan Awal Renja Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran rencana kerja dan Anggaran/pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Awal Renja tersebut berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, Renstra Kecamatan Wanadadi Tahun 2023-2026, dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara, 30 Juli 2023

CAMAT WANADADI,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA" at the top and "KECAMATAN WANADADI" at the bottom, separated by a star on the left. Overlaid on the stamp is a large, bold, black handwritten signature. Below the signature, the name "SAPTO AJI, SH, M.Si" and the NIP number "NIP. 19690929 199403 1 010" are printed in black.

SAPTO AJI, SH, M.Si

NIP. 19690929 199403 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	31
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	35
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	53
2.7. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	59
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	60
3.3. Program dan Kegiatan	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	72
BAB V PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara.....	18
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.....	30
Tabel 2.3 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	31
Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara	40
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara	53
Tabel 2.6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara	58
Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Kecamatan Wanadadi) ..	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2009 tentang RPJP. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis

kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan penunjang fungsi kewilayahan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan, dan 16 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. Rp.1.795.930.280,-, dengan fokus utama pada bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wanadadi selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan secara terus menerus mengambil langkah – langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan optimal, bersih serta akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat.

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang ada di Kecamatan, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan tepat waktu tanpa didasari paksaan serta penyelewengan yang dilakukan oleh petugas pungut pajak.
3. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas (belum semua pelaksana dan pejabat struktural terpenuhi fasilitas laptop dan printer) sebagai penunjang pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah.

Dari 4 program, 8 kegiatan, dan 16 sub kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan, dan 16 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. Rp.1.795.930.280,-.

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 5 (lima) kegiatan yakni :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdiri dari 1 (Satu) sub Kegiatan :
 - a.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c.2. Penyedia bahan logistik kantor

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - d.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - d.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - e.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - e.2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni :
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada CamatTerdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
3. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terdiri dari 1(satu) sub Kegiatan :

 1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 5 (lima) sub Kegiatan :

 1. Fasilitasi administrasi Tata pemerintahan desa
 2. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 3. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum

4. Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
5. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah. Dari 4 program, 8 kegiatan, dan 16 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 9 kegiatan, dan 18 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp1.806.080.280-.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan sub Kegiatan yang bertambah adalah :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.
2. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung kantor Dan Bangunan Lainnya,

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan yaitu jumlah pelayanan KTP dan KK di Kecamatan Wanadadi. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah

1. Adanya Program Pandusaluring dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga pelayanan KTP dan KK sudah banyak dilaksanakan di desa.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan. Fasilitas / Aplikasi perekaman data KTP sering mengalami gangguan sehingga menghambat pelayanan pembuatan KTP.
3. Kurangnya ketertiban administrasi di kecamatan yang menyebabkan adanya dokumen/STNK yang hilang sehingga tidak bisa dibayarkan pajak kendaraan dinas tersebut.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistic kantor, pengadaan sarana dan prasara pendukung Gedung kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan dan sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Target IKM 84,8 dapat mencapai nilai 88,01. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat, sub kegiatan Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di limpahkan jumlah penyaluran SPPT PBB mencapai 100% dan menjadi peringkat 2 pelunasan PBB tercepat se Kabupaten Banjarnegara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Faktor SDM yang mendukung dalam melaksanakan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
2. Faktor Anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing.;
3. Koordinasi Internal yang mendukung.
4. Melakukan himbauan secara intensif di setiap kegiatan, rapat, upacara untuk mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap rencana kerja Kecamatan seperti pelunasan PBB secara tepat waktu tanpa adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Monitoring dan Koordinasi internal yang intensif dalam upaya meningkatkan Kinerja pegawai dan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, dan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan agar kegiatan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Anggaran belanja yang dapat mendukung semua Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang direncanakan secara maksimal

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target progra m dan kegiata n Renja Perangk at Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perang kat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2022	Tingka t Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7 / 6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10 / 4
I	Sasaran Strategis									
		Nilai IKM	83,4	83,4	83,2	88	105,7 7	84	255,4	3,06
		Nilai SAKIP	CC	51,98 / CC	53/ CC	49,15 / C	C	CC	CC	CC

		Prosentase SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak	100%	100 %	100 %	100	100	100%	100%	100%
	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target progra m dan kegiata n Renja Perangk at Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisa si Renja Perangk at Daerah tahun 2022	Tingka t Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan	16 Orang	13 Orang	16 Orang	16 Orang	100	16 Orang	45	2,8125
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang terbayarkan	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		pelayanan administrasi umum perangkat daerah								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	2	1	1	100	1	4	4
	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	11 Paket	5 Paket	11 Paket	11 Paket	100	11 Paket	27	2,454545 455
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	3 Unit	3 Unit	100	1	4	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target progra m dan kegiata n Renja Perangk at Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisa si Renja Perangk at Daerah tahun 2022	Tingka t Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	2 Paket	8 PAket	4 Paket

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7 / 6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10 / 4
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	10	7	6	6	100	10	23	2,3
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan aula yang terpelihara	2	2	2	2	100	2	6	3
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	12	8060	1770	511	28,87	12	8583	71525
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	25747	19.800	20614	104,1 1	1	46362	4636200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan tugas forkompimca	6	6	6	6	4	6	18	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11	11	11	11	100%	11	18 desa	
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	11	11	11	100%	1	18	18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	1	11	11	11	100%	1	23	2
	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	2	11	11	11	100%	1	23	1
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3	11	11	11	100%	3	25	8,33

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 Indikator. Dari 3 indikator tersebut, 2 berstatus tercapai yaitu nilai IKM dengan Target nilai 83,2 mencapai nilai 88 dan Persentase Realisasi SPPT PBB mencapai 100%. Sedangkan indikator yang tidak tercapai yaitu Nilai SAKIP, dimana target nilai 53 hanya mencapai 49,15.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian Target Nilai IKM tersebut antara lain adalah:

1. Telah tersedianya Standar Operasional Pelayanan dan maklumat Pelayanan;
2. Petugas pelayanan telah memahami syarat dan prosedur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.;
3. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia dalam memberikan pelayanan;
4. Komunikasi dan sosialisasi yang baik dengan petugas pelayanan yang ada di desa;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya kepada atasan.
6. Monitoring dan evaluasi yang intensif dalam upaya meningkatkan kinerja serta pendisiplinan jam kerja sehingga bisa menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan wilayah kerja sesuai tugas, pokok dan fungsi masing – masing Aparatur Sipil Negara.
7. Melakukan himbauan di setiap kegiatan, didesa untuk mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap rencana kerja Kecamatan seperti percepatan pelunasan PBB .
8. Monitoring dan evaluasi yang intensif pada petugas pemungut Pajak guna menghindari penyelewengan dan keterlambatan dalam penyetoran Pajak tersebut.

Adapun Faktor yang mempengaruhi ketidak tercapainya Nilai SAKIP antara lain :

1. Belum terpenuhinya materi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai ketentuan;
2. Sosialisasi dan pendampingan dalam penilaian SAKIP yang masih kurang dari instansi pengampu.
3. Kapasitas SDM yang masih terbatas dalam penyusunan dokumen perangkat daerah.

Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya di wilayah Kecamatan Wanadadi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Adapun upaya-upaya dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat meliputi:

1. Diadakannya pembinaan dan pendampingan administrasi ke desa – desa yang dilakukan oleh Tim Kecamatan sesuai jadwal yang dtentukan, minimalnya 2 kali dalam 1 tahun.
2. Himbauan dari atasan kepada ASN yang ada untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya berdasarkan tupoksinya dan meminimalisir indisipliner.
3. Melakukan himbauan di setiap kegiatan untuk mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap rencana kerja Kecamatan seperti percepatan pelunasan PBB secara tepat waktu tanpa adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak dan mempedomani 12 etika budaya malu aparatur pemerintah desa sehingga aparatur pemerintah desa akan lebih loyal dalam bekerja sesuai tupoksinya dan tertib administrasi pemerintahan desa dan meningkatkan kedisiplinan jam kerja.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai IKM	-	-	83,1	84	84,5	84.5	83,4	88,01	88,5	89	Nilai IKM
	Nilai SAKIP	-	-	CC	CC	B	B	51,98 / CC	49,15 / C	B	BB	Nilai SAKIP
	Persentase Realisasi SPPT PBB			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase Realisasi SPPT PBB

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

Lampiran Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		Adanya ASN yang pensiun sehingga anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak terserap 100%	Memohon kebijakan kepada BKD untuk menambah ASN sesuai tupoksi	
				2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	100 %		Kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak tepat	Monitoring dan evaluasi ke desa desa dengan menggalakkan program	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					Pelayanan Publik			waktu dan meminimalisir penyelewengan dalam penyetoran uang pajak ke bank.	seperti pring pethuk nabung Bersama selama 1 tahun untuk membayar pajak dengan tepat waktu.	
				3.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %		Administrasi pemerintahan di desa yang kurang tertib serta penginventarisiran asset desa yang perlu	Monitoring dan evaluasi dana desa se kecamatan yang	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
				4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		100 %		diadakan pembenahan dan sosialisasi pentingnya asset desa. Memecahkan Bersama isu strategis atau permasalahan yang terjadi di kecamatan serta mencari solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak.	dilakukan secara berkala minimal 1 tahun 2 kali monev. Adanya sosialisasi yang dilakukan secara rutin seperti sosialisasi tentang PBB dan 12 budaya malu bagi aparat desa.	

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 3 urusan, yaitu membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 4 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Kurangnya etos kerja dan kesadaran dari diri sendiri tentang kedisiplinan jam kerja serta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah.(Semoga akan ada perubahan kedisiplinan dengan adanya e-presensi dan e-kinerja).
2. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan Wanadadi sehingga menghambat pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan. (Belum meratanya fasilitas seperti laptop, printer dan PC untuk pelaksana dan pejabat struktural yang ada di Kecamatan Wanadadi sehingga menghambat penyeteroran Data dan laporan yang sesuai dengan deadline yang ditentukan)
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengurusan dokumen kependudukan dan Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.

4. Masih ada sebagian masyarakat belum melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu serta adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak yang tidak langsung menyetorkannya ke bank

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Sumber Daya Manusia yang ada tidak semua memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi tidak relevan dengan uraian tugas dan menghambat tercapainya indikator kerja.
2. Beberapa sarana dan prasarana kelembagaan tidak dapat digunakan karena rusak ataupun karena belum memadai, dan banyak pelaksana serta pejabat struktural yang belum mendapatkan fasilitas laptop, printer dan PC sehingga menghambat ketepatan penyetoran data maupun laporan.
3. Kurangnya keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelayanan terhadap masyarakat serta kurang disiplinnya dalam penerapan jam kerja sehingga pelayanan langsung terhadap masyarakat secara umum belum optimal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan mendisiplinkan jam kerja ASN dengan aplikasi e-presensi dan e- kinerja sehingga pelayanan langsung terhadap masyarakat umum akan lebih optimal.
2. Menambah sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi pelayanan dan kinerja Pegawai di Kecamatan Wanadadi.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan tertib administrasi desa dengan cara pengawasan dan pendampingan langsung ke desa-desa di seluruh wilayah Kecamatan Wanadadi oleh tim Kecamatan.
4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat dan meningkatkan pelayanan prima.
5. Memanfaat anggaran yang terbatas dengan sebaik mungkin untuk mencapai target program/kegiatan yang sudah disepakati bersama.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas, belum meratanya fasilitas bagi pelaksana dan pejabat struktural seperti laptop printer, dan masih kurangnya prasarana pendukung seperti LCD, lemari file, AC, CCTV.

2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Adanya ketidakdisiplinan dari petugas pungut pajak yang tidak langsung menyetorkan pembayaran pajak dari masyarakat ke bank.
4. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai yang ada di Kecamatan Wanadadi sehingga tugas dan fungsi aparatur pemerintah kurang optimal.
5. Kurangnya pagu anggaran di tahun berjalan sehingga tidak semua program kegiatan bisa dilaksanakan secara 100% dan target yang ditentukan juga tidak tercapai 100%.

2.5.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, anggaran belanja yang dialokasikan untuk Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara diusulkan sebesar

Rp 2.293.852.130,- yang terbagi dalam 4 program 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan mulai Tahun 2024. Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program kegiatan dan sub kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec . Wana dadi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota yang terlaksana	Nilai IKM	2.094.382.130	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec . Wana dadi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota yang terlaksana	Nilai IKM	2.061.435.000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Presentase Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang	100%	11.351.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Presentase Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang	100%	11.500.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	3.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kec . Wana dadi	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	100%	7.851.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kec Wana dadi	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	100%	8.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	1.730.893.594	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Wana dadi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	1.729.141.584	
2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kec . Wana dadi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.687.121.594	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kec . Wana dadi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.687.121.584	

2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	40.272.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	38.520.000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100%	3.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Wana dadi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	3.500.000	

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase administrrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	21.367.320	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Wana dadi	Persentase administrrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	128.686.000	
3.1	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec . Wana dadi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	7.500.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Wana dadi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	13.545.000	
3.2	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kec . Wana dadi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	113.867.320	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kec Wana dadi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	115.141.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	34.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Wana dadi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	69.102.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.1	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	24.000.000	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	44.162.000	
4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	24.940.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	93.265.216	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	78.555.416	

5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec . Wana dadi	Jumah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	100%	8.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec . Wana dadi	Jumah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	100%	7.200.000	
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa administrasi perkantoran yang disediakan	100%	84.865.216	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Penyediaan jasa administrasi perkantoran yang disediakan	100%	71.355.416	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Daerah yang terlaksana	100%	28.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Daerah yang terlaksana	100%	44.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec . Wana dadi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	13.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec . Wana dadi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	12.450.000	
6.2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Wana dadi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	100%	12.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Wana dadi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	100%	12.000.000	
6.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kec. Wana dadi	Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala Sarana dan Prasarana gedung kantor	100%	3.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kec. Wana dadi	Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala Sarana dan Prasarana gedung kantor	100%	20.000.000	

	Bangunan Lainnya		dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			Bangunan Lainnya		dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec . Wana dadi	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	Nilai IKM	75.505.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec . Wana dadi	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	Nilai IKM	79.990.000	
7	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec . Wana dadi	Persentase terselenggara nya koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terlaksana	100%	10.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec . Wana dadi	Persentase terselenggara nya koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terlaksana	100%	10.000.000	
7.1	Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau	100%	10.000.000	Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau	100%	10.000.000	

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec . Wana dadi	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat yang terlaksana	100%	65.505.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec . Wana dadi	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat yang terlaksana	100%	69.990.000	
8.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen pelayanan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100%	1.800.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen pelayanan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100%	1.800.000	

1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan terkait dengan non perijinan	100 %	9.100.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan terkait dengan non perijinan	100 %	4.050.000	
8.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	100 %	54.605.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec . Wana dadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	100 %	54.140.000	
III	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec . Wana dadi	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Nilai SAKI P	9.600.000	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec . Wana dadi	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Nilai SAK IP	9.600.000	

1	2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12
9	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pelaksanaan Tugas kepala Daerah yang terlaksana	100 %	9.600.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec . Wana dadi	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pelaksanaan Tugas kepala Daerah yang terlaksana	100 %	9.600.000	
9.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	9.600.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	9.600.000	
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec . Wana dadi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang Terlaksana	100 %	114.365.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec . Wana dadi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang Terlaksana	100 %	116.975.000	
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Kec . Wana dadi	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100 %	114.365.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Kec . Wana dadi	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100 %	116.975.000	

	Pemerintahan Desa		Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana			Pengawasan Pemerintahan Desa		Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana			
10.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100 %	3.800.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100 %	7.600.000	
10.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100 %	10.190.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100 %	11.500.000	
10.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	10.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	25.000.000	

10.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	7.925.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	15.600.000	
10.5	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	100 %	26.700.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	100 %	26.975.000	
10.6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pendampingan desa di wilayahnya	100 %	15.750.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec . Wana dadi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pendampingan desa di wilayahnya	100 %	30.300.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, tidak ada hal yang menjadi catatan.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Gumingsir	Jalan antar desa Linggasari dengan Desa Gumingsir masih berupa tanah dan batu Sehingga perlu dilakukan peningkatan Jalan antar Desa tersebut.	400 m	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
2	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Linggasari	Jalan antar desa Gumingsir dengan Desa Linggasari masih berupa tanah dan batu sehingga perlu dilakukan peningkatan Jalan antar Desa tersebut.	550 m	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

3	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Karangjambe	Jalan inspeksi antara jalan Desa Karangjambe - Desa Wanadadi	550 m	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
4	Bantuan Keuangan kepada Desa-Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan	Wanadadi	Pengaspalan jalan rusak dan berlubang.	650x3m	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
5	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan desa)	Dusun Karangjambu, Kandangwangi	kondisi jalan sudah rusak dan berlubang	2,6 X 1400 M	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
6	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan prasarana jalan milik desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Karangjambe rw 02, Karangjambe	Karena curah hujan yang tinggi maka banyak talud dan drainase yang rusak	Panjang 200 m	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan Usaha Tani Dekat Lapangan Desa	Jalan Usaha Tani di Kadus I (Blok Lapangan Desa) sebagai Akses utama	550 m	DINTANKAN KP

		Karangkemiri (Kadus I)	petani dalam meningkatkan perekonomian, sudah sangat rusak apalagi ketika musim hujan, jalan tidak dapat dilewati kendaraan .		
No	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
8	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Kasilib,	banyak jalan desa terutama jalan lurung yang sudah rusak	PENGAS PALAN P=50M, L=4M	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
9	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Kadus 5 , Lemahjaya	aspal jalan desa di Kadus 5 dengan Panjang =3000 m dalam kondisi yang rusak, jalan tersebut merupakan akses satu satunya warga dalam kegiatan sehari hari, dengan akses jalan yang rusak maka kegiatan perekonomian menjadi terhambat, hasil panen warga juga	800 m	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

			susah untuk di jual, jalan tersebut belum dibangun karena Dana Desa Tidak dapat untuk membagnun selama 2 tahun karena untuk kegiatan penanganan COVID		
10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Blok sawah Janggleng, desa Linggasari,	Jalan Pertanian di blok sawah Janggleng,Desa Linggasari yang tepatnya berada persis di sebelah Jalan Kabupaten, kondisinya sebagian besar masih berupa tanah bergelombang dan pecahan batu. Hal ini Menyulitkan akses para petani menggunakan jalan pertanian tersebut.	Cor beton Jalan Usaha Tani Panjang : 200m x lebar 3,5m x tebal 15cm	DINTANKAN KP
11	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam	Desa Medayu,	Kebutuhan seperangkat wayang kulit untuk melengkapi gamelan yang sudah ada	1 set	DINBUDPAR

	Daerah Kabupaten / Kota)				
12	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa)	Desa Tapen	Jalan desa kondisi rusak parah	1.500 m	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
13	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pariwisata Desa: Pengembangan pariwisata desa)	Seakong Agro Eduwisata, Dusun III Desa Wanadadi	Pengembangan Agro Eduwisata Seakong.	Untuk pengembangan Seakong, peningkatan infrastruktur jalan (pavingisasi) Volume : 3.080 m ²	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
14	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Desa Wanakarsa	Jalan Kabupaten yang ada di Desa Wanakarsa sudah rusak parah dan membahayakan untuk pengguna jalan yang melintas.	1500m x 3,5m	DPUPR
15	Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Gunung Dusun Mergayasa Desa Gumingsir Kecamatan Wanadadi	Desa Gumingsir	kondisi jalan usaha tani yang belum dibangun secara permanen dan saat ini rusak	Panjang = 400 m Lebar = 2,5 m Tinggi = 0,15 m	DINTANKAN KP

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
16	Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Jalan baru Pucang Linggasari, desa Wanadadi, Tapen	Di jalan kabupaten tepatnya di ruas jalan Linggasari-Pucang, kondisi penerangannya sangat kurang. sehingga beberapa kali menyebabkan kecelakaan karena kurang penerangan jalan, Trafic light di perempatan pasar Wanadadi dan Tapen	2 paket	Dinas Perhubungan

2.7 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	Nihil				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kependudukan;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Konsolidasi Demokrasi;
 - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - c. Penegakannhukum nasional;
 - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
 - e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah “*BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN*”

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya adalah :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat ;
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai;
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab;
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar;

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarengara, maka

Kecamatan Wanadadi mempunyai peran dan fungsi menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Wanadadi sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara tersebut adalah Misi Ketiga yaitu :

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab ;

Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan

perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wanadadi selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara terus menerus mengambil langkah – langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat yang tentunya di dukung dengan fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai seperti pemerataan laptop untuk semua pegawai sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Wanadadi.

Dalam Upaya pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2023-2026 dan memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023-2026 dan RENSTRA Kecamatan Wanadadi Tahun 2023-2026 Kecamatan Wanadadi menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Peralihan tahun 2023-2026 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terealisasinya program secara otomatis untuk perkantoran. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program penataan administrasi kependudukan, program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Untuk mencapai tujuan Kecamatan Wanadadi memformulasikan sasaran strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya manusia aparatur serta dengan terfasilitasinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga dapat tercapai target kinerja 100%. Penambahan bahan logistik kantor untuk pemenuhan kebutuhan logistik kantor selama 1 tahun berjalan dan didukung sarana dan prasarana yang memadai yang akan berpengaruh terhadap kinerja aparatur serta kelancaran birokrasi ataupun tata kelola pemerintahan yang baik tentunya di Kecamatan Wanadadi.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wanadadi selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan secara terus menerus mengambil langkah – langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan optimal, bersih serta akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat.

Upaya dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Wanadadi Program/kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Wanadadi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wanadadi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wanadadi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Cat atan Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Pro gra m	Kelu aran Sub Kegi atan	Hasil Kegia tan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN														
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kec Wanadadi	100 %	10 dokumen	1 Tahun	3.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusunnya dokumen perencanaan	100%	5.000.000	

7	1	1	2.01	6	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kec Wanadadi	100 %	6 dokumen	1 tahun	8.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	10.000.000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gaji ASN yang terbayar	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kec Wanadadi		16 ASN	1 tahun	1.687.121.584		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	168.712.159
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan penatausahaan keuangan yang terbayarkan	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kec Wanadadi		6 dok		38.520.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	40.272.000
7	1	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan bulanan/tribulanan/semesteran yang tersusun	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kec Wanadadi		8 dok		3.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	5.000.000

7	1	1	2.06		Administrasi umum Perangkat Daerah													
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kec Wanadadi		1 paket		13.545.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	7.500.000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kec Wanadadi		11 paket		115.141.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	120.000.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Wanadadi		8 Unit	Pengadaan Printer scanner	44.162.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	20.000.000
7	1	01	207	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec Wanadadi		2 Unit		24.940.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu		100%	10.000.000

7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik yang terpenuhi	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kec Wanadadi		2 lap		7.200.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	8.400.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kec Wanadadi		4 orng		71.355.416		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	84.865.216
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Wanadadi		9 unit		12.450.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	13.000.000
7	1	1	2.09	002	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kec Wanadadi		2 unit		20.000.000		Dana Transfer Umum-Dana		100%	12.000.000

					Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemerintah Daerah		Urusan Pem. Daerah							Alokasi Umum			
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Wanadadi		6 unit		12.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	3.000.000
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													
7	1	2	2.3	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang terlaksana	Jumlah bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Wanadadi		1 lap		10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	10.000.000

7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang terkait dengan pelayanana perizinan Non-usaha	Cakupan Penyeleng garaan Pemrintah an dan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan perizinan Non- usaha yang terlayani	Jumlah bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Wanadadi		5 dok		1.800.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	1.800.000
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang terkait dengan Nont- perizinan	Cakupan Penyeleng garaan Pemrintah an dan Pelayanan Publik	Jumlah pengelola operator siak yang terbayarkan		Kec Wanadadi		1 lap		14.050.00 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	9.100.000
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Penyeleng garaan Pemrintah an dan Pelayanan Publik	Jumlah pengelola SPPT PBB yang tersalurkan		Kec Wanadadi		1 lap		54.140.00 0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	54.605.00 0
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah													

7	1	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pelaksanaan tugas forkompinca	Jumlah bulan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Wanadadi		1 tahun		9.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	9.600.000
7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
7	1	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Kec Wanadadi		22 dok		7.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	3.800.000
7	1	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa tertib administrasi pemerintahan desa yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Wanadadi		11 Desa		11.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	10.190.000
7	1	06	2.01		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Prosentase pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kec Wanadadi		1 desa		25.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	25.000.000

7	01	06	201	11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Kec Wanadadi		11 dok		15.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	7.925.000
7	1	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa tertib Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Wanadadi		1 dok		26.975.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	26.700.000
7	1	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pendampingan desa yang terlaksana yang terlaksana	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Wanadadi		3 lap		30.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.750.000
												TOTAL	2.268.000.000					672.219.375

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Kecamatan Wanadadi adalah Rencana Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 kegiatan yang diarahkan pada :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c.2. Penyedia bahan logistik kantor

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - d.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - d.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - f.2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
 - a. Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat.
 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa dengan 6 sub kegiatan yaitu :

- a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- d. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- f. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2022-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 30 Juli 2023

CAMAT WANADADI,

SAPTO AJI, SH, M.Si

NIP. 19690929 199403 1 010





**RENCANA KERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARMANGU
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN BANJARMANGU
Jl.Raya Banjarmangu Km.05 Telp. / Fax. (0286) 5986606
Banjarmangu, Banjarnegara**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Banjarmangu Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Banjarmangu Tahun 2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Banjarmangu Tahun 2024 secara garis besar berisi tentang hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022, tujuan, sasaran, rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Banjarmangu. Penyusunan Rencana Kerja tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, Renstra Kecamatan Banjarmangu Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Banjarmangu Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah bagi Kecamatan Banjarmangu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Banjarmangu.

Banjarmangu, 31 Juli 2023
CAMAT BANJARMANGU


SRI SUPIJAH ANGGOROWATI, S.Sos

Pembina Tk I
NIP. 19650810 198607 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang

diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.045.908.645,- (*Dua milyar empat puluh lima juta Sembilan ratus delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) dengan fokus utama pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dimana kecamatan berfungsi ganda selain untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga di wilayahnya juga menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat dimana sebagian urusan pemerintahan kewenangannya dilimpahkan kepada camat serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masyarakat baru mengurus surat – surat hanya saat dibutuhkan saja bukan sebagai dokumen pribadi.
2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Banjarmangu dalam rangka menunjang Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja yang secara langsung melayani masyarakat dan tugas – tugas dalam urusan pemerintahan lainnya.
3. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur perangkat desa dalam penatausahaan keuangan terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
4. Tata kelola pemerintahan desa yang belum Optimal, mengakibatkan pengerjaan buku – buku administrasi desa tidak

atau belum sesuai juknis yang ada, pelaksanaan implementasi program – program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan) juga tidak atau belum sesuai juknis yang ada.

Dari 4 program, 8 kegiatan, dan 23 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.996.747.456 ,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 8 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.010.997.456,- .

Anggaran Perubahan program/kegiatan/sub kegiatan yang berkurang atau bertambah ditahun 2022, meliputi :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengalami penambahan anggaran, sedangkan
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa berkurang anggarannya.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian agar hasil yang sudah tercapai dapat bertahan atau mungkin lebih baik lagi ke di tahun – tahun berikutnya. Di antaranya :

1. Memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat, berkaitan dengan pentingnya dokumen kependudukan.
2. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan dengan mengikuti bintek yang diselenggarakan oleh pemerintah atau mengikuti webinar yang dilakukan secara online / offline.

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur desa, juga memberikan informasi terkait dengan tata kelola pemerintahan desa.

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi semua program yang diampu oleh Kecamatan Banjarmangu yaitu Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan yang matang dengan koordinasi internal yang baik dengan pejabat struktural maupun staf di kecamatan.
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan kerangka acuan kerja yang sudah dibuat.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar jika terjadi permasalahan bisa diatasi sedini mungkin.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka perencanaan pada tahun selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi internal antara Kasi dan Kasubag terkait permasalahan di wilayah. Mengingat para kasi yang lebih memahami dengan kondisi wilayah, sehingga perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran.
2. SOP yang jelas sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Per Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

[illegible]

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	7 dok	100%
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	7 dok	100%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 org/bln	15 org/bln	15 org/bln	15 org/bln	100%	15 org/bln	15 org/bln	100%
2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	3 paket	100%
2	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	100%
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
V	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	100%	11 unit	11 unit	100%
2	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%

[illegible]

[illegible]

1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17 dok	17 dok	17 dok	17 dok	100%	17 dok	17 dok	100%

2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 dok	17 dok	17 dok	17 dok	100%	17 dok	17 dok	100%
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 dok	17 dok	17 dok	17 dok	100%	17 dok	17 dok	100%
4	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah sinkronisasi perencanaan pembangunan desa	17 dok	17 dok	17 dok	17 dok	100%	17 dok	17 dok	100%
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 dok	17 dok	17 dok	17 dok	100%	17 dok	17 dok	100%
6	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 dok	17 dok	17 dok	17 dok	100%	17 dok	17 dok	100%

7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17 dok	17 dok	17 dok	17 dok	100%	17 dok	17 dok	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 1 Indikator dan berstatus tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan yang matang dengan koordinasi internal yang baik dengan pejabat struktural maupun staf di kecamatan.
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan kerangka acuan kerja yang sudah dibuat.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar jika terjadi permasalahan bisa diatasi sedini mungkin.

Meskipun status indikator sudah tercapai, namun ada beberapa faktor yang masih perlu dipacu untuk perbaikan ke depan.

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga masyarakat baru mengurus surat – surat hanya saat dibutuhkan saja bukan sebagai dokumen pribadi.
2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Banjarmangu dalam rangka menunjang Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja yang secara langsung melayani masyarakat dan tugas – tugas dalam urusan pemerintahan lainnya.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat, berkaitan dengan pentingnya dokumen kependudukan.

2. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan dengan mengikuti bintek yang diselenggarakan oleh pemerintah atau mengikuti webinar yang dilakukan secara online / offline.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai survey kepuasan masyarakat	-	-	85,50	86	86,50	86,75	83.72	85,19	85,50	86	
2	Indek penilaian SAKIP	-	-	CC	CC	CC	B	CC	CC	CC	CC	
3	Prosentase pelunasan PBB	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Tahun 2005-2025, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Rendahnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil
2. Rendahnya kemampuan SDM Perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
3. Masih lemahnya peran pemerintah desa dalam memberdayakan Bumdes.
4. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan Implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
5. Keterbatasan Tenaga atau SDM yang menjadi pendamping desa, sehingga masih adanya desa yang belum terdampingi.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penganggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keagamaan, dan ketertiban / keamanan).
7. Kurangnya sarana dan prasarana kantor.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian

indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Rendahnya Mutu Pelayanan Publik
2. Rendahnya Tata Kelola Administrasi
3. Belum optimalnya Pendampingan Desa

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sehingga pelayanan kepada Masyarakat belum Optimal,
2. Fasilitas yang belum terpenuhi diantaranya anggaran yang mendukung suatu kegiatan
3. Regulasi yang jelas sebagai dasar atau payung hukum sehingga suatu kegiatan dapat di laksanakan.
4. Kebijakan – kebijakan yang bersifat mendesak yang mengakibatkan peralihan anggaran, sehingga rencana kerja tidak dapat tercapai sesuai ketentuan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan.

2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan
2. Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tugas yang di limpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Unsur Kewilayahan			2.923.453.624	Unsur Kewilayahan			2.051.520.698	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	100%	2.702.208.624	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	100%	1.902.250.698	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	3.600.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	2.400.000	

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dok	1.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dok	1.200.000	
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dok	1.800.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dok	1.200.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.928.920.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.582.577.222	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 org/bln	1.875.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 org/bln	1.554.497.222	
2	Pelaksanaan penatausah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan		50.920.000	Pelaksanaan penatausah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan		26.580.000	

	aan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		aan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	1.500.000	
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	146.650.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	148.600.400	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	18.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	14.644.500	
2	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	115.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	120.305.900	

3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	13.650.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	13.650.000	
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	75.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	36.927.250	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	5 unit	75.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	5 unit	36.927.250	
V	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100.038.624	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	101.038.624	

1	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	26.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	27.400.000	
2	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	73.638.624	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	73.638.624	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	448.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	30.707.202	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	18.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	13.470.000	

	dinas atau kendaraan jabatan				dinas atau kendaraan jabatan				
2	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	415.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	8.624.562	
3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	15.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	8.612.640	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	95.175.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	149.270.000	

I	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	100%	20.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	100%	149.270.000	
1	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	-	
II	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100%	75.175.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100%	74.270.000	

	n kepada Camat				n kepada Camat				
1	Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Perijinan Non Usaha yang di Laksanakan.	990 dokume n	1.575.000	Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Perijinan Non Usaha yang di Laksanakan.	990 dokumen	-	
2	Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1.887 dokum en	3.600.000	Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1.887 dokume n	-	
3	Pelaksanaa n Urusan yang terkait dengan Kewenanga n Lain yang di Limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 lapora n	70.000.000	Pelaksanaa n Urusan yang terkait dengan Kewenanga n Lain yang di Limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 laporan	74.270.000	
C	PROGRAM PENYELEN	persentase Penyelenggaraan Urusan	100%	12.000.000	PROGRAM PENYELEN	persentase Penyelenggaraan Urusan	100%	-	

	GGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum yang terlaksana			GGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum yang terlaksana			
I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	12.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	-	
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dok	12.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dok	-	
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	114.070.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	75.000.000	

I	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	114.070.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	75.000.000	
1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17 dok	3.010.000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17 dok	-	
2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 dok	2.975.000	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 dok	-	
3	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 dok	75.000.000	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 dok	75.000.000	
4	Fasilitasi Sinkronisasi	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan	17 dok	12.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan	17 dok	-	

	Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
5	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah sinkronisasi perencanaan pembangunan desa	17 dok	2.100.000	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah sinkronisasi perencanaan pembangunan desa	17 dok	-	
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 dok	6.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 dok	-	
7	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan	17 dok	2.485.000	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 dok	-	

	n pemberdaya an masyarakat desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa			n pemberdaya an masyarakat desa				
8	Koordinasi Pendampin gan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17 dok	10.500.000	Koordinasi Pendampin gan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17 dok	-	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu : Memprioritaskan Kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2023

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

2.4. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Validasi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Penegakan hukum nasional;
 - c. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
 - d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan program pembangunan daerah mempunyai Visi “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian” dengan 4 Misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai

3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar

Dari 4 Misi tersebut, Kecamatan Banjarmangu mendukung Misi ketiga yaitu **Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.**

Untuk mendukung Misi tersebut, Kecamatan Banjarmangu didukung 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran yaitu :

TUJUAN :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya efektifitas dan transparansi pelayanan publik

SASARAN :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan
2. Meningkatnya efektifitas dan transparansi pelayanan publik untuk urusan kewilayahan

Kecamatan Banjarmangu menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjarmangu dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2022-2026.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan

1.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, untuk kecamatan adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 14 sub kegiatan.
- b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
- c. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan, dengan 7 sub kegiatan.

Isikan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian RPJMD).

1.4. Program dan Kegiatan

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Banjarnegara
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Banjarmasin
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Banjarmasin

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Kecamatan Banjarmangu						2.923.453.624,00			2.486.800.000,00					
7						UNSUR KEWILAYAHAN						2.923.453.624,00			2.486.800.000,00					
7	1					KECAMATAN						221.245.000,00			148.800.000,00					
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						95.175.000,00			96.600.000,00					
7	1	2	2.03			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						20.000.000,00			20.000.000,00					
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum															
						Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	20.000.000,00		
7	1	2	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						75.175.000,00			76.600.000,00					
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha															

						Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	990 Dokumen	100 %	1.575.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	990 Dok umen	2.000.000,00	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
						Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	1887 Laporan	100 %	3.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n	1887 Laporan	3.600.000,00	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
						Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	71.000.000,00	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								12.000.000,00					12.000.000,00	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								12.000.000,00					12.000.000,00	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
						persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	100 %	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokum en	12.000.000,00	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								114.070.000,00					40.200.000,00	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								114.070.000,00					40.200.000,00	
					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	17 Dokumen	100 %	3.010.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17 Doku men	3.500.000,00
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	17 Dokumen	100 %	2.975.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerin tahan Desa	17 Doku men	3.000.000,00
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	17 Dokumen	100 %	2.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pe ndayagunaa n Aset Desa	17 Doku men	2.200.000,00
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Doku men	0,00
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													

						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	17 Dokumen	100 %	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 Dokumen	12.000.000,00
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	17 Dokumen	100 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 Dokumen	6.000.000,00
7	1	6	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	17 Dokumen	100 %	2.485.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 Dokumen	2.500.000,00
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	17 Laporan	100 %	10.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17 Laporan	11.000.000,00
7	1				KECAMATAN ADMINISTRASI								2.702.208.624,00					2.338.000.000,00
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.702.208.624,00					2.338.000.000,00

7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3.600.000,00					4.000.000,00			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	7 Dokumen	100 %	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.000.000,00			
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	7 Laporan	100 %	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.000.000,00			
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.928.466.376,00					1.954.500.000,00			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	15 Orang/bulan	100 %	1.874.546.376,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.900.000.000,00			
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																

						Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	50.920.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pe natausahaan dan Pengujiaan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	51.000.000,00
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	3.500.000,00
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								146.650.000,00				148.500.000,00	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	100 %	18.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	18.500.000,00
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Paket	100 %	115.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	116.000.000,00
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

						Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	- Kab. Banjarnegar a, Banjarmang u, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	13.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pen yelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	14.000.000,00
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								75.000.000,00					76.000.000,00
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	- Kab. Banjarnegar a, Banjarmang u, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	100 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	76.000.000,00
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100.038.624,00					101.000.000,00
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Banjarnegar a, Banjarmang u, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	26.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.000.000,00
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Banjarnegar a, Banjarmang u, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	73.638.624,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.000.000,00
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								448.000.000,00					54.000.000,00
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

						Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	11 Unit	100 %	18.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	18.000.000,00
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	100 %	415.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.000.000,00
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Banjarnegara, Banjarmangu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	16.000.000,00
TOTAL													2.923.000.000,00					2.486.800.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing – masing program/ kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

Pertama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan dengan 4 Kegiatan, antara lain 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dua sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan sub kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2)Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tiga sub Kegiatan antara lain Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran; 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 2 Sub Kegiatan anatra lain Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 Sub Kegiatan anataralain sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor .5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 Sub Kegiatan antara lain, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opreasional atau Lapangan, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kedua Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan satu Kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan 3 Sub Kegiatan antara lain Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang lain yang di Limpahkan.

Ketiga Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan satu Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Keempat Program Pembinaan dan Pengawasam Pemerintahan Desa dengan satu kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 8 sub kegiatan yaitu Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Banjarmangu . Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan Kegiatan tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dal

Dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.



Banjarmangu, 31 Juli 2023
CAMAT BANJARMANGU

SRI SUPIJAH ANGGOROWATI, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 19650810 198607 2 001

USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BANJARMANGU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	UNSUR KEWILAYAHAN								2.051.520.698		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana			Kec. Bjm	100%			1.902.250.698		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun				100%	2.400.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 dok		1.200.000		
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 dok		1.200.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	1.582.577.222		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 org/bln		1.554.497.222		

	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen		26.580.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 laporan		1.500.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana				100%	148.600.400		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 paket		14.644.500		
	Penyedia bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket		120.305.900		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan		13.650.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia				100%	36.927.250		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan					5 unit	36.927.250		

	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	101.038.624		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan		27.400.000		
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan		73.638.624		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	30.707.202		
	Penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 unit		13.470.000		
	Pemeliharaan/rehabilitata si sarana prasarana gedung		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit		8.624.562		
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit		8.612.640		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan			Kec. Bjm	100%			74.270.000		

	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			Persentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum				100%	-		
	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen		-		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana				100%	74.270.000		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah dokumen Perijinan Non Usaha yang di Laksanakan.				990 dokumen		-		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				1.887 dokumen		-		
	Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan				1 laporan		74.270.000		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>			<i>Kec. Bjm</i>	100%			-		

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan				100%	-		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 dok		-		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			<i>Kec. Bjm</i>	100%			75.000.000		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana				100%	75.000.000		
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa		Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				17 dok		-		
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa		Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				17 dok		-		
	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3 dok		75.000.000		

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17 dok		-		
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa		Jumlah sinkronisasi perencanaan pembangunan desa				17 dok		-		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				17 dok		-		
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa		Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				17 dok		-		
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				17 dok		-		
JUMLAH									2.051.520.698		